

Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan entitas anaknya

Laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Maret 2017 (tidak diaudit)
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut (tidak
diaudit)

**Surat Pernyataan Direksi
mengenai Tanggung Jawab Direksi untuk**

**Laporan Keuangan Konsolidasian tanggal 31 Maret 2017
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut (tidak diaudit)
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan Entitas Anaknya**

Atas nama Direksi, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : Alex J. Sinaga
Alamat Kantor : Jl. Japati No.1 Bandung 40133
Alamat Domisili : Jl. Angrek Nelimurni B-70 No. 38 Kelurahan Kemanggisan
Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat
Nomor Telepon : (022) 452 7101
Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : Harry M. Zen
Alamat Kantor : Jl. Japati No.1 Bandung 40133
Alamat Domisili : Jl. Zeni AD VI No. 4 Kelurahan Rawajati
Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan
Nomor Telepon : (022) 452 7201/ 021 520 9824
Jabatan : Direktur Keuangan

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas persiapan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk ("Perusahaan") dan entitas anak;
2. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak telah dipersiapkan dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia;
3. Seluruh informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak ini telah diungkapkan secara lengkap dan benar;
4. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
5. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Perusahaan dan entitas anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, April 2017





Alex J. Sinaga
Direktur Utama

Harry M. Zen
Direktur Keuangan



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 MARET 2017 DAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(TIDAK DIAUDIT)**

DAFTAR ISI

	Halaman
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	2
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	3-4
Laporan Arus Kas Konsolidasian	5
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	6-119

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 (tidak diaudit) dan 31 Desember 2016 (diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2017	2016
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	2c,2e,2u,3,31,37	33.699	29.767
Aset keuangan lancar lainnya	2c,2e,2u,4,31,37	1.474	1.471
Piutang usaha - setelah dikurangi provisi penurunan nilai piutang	2g,2u,2ab,5,37		
Pihak berelasi	2c,31	1.655	894
Pihak ketiga		7.393	6.469
Piutang lain-lain - setelah dikurangi provisi penurunan nilai piutang	2g,2u,37	507	537
Persediaan - setelah dikurangi provisi persediaan usang	2h,6	613	584
Uang muka dan beban dibayar di muka	2c,2i,2m,7,31	5.668	5.246
Tagihan restitusi pajak	2t,26	684	592
Pajak dibayar di muka	2t,26	2.531	2.138
Aset tersedia untuk dijual	2j,9	29	3
Jumlah Aset Lancar		<u>54.253</u>	<u>47.701</u>
ASET TIDAK LANCAR			
Penyertaan jangka panjang	2f,8	1.865	1.847
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	2l,2m,2aa,9,34	115.621	114.498
Beban manfaat pensiun dibayar di muka	2s,29	104	199
Uang muka dan aset tidak lancar lainnya	2c,2g,2i,2n,2u,10,31,37	11.987	11.508
Aset takberwujud - setelah dikurangi akumulasi amortisasi	2d,2k,2n,2aa,11	3.038	3.089
Aset pajak tangguhan - bersih	2t,26	722	769
Jumlah Aset Tidak Lancar		<u>133.337</u>	<u>131.910</u>
JUMLAH ASET		<u>187.590</u>	<u>179.611</u>
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha	2o,2u,12,37		
Pihak berelasi	2c,31	1.491	1.547
Pihak ketiga		10.907	11.971
Utang lain-lain	2u,37	197	172
Utang pajak	2t,26	4.315	2.954
Beban yang masih harus dibayar	2c,2u,13,31,37	12.567	11.283
Pendapatan diterima di muka	2r,14	5.077	5.563
Uang muka pelanggan dan pemasok	2c,31	669	840
Utang bank jangka pendek	2c,2m,2p,2u,15a,31,37	914	911
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	2c,2m,2p,2u,15b,31,37	4.550	4.521
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		<u>40.687</u>	<u>39.762</u>
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	2t,26	780	745
Pendapatan diterima di muka	2r,14	484	425
Liabilitas lainnya		7	29
Liabilitas diestimasi penghargaan masa kerja	2s,30	614	613
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya	2s,29	6.242	6.126
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	2c,2m,2p,2u,16,31,37	26.319	26.367
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		<u>34.446</u>	<u>34.305</u>
JUMLAH LIABILITAS		<u>75.133</u>	<u>74.067</u>
EKUITAS			
Modal saham	1c,18	5.040	5.040
Tambahan modal disetor	2v,19	4.931	4.931
Modal saham yang diperoleh kembali	2v,20	(2.541)	(2.541)
Komponen ekuitas lainnya	2f,2u,21	344	339
Saldo laba			
Ditentukan penggunaannya	28	15.337	15.337
Belum ditentukan penggunaannya		67.966	61.278
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk - bersih		91.077	84.384
Kepentingan nonpengendali	2b,17	21.380	21.160
JUMLAH EKUITAS		<u>112.457</u>	<u>105.544</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		<u>187.590</u>	<u>179.611</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2017 dan 2016 (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2017	2016
PENDAPATAN	2c,2r,22,31	31.022	27.542
Beban operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi	2c,2r,24,31	(8.298)	(7.651)
Beban penyusutan dan amortisasi	2k,2l,2m,9,11	(4.773)	(4.405)
Beban karyawan	2c,2r,2s,23,31	(2.977)	(2.999)
Beban interkoneksi	2c,2r,31	(727)	(784)
Beban umum dan administrasi	2c,2r,25,31	(1.226)	(701)
Beban pemasaran	2r	(985)	(752)
Rugi selisih kurs - bersih	2q	(50)	(114)
Penghasilan lain-lain	2l,2r,9c	500	294
Beban lain-lain	2r,9c	5	(858)
LABA USAHA		12.491	9.572
Penghasilan pendanaan	2c,31	432	499
Biaya pendanaan	2c,2p,2r,31	(616)	(770)
Bagian laba (rugi) bersih entitas asosiasi	2f,8	17	15
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		12.324	9.316
(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN	2t,26		
Pajak kini		(2.991)	(2.607)
Pajak tangguhan		43	184
		(2.948)	2.423
LABA PERIODE BERJALAN		9.376	6.893
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
<i>Penghasilan komprehensif lain yang akan direklasifikasikan ke laba rugi pada periode berikutnya:</i>			
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	2f,2q,21	(10)	(70)
Perubahan bersih nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual	2u,21	15	2
Bagian penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi	2f,8	-	-
<i>Penghasilan komprehensif lain yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi pada periode berikutnya:</i>			
(Rugi) laba aktuarial - bersih	2s,29	-	-
Penghasilan komprehensif lain - bersih		5	(68)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN		9.381	6.825
Laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk		6.688	4.587
Kepentingan nonpengendali	2b,17	2.688	2.306
		9.376	6.893
Jumlah laba komprehensif periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk		6.693	4.518
Kepentingan nonpengendali	2b,17	2.688	2.307
		9.381	6.825
LABA PER SAHAM DASAR DAN DILUSIAN			
(dalam jumlah penuh)	2x,27		
Laba bersih per saham		67,51	46,72
Laba bersih per ADS (100 saham Seri B per ADS)		6.751,31	4.672,20

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2017 dan 2016 (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	Distribusikan kepada pemilik entitas induk									
		Modal Saham	Tambahannya modal disetor	Modal saham yang diperoleh kembali	Komponen ekuitas lainnya	Saldo laba		Jumlah bersih	Kepentingan nonpengendali	Jumlah ekuitas	
						Ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya				
Saldo, 1 Januari 2017		5.040	4.931	(2.541)	339	15.337	61.278	84.384	21.160	105.544	
Dividen kas	2w,28	-	-	-	-	-	-	-	(2.468)	(2.468)	
Laba periode berjalan	2b,17	-	-	-	-	-	6.688	6.688	2.688	9.376	
Penghasilan komprehensif lain	2f,2q,2s,2u,17	-	-	-	5	-	-	5	-	5	
Saldo, 31 Maret 2017		5.040	4.931	(2.541)	344	15.337	67.966	91.077	21.380	112.457	

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2017 dan 2016 (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	Distribusikan kepada pemilik entitas induk						Jumlah bersih	Kepentingan nonpengendali	Jumlah ekuitas
		Modal Saham	Tambahan modal disetor	Modal saham yang diperoleh kembali	Komponen ekuitas lainnya	Saldo laba				
						Ditetapkan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya			
Saldo, 1 Januari 2016		5.040	2.935	(3.804)	508	15.337	55.120	75.136	18.292	93.428
Penambahan setoran modal		-	-	-	-	-	-	-	63	63
Dividen kas	2w,28	-	-	-	-	-	-	-	(23)	(23)
Laba periode berjalan	2b,17	-	-	-	-	-	4.587	4.587	2.306	6.893
Penghasilan komprehensif lain	2f,2q,2s,2u,17	-	-	-	(68)	-	-	(68)	1	(67)
Saldo, 31 Maret 2016		5.040	2.935	(3.804)	440	15.337	59.707	79.655	20.639	100.294

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2017 dan 2016 (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2017	2016
ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI			
Penerimaan kas dari:			
Pelanggan		25.603	24.761
Operator lain		2.802	1.829
Jumlah penerimaan kas dari pendapatan		28.405	26.590
Pendapatan bunga diterima		400	472
Pembayaran kas untuk beban		(10.543)	(8.639)
Pembayaran kas kepada karyawan		(2.571)	(2.344)
Pembayaran pajak penghasilan badan dan final		(1.885)	(1.318)
Pembayaran beban bunga		(824)	(810)
Pembayaran pajak pertambahan nilai - bersih		35	(454)
Penerimaan kas lainnya - bersih		53	(354)
Arus kas bersih yang dihasilkan dari kegiatan operasi		13.070	13.143
ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI			
Hasil dari penjualan aset tetap	9	333	104
Hasil dari klaim asuransi	9	79	12
Pencairan deposito berjangka dan aset keuangan tersedia untuk dijual		32	50
Pembelian aset tetap	9,39	(6.527)	(5.827)
Pembelian aset takberwujud	11,39	(276)	(169)
(Kenaikan) penurunan uang muka pembelian aset tetap		(111)	271
Kenaikan pada aset lainnya		(69)	(20)
Penambahan penyertaan jangka panjang	8	(1)	(3)
Arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi		(6.540)	(5.582)
ARUS KAS DARI KEGIATAN PENDANAAN			
Pencairan utang bank dan pinjaman lainnya	15,16	1.537	1.091
Penerimaan setoran modal pada entitas anak dari pemegang saham nonpengendali		-	63
Pembayaran dividen kas kepada pemegang saham nonpengendali entitas anak		(2.468)	(23)
Pembayaran utang bank dan pinjaman lainnya	15,16	(1.639)	(817)
Arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan pendanaan		(2.570)	314
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		3.960	7.875
DAMPAK PERUBAHAN KURS TERHADAP KAS DAN SETARA KAS		(28)	(254)
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE	3	29.767	28.116
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE	3	33.699	35.737

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (“Perusahaan”) pada mulanya merupakan bagian dari “*Post en Telegraafdienst*”, yang didirikan dan beroperasi secara komersial pada tahun 1884 berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 7 tanggal 27 Maret 1884 dan diumumkan dalam Berita Negara Hindia Belanda No. 52 tanggal 3 April 1884.

Pada tahun 1991, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1991, status Perusahaan diubah menjadi perseroan terbatas milik negara (“Persero”). Entitas induk terakhir Perusahaan adalah Pemerintah Republik Indonesia (“Pemerintah”) (Catatan 1c dan 18).

Perusahaan didirikan berdasarkan akta notaris Imas Fatimah, S.H. No. 128 tanggal 24 September 1991. Akta pendirian tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-6870.HT.01.01.Th.1991 tanggal 19 November 1991 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 5 tanggal 17 Januari 1992, Tambahan No. 210. Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali diubah, perubahan terakhir antara lain dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta Peraturan dan Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara, penambahan kegiatan usaha utama dan penunjang Perusahaan, penambahan hak khusus Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, perubahan ketentuan tentang pembatasan wewenang Direksi terkait tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dalam menjalankan tindakan pengurusan Perusahaan serta penyempurnaan redaksi dan sistematika Anggaran Dasar bertalian dengan penambahan substansi Anggaran Dasar, berdasarkan akta notaris Ashoya Ratam, S.H., MKn. No. 20 tanggal 12 Mei 2015. Perubahan terakhir telah diterima dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Menkumham”) berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0938775 tanggal 9 Juni 2015 dan Keputusan Menkumham No. AHU-0936901.AH.01.02 Tahun 2015 tanggal 9 Juni 2015.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi dan informatika, serta optimalisasi sumber daya Perusahaan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, Perusahaan menjalankan kegiatan yang meliputi:

- a. Usaha utama:
 - i. Merencanakan, membangun, menyediakan, mengembangkan, mengoperasikan, memasarkan atau menjual atau menyewakan, dan memelihara jaringan telekomunikasi dan informatika dalam arti yang luas dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ii. Merencanakan, mengembangkan, menyediakan, memasarkan/menjual, dan meningkatkan layanan jasa telekomunikasi dan informatika dalam arti yang luas dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - iii. Melakukan investasi termasuk penyertaan modal pada perusahaan lainnya sejalan dengan dan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan.
- b. Usaha penunjang:
 - i. Menyediakan jasa transaksi pembayaran dan pengiriman uang melalui jaringan telekomunikasi dan informatika.
 - ii. Menjalankan kegiatan dan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya yang dimiliki Perusahaan, yang antara lain pemanfaatan aset tetap dan aset bergerak, fasilitas sistem informasi, fasilitas pendidikan dan pelatihan, fasilitas pemeliharaan dan perbaikan.
 - iii. Bekerja sama dengan pihak lain dalam rangka optimalisasi sumber daya informatika, komunikasi atau teknologi yang dimiliki oleh pihak lain pelaku industri informatika, komunikasi dan teknologi, sejalan dengan dan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan.

Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Jalan Japati No. 1, Bandung, Jawa Barat.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan)

Perusahaan memiliki beberapa izin penyelenggaraan jaringan dan/atau jasa dari Pemerintah yang berlaku sampai jangka waktu yang tidak terbatas selama Perusahaan tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam izin-izin tersebut. Untuk setiap izin, yang diterbitkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika ("Menkominfo"), evaluasi dilakukan setiap tahun dan evaluasi menyeluruh dilakukan setiap 5 (lima) tahun. Perusahaan wajib menyampaikan laporan atas penyelenggaraan jaringan dan/atau jasa berdasarkan izin-izin tersebut diatas setiap tahun kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika ("DJPI") sebelumnya Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi ("DJPT").

Laporan tersebut meliputi beberapa informasi seperti kemajuan pengembangan jaringan, pencapaian standar kualitas jasa, jumlah pelanggan, pembayaran biaya atas hak penyelenggaraan, dan kontribusi pelayanan universal, sementara untuk Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik, Jasa Interkoneksi Internet, dan Jasa Akses Internet terdapat tambahan informasi yang dipersyaratkan seperti kinerja operasi, segmen pelanggan, lalu lintas, dan pendapatan kotor.

Rincian izin-izin tersebut adalah sebagai berikut:

Izin	No Izin	Jenis Jasa	Tanggal penetapan/ perpanjangan
Izin penerbitan uang elektronik	Izin Bank Indonesia 11/432/DASP	Penerbit uang elektronik	3 Juli 2009
Izin penyelenggaraan pengiriman uang	Izin Bank Indonesia 11/23/bd/8	Penyelenggaraan pengiriman uang	5 Agustus 2009
Izin penyelenggaraan jasa interkoneksi internet	331/KEP/DJPI/ KOMINFO/9/2013	Jasa interkoneksi internet	24 September 2013
Izin penyelenggaraan jasa internet teleponi untuk keperluan publik	127/KEP/DJPI/ KOMINFO/3/2016	Jasa internet teleponi untuk keperluan publik	30 Maret 2016
Izin penyelenggaraan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh	839/KEP/ M.KOMINFO/05/2016	Jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh	16 Mei 2016
Izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup	844/KEP/ M.KOMINFO/05/2016	Jaringan tetap tertutup	16 Mei 2016
Izin penyelenggaraan jaringan tetap sambungan internasional	846/KEP/ M.KOMINFO/05/2016	Jaringan tetap sambungan internasional	16 Mei 2016
Izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis <i>circuit switched</i>	948/KEP/ M.KOMINFO/05/2016	Jaringan tetap lokal berbasis <i>circuit switched</i>	31 Mei 2016
Izin penyelenggaraan jasa sistem komunikasi data	191/KEP/DJPI/ KOMINFO/10/2016	Jasa sistem komunikasi data	31 Oktober 2016
Izin penyelenggaraan jasa akses internet	2176/KEP/ M.KOMINFO/12/2016	Jasa akses internet	30 Desember 2016

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Corporate Secretary dan Karyawan

1. Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan keputusan yang dibuat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang dinyatakan dalam akta notaris No. 50 tanggal 22 April 2016 oleh Ashoya Ratam., S.H., Mkn., susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing adalah sebagai berikut:

	<u>31 Maret 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Komisaris Utama	Hendri Saporini	Hendri Saporini
Komisaris	Dolfie Othniel Fredric Palit	Dolfie Othniel Fredric Palit
Komisaris	Hadiyanto	Hadiyanto
Komisaris	Pontas Tambunan	Pontas Tambunan
Komisaris Independen	Rinaldi Firmansyah	Rinaldi Firmansyah
Komisaris Independen	Margiyono Darsasumarja	Margiyono Darsasumarja
Komisaris Independen	Pamiyati Pamela Johanna	Pamiyati Pamela Johanna
Direktur Utama	Alex Janangkih Sinaga	Alex Janangkih Sinaga
Direktur Keuangan	Harry Mozarta Zen	Harry Mozarta Zen
Direktur <i>Digital and Strategic Portfolio*</i>	Harry Mozarta Zen	Indra Utoyo
Direktur <i>Enterprise and Business Service**</i>	Honesti Basyir	-
Direktur <i>Wholesale and International Services</i>	Honesti Basyir	Honesti Basyir
Direktur <i>Human Capital Management</i>	Herdy Rosadi Harman	Herdy Rosadi Harman
Direktur <i>Network, Information Technology and Solution</i>	Abdus Somad Arief	Abdus Somad Arief
Direktur <i>Consumer Service</i>	Dian Rachmawan	Dian Rachmawan

*Pada tanggal 15 Maret 2017, Indra Utoyo diangkat sebagai Direktur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Berdasarkan Keputusan Rapat Direksi Nomor 13/REG/III/2017 tanggal 29 Maret 2017, Harry Mozarta Zen selaku Direktur Keuangan ditetapkan sebagai Pejabat Pengganti Sementara (PGS) Direktur *Digital and Strategic Portfolio*.

**Pada tanggal 9 September 2016, Muhammad Awaluddin diangkat sebagai Direktur PT Angkasa Pura II. Berdasarkan Keputusan Rapat Direksi Nomor 33/REG/IX/2016 tanggal 13 September 2016, Honesti Basyir selaku Direktur *Wholesale and International Service* ditetapkan sebagai PGS Direktur *Enterprise and Business Service*.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, *Corporate Secretary* dan Karyawan (lanjutan)

2. Komite Audit dan *Corporate Secretary*

Susunan Komite Audit dan *Corporate Secretary* Perusahaan pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Maret 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Ketua	Rinaldi Firmansyah	Rinaldi Firmansyah
Sekretaris	Tjatur Purwadi	Tjatur Purwadi
Anggota	Margiyono Darsasumarja	Margiyono Darsasumarja
Anggota	Dolfie Othniel Fredric Palit	Dolfie Othniel Fredric Palit
Anggota	Sarimin Mietra Sardi	Sarimin Mietra Sardi
Anggota	Pontas Tambunan	Pontas Tambunan
<i>Corporate Secretary</i>	Andi Setiawan	Andi Setiawan

3. Karyawan

Jumlah karyawan Perusahaan dan entitas anak ("Grup") pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing adalah 23.492 orang dan 23.876 orang (tidak diaudit).

c. Penawaran umum efek Perusahaan

Jumlah saham Perusahaan sesaat sebelum penawaran umum perdana (*Initial Public Offering* atau "IPO") adalah 8.400.000.000, yang terdiri dari 8.399.999.999 saham Seri B dan 1 saham Seri A Dwiwarna yang seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah. Pada tanggal 14 November 1995, Pemerintah menjual saham Perusahaan yang terdiri dari 933.333.000 saham baru Seri B dan 233.334.000 saham Seri B milik Pemerintah kepada masyarakat melalui IPO di Bursa Efek Indonesia ("BEI"), dan penawaran dan pencatatan di Bursa Efek New York ("NYSE") dan Bursa Efek London ("LSE") atas 700.000.000 saham Seri B milik Pemerintah dalam bentuk *American Depositary Shares* ("ADS"). Terdapat 35.000.000 ADS dan masing-masing ADS mewakili 20 saham Seri B pada saat itu.

Pada bulan Desember 1996, Pemerintah menjual saham Perusahaan sebanyak 388.000.000 saham Seri B dan selanjutnya pada tahun 1997, Pemerintah membagikan 2.670.300 saham Seri B sebagai insentif bagi para pemegang saham Perusahaan yang tidak menjual sahamnya selama satu tahun terhitung sejak tanggal IPO. Pada bulan Mei 1999, Pemerintah kembali menjual 898.000.000 saham Seri B.

Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, pada RUPST Perusahaan tanggal 16 April 1999, para pemegang saham Perusahaan memutuskan untuk meningkatkan modal ditempatkan yang berasal dari kapitalisasi sebagian tambahan modal disetor melalui pembagian saham bonus sejumlah 746.666.640 lembar saham. Pembagian saham bonus kepada para pemegang saham Perusahaan dilakukan pada bulan Agustus 1999. Pada tanggal 16 Agustus 2007, Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas telah diamandemen dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berlaku efektif pada tanggal yang sama. Pemberlakuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tidak berdampak terhadap penawaran umum efek Perusahaan. Perusahaan telah memenuhi ketentuan Undang-Undang tersebut.

Pada bulan Desember 2001, Pemerintah menjual 1.200.000.000 saham atau 11,9% dari jumlah saham Seri B yang beredar. Pada bulan Juli 2002, Pemerintah kembali menjual 312.000.000 saham atau 3,1% dari jumlah saham Seri B yang beredar.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

c. Penawaran umum efek Perusahaan (lanjutan)

Berdasarkan hasil RUPST Perusahaan yang dinyatakan dalam akta notaris A. Partomuan Pohan, S.H., LL.M. No. 26 tanggal 30 Juli 2004, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pemecahan saham Perusahaan untuk Seri A Dwiwarna dan Seri B dari 1 menjadi 2. Untuk 1 saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp500 dipecah menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp250 dan 1 saham Seri B dengan nilai nominal Rp250. Jumlah modal saham dasar Perusahaan setelah pemecahan meningkat dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 39.999.999.999 saham Seri B menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dan 79.999.999.999 saham Seri B, dan jumlah modal saham ditempatkan Perusahaan meningkat dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 10.079.999.639 saham Seri B menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dan 20.159.999.279 saham Seri B. Setelah pemecahan saham, setiap ADS mewakili 40 saham Seri B.

Berdasarkan keputusan RUPSLB Perusahaan tanggal 21 Desember 2005, RUPST Perusahaan tanggal 29 Juni 2007, tanggal 20 Juni 2008, dan tanggal 19 Mei 2011 para pemegang saham Perusahaan menyetujui masing-masing rencana tahap I, II, III dan IV untuk pembelian kembali saham Seri B (Catatan 20).

Pada tanggal 21 Desember 2005 sampai dengan tanggal 20 Juni 2007, Perusahaan melakukan pembelian saham kembali sebanyak 211.290.500 saham dari publik yang merupakan program pembelian kembali saham tahap pertama. Pada tanggal 30 Juli 2013, Perusahaan menjual kembali seluruh saham tersebut (Catatan 20).

Berdasarkan keputusan RUPST Perusahaan tanggal 19 April 2013 yang dinyatakan dalam akta notaris No. 38 tanggal 19 April 2013 oleh Ashoya Ratam, S.H., MKn., para pemegang saham Perusahaan menyetujui perubahan rencana Perusahaan atas penggunaan saham yang diperoleh kembali tahap III (Catatan 20).

Berdasarkan keputusan RUPST Perusahaan tanggal 19 April 2013 yang dinyatakan dalam akta notaris No. 38 tanggal 19 April 2013 oleh Ashoya Ratam, S.H., MKn., para pemegang saham Perusahaan menyetujui pemecahan saham Perusahaan untuk Seri A Dwiwarna dan Seri B dari 1 menjadi 5. Untuk 1 saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp250 dipecah menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp50 dan 4 saham Seri B dengan nilai nominal Rp50. Jumlah modal saham dasar Perusahaan setelah pemecahan meningkat dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 79.999.999.999 saham Seri B menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dan 399.999.999.999 saham Seri B. Jumlah modal saham ditempatkan Perusahaan meningkat dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 20.159.999.279 saham Seri B menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dan 100.799.996.399 saham Seri B. Setelah pemecahan saham, setiap ADS mewakili 200 saham seri B. Efektif tanggal 26 Oktober 2016, Perusahaan melakukan perubahan rasio *Depositary Receipt* dari 1 ADS mewakili 200 saham seri B menjadi 1 ADS mewakili 100 saham seri B (Catatan 18). Informasi laba bersih per ADS pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya konsolidasian telah disesuaikan dengan perubahan rasio ini.

Pada tanggal 16 Mei dan 5 Juni 2014, Perusahaan telah melakukan pembatalan pencatatan pada Bursa Efek Tokyo ("TSE") dan *delisting* pada LSE.

Pada tanggal 31 Maret 2017, seluruh saham Seri B Perusahaan telah dicatatkan pada BEI dan 66.000.413 ADS telah dicatatkan pada NYSE (Catatan 18).

Pada tanggal 25 Juni 2010, Perusahaan menerbitkan obligasi Rupiah kedua masing-masing sebesar Rp1.005 miliar untuk Seri A yang berjangka waktu 5 (lima) tahun dan Rp1.995 miliar untuk Seri B yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dicatatkan di BEI (Catatan 16b.i).

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

c. Penawaran umum efek Perusahaan (lanjutan)

Pada tanggal 16 Juni 2015, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 masing-masing sebesar Rp2.200 miliar untuk Seri A yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun, Rp2.100 miliar untuk Seri B yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun, Rp1.200 miliar untuk Seri C yang berjangka waktu 15 (lima belas) tahun dan Rp1.500 miliar untuk Seri D yang berjangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dan dicatatkan di BEI (Catatan 16b.i).

Pada tanggal 21 Desember 2015, Perusahaan telah menjual kembali sisa saham hasil pembelian kembali saham tahap III (Catatan 20).

Pada tanggal 29 Juni 2016, Perusahaan telah menjual kembali saham hasil pembelian kembali saham tahap IV (Catatan 20).

d. Entitas anak

Pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016, Perusahaan telah mengkonsolidasikan laporan keuangan semua entitas anak yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung, sebagai berikut (Catatan 2b dan 2d):

(i) Entitas anak dengan kepemilikan langsung:

Entitas anak/ domisili	Jenis usaha/tanggal pendirian atau akuisisi oleh Perusahaan	Tahun dimulainya operasi komersial	Persentase hak kepemilikan		Jumlah aset sebelum eliminasi	
			31 Maret 2017	31 Desember 2016	31 Maret 2017	31 Desember 2016
PT Telekomunikasi Selular ("Telkomsel"), Jakarta, Indonesia	Telekomunikasi - operator fasilitas telekomunikasi dan jasa telepon seluler menggunakan teknologi Global System for Mobile Communication ("GSM")/ 26 Mei 1995	1995	65	65	92.805	89.781
PT Multimedia Nusantara ("Metra"), Jakarta, Indonesia	Jasa jaringan telekomunikasi & multimedia/ 9 Mei 2003	1998	100	100	12.462	10.020
PT Dayamitra Telekomunikasi ("Dayamitra"), Jakarta, Indonesia	Telekomunikasi/ 17 Mei 2001	1995	100	100	11.331	10.689
PT Telekomunikasi Indonesia International ("TI"), Jakarta, Indonesia	Telekomunikasi/ 31 Juli 2003	1995	100	100	7.831	7.147
PT Telkom Akses ("Telkom Akses"), Jakarta, Indonesia	Pembangunan, jasa dan perdagangan bidang telekomunikasi/ 26 November 2012	2013	100	100	4.901	5.098
PT Graha Sarana Duta ("GSD"), Jakarta, Indonesia	Penyewaan kantor dan manajemen gedung dan jasa pemeliharaan, konsultan sipil, dan pengembang/ 25 April 2001	1982	99,99	99,99	4.411	4.333
PT PINS Indonesia ("PINS"), Jakarta, Indonesia	Jasa dan pembangunan telekomunikasi/ 15 Agustus 2002	1995	100	100	3.190	3.146
PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia ("Telkom Infratel"), Jakarta, Indonesia	Pembangunan, jasa dan perdagangan bidang telekomunikasi/ 16 Januari 2014	2014	100	100	1.227	1.015

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas anak (lanjutan)

(i) Entitas anak dengan kepemilikan langsung (lanjutan):

Entitas anak/ domisili	Jenis usaha/tanggal pendirian atau akuisisi oleh Perusahaan	Tahun dimulainya operasi komersial	Persentase hak kepemilikan		Jumlah aset sebelum eliminasi	
			31 Maret 2017	31 Desember 2016	31 Maret 2017	31 Desember 2016
PT Patra Telekomunikasi Indonesia ("Patrakom"), Jakarta, Indonesia	Telekomunikasi - menyediakan sistem komunikasi satelit, jasa, dan sarana terkait/ 28 September 1995	1996	100	100	510	472
PT Metranet ("Metranet"), Jakarta, Indonesia	Jasa portal multimedia/ 17 April 2009	2009	100	100	403	370
PT Jalin Pembayaran Nusantara ("Jalin"), Jakarta, Indonesia	Jasa pembayaran - kegiatan prinsipal, kegiatan <i>switching</i> , kliring, dan <i>settlement</i> / 3 November 2016	2016	100	100	45	15
PT Napsindo Primatel Internasional ("Napsindo"), Jakarta, Indonesia	Telekomunikasi - menyediakan <i>Network</i> , <i>Access Point</i> (NAP), <i>Voice Over Data</i> (VOD), dan jasa terkait lainnya/ 29 Desember 1998	1999; berhenti beroperasi pada tanggal 13 Januari 2006	60	60	5	5

(ii) Entitas anak dengan kepemilikan tidak langsung:

Entitas anak/ domisili	Jenis usaha/tanggal pendirian atau akuisisi oleh Perusahaan	Tahun dimulainya operasi komersial	Persentase hak kepemilikan		Jumlah aset sebelum eliminasi	
			31 Maret 2017	31 Desember 2016	31 Maret 2017	31 Desember 2016
PT Sigma Cipta Caraka ("Sigma"), Tangerang, Indonesia	Jasa teknologi informatika - implementasi dan integrasi sistem, <i>outsourcing</i> , dan pemeliharaan lisensi piranti lunak/ 1 Mei 1987	1988	100	100	5.509	4.289
PT Infomedia Nusantara ("Infomedia"), Jakarta, Indonesia	Jenis data dan informasi - menyediakan jasa informasi telekomunikasi dan jasa informasi lainnya dalam bentuk media cetak dan elektronik, dan jasa <i>call center</i> / 22 September 1999	1984	100	100	2.804	1.860
Telekomunikasi Indonesia International Pte. Ltd., Singapura	Telekomunikasi/ 6 Desember 2007	2008	100	100	2.630	2.566
PT Telkom Landmark Tower ("TLT"), Jakarta, Indonesia	Jasa pengembangan dan manajemen properti/ 1 Februari 2012	2012	55	55	1.776	1.683
PT Finnet Indonesia ("Finnet"), Jakarta, Indonesia	Jasa teknologi informatika/ 31 Oktober 2005	2006	60	60	805	629
PT Metra Digital Media ("MD Media"), Jakarta, Indonesia	Jasa layanan informasi dalam bentuk direktori khusus/ 22 Januari 2013	2013	99,99	99,99	765	684

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas anak (lanjutan)

(ii) Entitas anak dengan kepemilikan tidak langsung (lanjutan):

Entitas anak/ domisili	Jenis usaha/tanggal pendirian atau akuisisi oleh Perusahaan	Tahun dimulainya operasi komersial	Persentase hak kepemilikan		Jumlah aset sebelum eliminasi	
			31 Maret 2017	31 Desember 2016	31 Maret 2017	31 Desember 2016
Telekomunikasi Indonesia International ("TL") S.A., Timor Leste	Telekomunikasi/ 11 September 2012	2012	100	100	729	755
Telekomunikasi Indonesia International Ltd, Hong Kong	Telekomunikasi/ 8 Desember 2010	2010	100	100	520	441
PT Metra Digital Investama ("MDI"), Jakarta, Indonesia	Jasa perdagangan informasi & teknologi multimedia, hiburan & investasi/ 8 Januari 2013	2013	99,99	99,99	324	331
PT Metra Plasa ("Metra Plasa"), Jakarta, Indonesia	Jasa jaringan & e-commerce/ 9 April 2012	2012	60	60	262	325
PT Nusantara Sukses Investasi ("NSI"), Jakarta, Indonesia	Jasa dan perdagangan/ 1 September 2014	2014	99,99	99,99	255	227
PT Administrasi Medika ("Ad Medika"), Jakarta, Indonesia	Jasa administrasi asuransi kesehatan/ 25 Februari 2010	2002	100	100	195	204
PT Melon ("Melon") Jakarta, Indonesia	Jasa penjualan konten digital/ 14 November 2016	2010	100	100	189	178
PT Graha Yasa Selaras ("GYS"), Jakarta, Indonesia	Jasa pariwisata/ 27 April 2012	2012	51	51	176	174
Telekomunikasi Indonesia International Pty Ltd, ("Telkom Australia"), Australia	Telekomunikasi/ 9 Januari 2013	2013	100	100	147	161
PT Sarana Usaha Sejahtera Insanpalapa ("TelkoMedika"), Jakarta, Indonesia	Jasa pelayanan kesehatan, apotek, dan laboratorium, dll/ 30 November 2015	2008	75	75	72	72
PT Satelit Multimedia Indonesia ("SMI"), Jakarta, Indonesia	Jasa satelit/ 25 Maret 2013	2013	99,99	99,99	18	18
Telekomunikasi Indonesia International ("Telkom USA"), Inc., USA	Telekomunikasi/ 11 Desember 2013	2014	100	100	9	9
PT Nusantara Sukses Sarana ("NSS"), Jakarta, Indonesia	Jasa pengelolaan gedung dan hotel, dll/ 1 September 2014	-	99,99	99,99	-	-
PT Nusantara Sukses Realti ("NSR"), Jakarta, Indonesia	Jasa dan perdagangan/ 1 September 2014	-	99,99	99,99	-	-
PT Metra TV ("Metra TV"), Jakarta, Indonesia	Jasa penyiaran berlangganan/ 8 Januari 2013	-	99,99	99,83	-	-

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas anak (lanjutan)

(ii) Entitas anak dengan kepemilikan tidak langsung (lanjutan):

(a) Metra

Berdasarkan akta notaris Utiek Rochmuljati Abdurachman, S.H., M.LI, M.Kn., No. 10, 11, 12, 13, 14 tanggal 25 Mei 2016, Metra membeli 2.000 saham Ad Medika dari kepemilikan saham minoritas setara dengan 25% kepemilikan saham dengan harga sebesar Rp138 miliar.

(b) Sigma

Berdasarkan akta notaris Utiek R. Abdurachman, S.H., M.LI, M.Kn., No. 15 tanggal 29 Juni 2016, Sigma membeli saham PT Pojok Celebes Mandiri ("PCM") sebanyak 13.770 saham (setara dengan 51% kepemilikan saham) dari Metra dengan harga perolehan sebesar Rp7,8 miliar.

(c) Jalin

Pada tanggal 3 November 2016, Perusahaan mendirikan entitas anak dengan nama PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin) yang mendapat pengesahan dari Menkumham melalui surat keputusan nomor AHU-0050800.AH.01.01 tanggal 15 November 2016. Jalin bergerak dalam bidang ICT (*Information, Communication & Telecommunication*) yang berfokus pada usaha sistem pembayaran non-tunai yang mendukung *National Payment Gateway*.

(d) Metranet

Pada tanggal 10 November 2016, Metranet melakukan peningkatan modal dasar dari semula senilai Rp244 miliar menjadi Rp325 miliar dengan mengeluarkan 18.800.000 lembar saham baru yang seluruhnya dimiliki oleh Perusahaan.

Berdasarkan akta notaris Utiek R. Abdurrahman, S.H., M.LI, M.Kn., No.08 dan 09 tanggal 14 November 2016, Metranet mengakuisisi 4.900.000 lembar saham Melon (setara dengan 49% kepemilikan) dari SK Planet Co. Ltd. dan 300.000 lembar saham Melon (setara dengan 3% kepemilikan) dari Metra, masing-masing dengan harga sebesar US\$13.000.000 atau setara dengan Rp170,4 miliar dan Rp13,2 miliar. Dari transaksi ini, Metranet memperoleh 52% kepemilikan atas Melon dan sisanya dimiliki oleh Metra.

e. Kewenangan penerbitan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan telah disetujui untuk diterbitkan oleh Direksi pada tanggal 20 April 2017.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Laporan keuangan konsolidasian Grup disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (“SAK”) di Indonesia yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) di Indonesia dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) di Indonesia yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang “Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik”, yang terlampir dalam surat KEP-347/BL/2012.

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian, disusun dengan dasar akrual. Laporan keuangan konsolidasian juga disusun dengan dasar harga perolehan, kecuali untuk akun tertentu yang diukur dengan menggunakan dasar seperti yang disebutkan dalam catatan yang relevan.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dan menyajikan perubahan kas dan setara kas dari kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan.

Angka-angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini disajikan dalam dan dibulatkan menjadi miliaran Rupiah (“Rp”), kecuali dinyatakan lain.

Standar Akuntansi yang Telah Disahkan Namun belum Berlaku Efektif

Berlaku efektif 1 Januari 2018:

- Amandemen PSAK 2: Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan.
Amandemen ini mensyaratkan entitas untuk menyediakan pengungkapan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas maupun perubahan nonkas.
- Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi.
Amandemen ini:
 - Menambahkan contoh ilustrasi untuk mengklarifikasi bahwa perbedaan temporer dapat dikurangkan timbul ketika jumlah tercatat aset instrumen utang yang diukur pada nilai wajar dan nilai wajar tersebut lebih kecil dari dasar pengenaan pajaknya, tanpa mempertimbangkan apakah entitas memperkirakan untuk memulihkan jumlah tercatat instrumen utang melalui penjualan atau penggunaan, misalnya dengan memiliki dan menerima arus kas kontraktual, atau gabungan keduanya.
 - Mengklarifikasi bahwa untuk menentukan apakah laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dapat dimanfaatkan, maka penilaian perbedaan temporer yang dapat dikurangkan tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan pajak.
 - Menambahkan bahwa pengurangan pajak yang berasal dari pembalikan aset pajak tangguhan dikecualikan dari estimasi laba kena pajak masa depan. Lalu entitas membandingkan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dengan estimasi laba kena pajak masa depan yang tidak mencakup pengurangan pajak yang dihasilkan dari pembalikan aset pajak tangguhan tersebut untuk menilai apakah entitas memiliki laba kena pajak masa depan yang memadai.
 - Estimasi atas kemungkinan besar laba kena pajak masa depan dapat mencakup pemulihan beberapa aset entitas melebihi jumlah tercatatnya jika terdapat bukti yang memadai bahwa kemungkinan besar entitas akan mencapai hal tersebut.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

Standar baru atau amandemen berikut, yang akan berlaku efektif 1 Januari 2018, tidak berdampak bagi laporan keuangan konsolidasian Grup:

- PSAK 69: Agrikultur.
- Amandemen PSAK 16: Agrikultur: Tanaman Produktif.

b. Prinsip Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas anak dimana Perusahaan memiliki kendali. Pengendalian timbul ketika Grup terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas *investee*. Secara spesifik, Grup mengendalikan *investee* jika dan hanya jika Grup memiliki kekuasaan atas *investee*, eksposur atau hak, atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*, dan kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi imbal hasil.

Grup menilai kembali apakah Grup mengendalikan *investee* jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian. Entitas anak dikonsolidasi sejak tanggal ketika Grup memperoleh pengendalian secara efektif dan tidak dikonsolidasikan lagi sejak tanggal Grup kehilangan pengendalian. Aset, liabilitas, pendapatan dan beban entitas anak yang diperoleh atau dilepaskan selama periode berjalan dimasukkan ke dalam laporan keuangan konsolidasian sejak tanggal ketika Grup memperoleh pengendalian hingga tanggal sejak Grup kehilangan pengendalian.

Laba atau rugi dan setiap komponen pendapatan komprehensif lain diatribusikan pada pemilik Perusahaan dan pada kepentingan nonpengendali, meskipun hal ini akan mengakibatkan timbulnya saldo defisit pada kepentingan nonpengendali.

Saldo dan transaksi antar perusahaan yang signifikan telah dieliminasi pada laporan keuangan konsolidasian.

Saat Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak, maka Grup:

- menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada nilai tercatatnya ketika pengendalian hilang;
- menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan nonpengendali pada entitas anak terdahulu pada tanggal hilangnya pengendalian;
- mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
- mengakui setiap sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian;
- mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi yang dapat diatribusikan pada pemilik Perusahaan.

c. Transaksi dengan pihak berelasi

Grup mempunyai transaksi dengan pihak berelasi. Definisi pihak berelasi yang digunakan sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, yang terlampir dalam surat keputusan No.KEP-347/BL/2012. Pihak-pihak yang dipertimbangkan sebagai pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporannya.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.7 tersebut, entitas berelasi dengan pemerintah merupakan entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham dari entitas. Sebelumnya, Grup dalam pengungkapannya menerapkan definisi pihak berelasi yang digunakan sesuai dengan PSAK 7 "Pihak Berelasi".

Personil manajemen kunci adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas entitas, secara langsung atau tidak langsung, termasuk direktur (baik eksekutif maupun bukan eksekutif) dari Grup. Status pihak berelasi diperluas sampai dengan manajemen kunci dari entitas anak sampai dengan tingkatan mereka mengarahkan operasi entitas anak dengan tingkat keterlibatan minimal dari manajemen Perusahaan.

d. Kombinasi bisnis

Kombinasi bisnis dicatat dengan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan diukur sebesar nilai wajarnya, yang merupakan agregat dari nilai wajar aset yang dialihkan, liabilitas yang diambil alih dan instrumen ekuitas yang diterbitkan sebagai pertukaran atas pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, kepentingan nonpengendali diukur pada nilai wajar atau pada proporsi kepemilikan nonpengendali atas aset neto teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Pilihan dasar pengukuran dibuat berdasarkan basis tiap transaksi. Biaya terkait akuisisi dicatat sebagai beban pada saat timbulnya. Aset dan liabilitas yang teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi diakui pada nilai wajar pada tanggal akuisisi.

Goodwill awalnya diukur pada harga perolehan, yang merupakan selisih lebih dari nilai agregat imbalan yang dialihkan dan nilai yang diakui oleh kepentingan nonpengendali dan nilai kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya, atas jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika nilai wajar dari jumlah neto aset yang diakuisisi melebihi nilai agregat imbalan yang dialihkan, Grup menilai kembali apakah semua aset yang diakuisisi dan liabilitas yang diambil alih sudah diidentifikasi dengan benar dan memeriksa prosedur yang digunakan untuk mengukur nilai yang harus diakui pada tanggal akuisisi. Jika hasil penilaian kembali tersebut masih menghasilkan selisih lebih atas nilai wajar dari aset neto diakuisisi atas nilai agregat imbalan yang dialihkan, maka keuntungan diakui pada laba atau rugi.

Saat penentuan imbalan dari kombinasi bisnis termasuk imbalan kontinjensi, imbalan kontinjensi ini diukur pada nilai wajar saat tanggal akuisisi. Imbalan kontinjensi diklasifikasikan sebagai ekuitas atau liabilitas keuangan. Jumlah yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan selanjutnya diukur kembali pada nilai wajar dimana perubahan pada nilai wajar tersebut diakui dalam laba rugi atau ketika penyesuaian dicatat diluar periode pengukuran. Perubahan pada nilai wajar imbalan kontinjensi yang memenuhi persyaratan sebagai penyesuaian periode pengukuran, disesuaikan secara retrospektif, dengan penyesuaian terkait terhadap *goodwill*. Penyesuaian periode pengukuran adalah penyesuaian yang timbul dari informasi tambahan yang didapat selama periode pengukuran, yang tidak boleh melebihi satu tahun dari tanggal akuisisi, tentang fakta dan kondisi yang ada pada saat tanggal akuisisi.

Dalam suatu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, pihak pengakuisisi mengukur kembali kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak diakuisisi pada nilai wajar tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan, jika ada, dalam laba rugi.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Kombinasi bisnis (lanjutan)

Berdasarkan PSAK 38 (Revisi 2012), "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali", pengalihan aset, liabilitas, saham dan instrumen kepemilikan lain antara entitas sepengendali tidak akan menghasilkan suatu laba atau rugi bagi Perusahaan atau entitas individual yang berada dalam grup yang sama. Oleh karena transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali tidak mengubah substansi ekonomi atas kepemilikan aset, liabilitas, saham atau instrumen kepemilikan lain yang dipertukarkan, aset atau liabilitas yang dialihkan harus dicatat berdasarkan nilai buku yang menggunakan metode penyatuan kepentingan (*pooling-of interest*). Dalam pelaksanaan metode penyatuan kepentingan, komponen-komponen laporan keuangan selama restrukturisasi terjadi disajikan seolah-olah restrukturisasi tersebut telah terjadi sejak awal periode penyajian paling awal. Selisih imbalan yang dibayar atau diterima dengan nilai buku historis terkait dengan nilai tercatat dari kepentingan yang diperoleh, setelah memperhitungkan dampak pajak penghasilan, diakui secara langsung di ekuitas dan disajikan sebagai "Tambahkan Modal Disetor" pada bagian ekuitas di laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pada saat penerapan awal PSAK 38 (Revisi 2012), seluruh saldo Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali direklasifikasikan ke akun "Tambahkan Modal Disetor" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

e. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas dan bank, dan semua deposito berjangka yang tidak dibatasi penggunaannya, yang jatuh tempo dalam tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan.

Deposito yang jatuh temponya lebih dari tiga bulan tetapi tidak lebih dari satu tahun disajikan sebagai "Aset Keuangan Lancar Lainnya" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

f. Penyertaan pada entitas asosiasi

Asosiasi adalah entitas dimana Grup (sebagai investor) memiliki pengaruh yang signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan terkait kebijakan keuangan dan operasional *investee*, tapi tidak termasuk kendali atau kendali bersama atas kebijakan operasional tersebut. Pertimbangan dalam menentukan pengaruh signifikan sama dengan pertimbangan saat menentukan pengendalian atas entitas anak.

Grup menghitung investasi pada entitas asosiasi dengan menggunakan metode ekuitas.

Berdasarkan metode ekuitas, investasi pada entitas asosiasi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Jumlah tercatat investasi disesuaikan untuk mengakui perubahan dalam bagian investor atas aset neto entitas asosiasi sejak tanggal akuisisi. Pada saat perolehan investasi, setiap selisih antara biaya perolehan investasi dengan bagian investor atas nilai wajar neto aset dan liabilitas teridentifikasi dari entitas asosiasi dicatat dengan cara sebagai berikut:

- a. *Goodwill* yang terkait dengan entitas asosiasi atau ventura bersama termasuk dalam nilai tercatat investasi dan tidak diperkenankan diamortisasi ataupun pengujian penurunan nilai secara individu.
- b. Setiap selisih lebih bagian investor atas nilai wajar neto aset dan liabilitas teridentifikasi dari entitas asosiasi terhadap biaya perolehan investasi dimasukkan sebagai penghasilan dalam menentukan bagian investor atas laba rugi entitas asosiasi pada periode investasi diperoleh.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Penyertaan pada entitas asosiasi (lanjutan)

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian mencerminkan bagian Grup atas hasil operasi entitas asosiasi. Setiap perubahan dalam penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi akan disajikan sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain. Selanjutnya, jika ada perubahan yang langsung diakui dalam ekuitas entitas asosiasi maka Grup mengakui bagiannya atas perubahan tersebut dalam laporan perubahan ekuitas konsolidasian. Laba dan rugi belum direalisasi yang berasal dari transaksi antara Grup dan entitas asosiasi dieliminasi sejumlah porsi kepemilikan atas entitas asosiasi.

Grup pada setiap akhir periode pelaporan menentukan apakah terdapat bukti obyektif bahwa penyertaan pada entitas asosiasi mengalami penurunan nilai. Apabila hal ini terjadi, Grup menghitung dan mengakui nilai penurunan sebagai selisih antara nilai investasi di entitas asosiasi yang dapat terpulihkan dan nilai tercatatnya.

Aset-aset ini termasuk dalam "Penyertaan Jangka Panjang" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Mata uang fungsional PT Citra Sari Makmur ("CSM") adalah Dolar Amerika Serikat ("Dolar A.S.") dan mata uang fungsional Telin Malaysia adalah Ringgit Malaysia ("RM"). Untuk tujuan pelaporan investasi tersebut menggunakan metode ekuitas, aset dan liabilitas kedua perusahaan ini pada tanggal laporan posisi keuangan masing-masing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut, sedangkan pendapatan dan beban dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs rata-rata selama periode tersebut. Selisih kurs akibat penjabaran diakui dan dilaporkan sebagai "Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan" pada bagian ekuitas di laporan posisi keuangan konsolidasian.

g. Piutang usaha dan piutang lain-lain

Piutang usaha dan piutang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, setelah dikurangi provisi atas penurunan nilai. Provisi penurunan nilai piutang dibentuk berdasarkan evaluasi manajemen terhadap tingkat ketertagihan saldo. Piutang dihapuskan dalam periode ketika piutang tersebut dipastikan tidak dapat ditagih.

h. Persediaan

Persediaan terdiri dari komponen yang kemudian dibebankan pada saat pemakaian. Komponen mewakili terminal telepon, kabel dan suku cadang lainnya. Persediaan juga termasuk kartu *Subscriber Identification Module* ("SIM"), pesawat telepon, *set top box*, modem *wireless broadband* dan vauzer Prabayar yang dibebankan pada saat dijual.

Biaya persediaan terdiri dari harga pembelian, bea masuk, pajak lainnya, transportasi, penanganan dan biaya lainnya yang langsung melekat pada akuisisinya. Persediaan diakui sebesar nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih. Nilai realisasi bersih adalah perkiraan harga jual dikurangi biaya untuk menjual.

Harga perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Jumlah penurunan nilai persediaan dibawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi bersih dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi bersih, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban umum dan administrasi pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Persediaan (lanjutan)

Provisi persediaan usang ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan setiap jenis persediaan pada masa depan.

i. Beban dibayar di muka

Beban dibayar di muka diamortisasi sesuai masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus

j. Aset tersedia untuk dijual

Aset (atau kelompok lepasan) diklasifikasikan sebagai aset tersedia untuk dijual ketika nilai tercatatnya akan dipulihkan terutama melalui transaksi penjualan daripada melalui pemakaian berlanjut dan penjualannya sangat mungkin terjadi. Aset ini dicatat pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual.

Aset yang memenuhi kriteria untuk diklasifikasikan sebagai aset tersedia untuk dijual direklasifikasi dari aset tetap dan penyusutan atas aset tersebut dihentikan.

k. Aset takberwujud

Aset takberwujud terutama terdiri dari piranti lunak. Aset takberwujud diakui jika kemungkinan besar Grup akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset takberwujud tersebut dan biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal.

Aset takberwujud dicatat berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan rugi penurunan nilai apabila ada jumlah terpulihkan. Aset takberwujud diamortisasi selama estimasi masa manfaatnya. Grup mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset takberwujud. Apabila nilai tercatat aset takberwujud melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali, maka nilai tercatat aset tersebut diturunkan menjadi sebesar estimasi jumlah terpulihkan.

Aset takberwujud, diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat aset takberwujud sebagai berikut:

	<u>Tahun</u>
Piranti Lunak	3-6
Lisensi	3-20
Aset takberwujud lainnya	1-30

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya ketika aset tersebut dilepaskan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasan aset tersebut. Selisih dalam laporan antara nilai tercatat aset dengan hasil neto yang diterima dari pelepasannya diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

l. Aset tetap

Aset tetap dinyatakan pada harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai.

Biaya perolehan aset tetap terdiri dari: (a) harga perolehan, (b) setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan, dan (c) estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap. Setiap bagian aset tetap yang memiliki harga perolehan cukup signifikan terhadap biaya perolehan seluruh aset tetap disusutkan secara terpisah.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

I. Aset tetap (lanjutan)

Aset tetap, kecuali tanah, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

	<u>Tahun</u>
Bangunan	15-40
Renovasi bangunan sewa	2-15
Peralatan sentral telepon	3-15
Peralatan telegraf, teleks dan komunikasi data	5-15
Peralatan dan instalasi transmisi	3-25
Satelit, stasiun bumi dan peralatannya	3-20
Jaringan kabel	5-25
Catu daya	3-20
Peralatan pengolahan data	3-20
Peralatan telekomunikasi lainnya	5
Peralatan kantor	2-5
Kendaraan	4-8
Aset <i>Customer Premises Equipment</i> ("CPE")	4-5
Peralatan lainnya	2-5

Biaya signifikan sehubungan dengan renovasi bangunan sewa dikapitalisasi dan disusutkan selama masa sewa.

Metode penyusutan, umur manfaat dan nilai residu dari suatu aset direviu paling tidak setiap akhir tahun buku dan disesuaikan jika diperlukan. Nilai residu dari aset adalah estimasi jumlah yang dapat diperoleh Grup dari pelepasan aset, setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan, ketika aset telah mencapai umur dan kondisi yang diharapkan pada akhir umur manfaatnya.

Aset tetap yang diperoleh dalam pertukaran dengan aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan non-moneter diukur pada nilai wajar kecuali, (i) transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial, atau (ii) nilai wajar aset yang diterima dan aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal.

Suku cadang utama dan suku cadang siap pakai yang diperkirakan dapat digunakan lebih dari 12 bulan dicatat sebagai bagian aset tetap.

Ketika aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka harga perolehan dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan posisi keuangan konsolidasian dan laba atau rugi yang timbul dari pelepasan atau penjualan aset tetap diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Piranti keras komputer tertentu tidak dapat dioperasikan tanpa ketersediaan piranti lunak komputer tertentu. Dalam kondisi tersebut, piranti lunak komputer dicatat sebagai bagian dari piranti keras komputer. Jika piranti lunak komputer berdiri sendiri dari piranti keras komputernya, piranti lunak komputer tersebut dicatat sebagai bagian dari aset takberwujud.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada saat terjadinya. Pemugaran dan penambahan yang signifikan dikapitalisasi.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

l. Aset tetap (lanjutan)

Aset dalam pembangunan diakui sebesar biaya perolehan hingga pembangunan selesai, yang kemudian direklasifikasi ke akun aset tetap yang terkait. Selama masa pembangunan hingga aset tetap siap untuk digunakan/dijual, biaya pinjaman, yang termasuk di dalamnya beban bunga dan selisih kurs yang timbul atas pinjaman yang diperoleh untuk membiayai pembangunan aset, dikapitalisasi secara proporsional terhadap rata-rata nilai akumulasi pengeluaran selama periode tersebut sepanjang aset tetap tersebut memenuhi definisi aset kualifikasi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan ketika pembangunan selesai dan aset tetap siap untuk digunakan.

m. Sewa

Dalam menentukan apakah suatu perjanjian merupakan perjanjian sewa atau perjanjian mengandung sewa, Grup melakukan evaluasi terhadap substansi perjanjian. Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi didasarkan pada substansi, bukan pada bentuk kontraknya. Aset sewa pembiayaan diakui hanya jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

Sewa pembiayaan diakui sebagai aset dan liabilitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar nilai wajar aset sewa atau jika lebih rendah, nilai kini pembayaran sewa minimum. Biaya langsung awal yang dikeluarkan Grup ditambahkan ke dalam jumlah yang diakui sebagai aset.

Pembayaran sewa minimum dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan liabilitas. Beban keuangan dialokasikan ke setiap periode selama masa sewa sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Sewa kontinjen dibebankan pada periode terjadinya.

Aset sewa pembiayaan disusutkan dengan metode yang sama dan berdasarkan masa manfaat sebagaimana diestimasi untuk aset tetap perolehan langsung. Akan tetapi, jika tidak terdapat kepastian yang memadai bahwa Grup akan memperoleh kepemilikan pada akhir masa sewa, aset sewa pembiayaan disusutkan penuh selama jangka waktu yang lebih pendek antara masa sewa dan umur manfaatnya.

Perjanjian sewa yang tidak memenuhi kriteria di atas, dicatat sebagai sewa operasi dimana pembayarannya diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

n. Beban tanggungan - hak atas tanah

Hak atas tanah termasuk biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali dicatat sebagai bagian dari aset tetap dan tidak diamortisasi. Biaya yang terjadi sehubungan dengan pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah ditangguhkan dan diamortisasi dengan metode garis lurus selama periode legal hak atas tanah atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

o. Utang usaha

Utang usaha adalah kewajiban membayar barang atau jasa yang telah diterima dalam kegiatan usaha normal dari pemasok. Utang usaha diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika pembayarannya jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang. Jika tidak, utang tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Utang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Pinjaman

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya-biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi, selisih antara penerimaan (dikurangi biaya transaksi) dan nilai pelunasan dicatat pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian selama periode pinjaman dengan menggunakan metode bunga efektif.

Biaya yang dibayar untuk memperoleh fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman sepanjang besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik. Dalam hal ini, biaya ditangguhkan sampai penarikan terjadi. Sepanjang tidak terdapat bukti bahwa besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik, biaya dikapitalisasi sebagai pembayaran di muka untuk jasa likuiditas dan diamortisasi selama periode fasilitas yang terkait.

q. Penjabaran valuta asing

Mata uang fungsional dan mata uang pembukuan Grup adalah Rupiah, kecuali Telekomunikasi Indonesia International Pte. Ltd., Hong Kong, Telekomunikasi Indonesia International Pte. Ltd., Singapura, Telekomunikasi Indonesia International Inc., USA dan Telekomunikasi Indonesia International S.A., Timor Leste yang menggunakan mata uang Dolar A.S, dan Telekomunikasi Indonesia International Pty. Ltd., Australia yang menggunakan mata uang Dolar Australia. Transaksi-transaksi dalam valuta asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas moneter dalam valuta asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs beli dan jual yang diterbitkan oleh *Reuters* pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian dengan rincian sebagai berikut:

	31 Maret 2017		31 Desember 2016	
	Beli	Jual	Beli	Jual
Dolar A.S ("US\$") 1	13.323	13.328	13.470	13.475
Dolar Australia ("AU\$") 1	10.187	10.192	9.721	9.726
Euro 1	14.246	14.257	14.170	14.181
Yen 1	119,08	119,15	115,01	115,10

Laba atau rugi selisih kurs yang timbul, baik yang telah maupun yang belum direalisasi, dikreditkan atau dibebankan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian periode berjalan, kecuali untuk selisih kurs yang timbul dari pinjaman selama pembangunan suatu aset tertentu yang memenuhi syarat untuk dikapitalisasi, dimana pinjaman dapat diatribusikan terhadap pembangunan aset tersebut (Catatan 2I).

r. Pengakuan pendapatan dan beban

i. Pendapatan telepon selular dan jaringan tetap nirkabel

Pendapatan dari jasa pasca bayar, yang terdiri dari pendapatan pemakaian dan biaya abonemen bulanan diakui sebagai berikut:

- Pendapatan pulsa dan pemakaian atas jasa nilai tambah diakui berdasarkan penggunaan pelanggan.
- Biaya abonemen bulanan diakui sebagai pendapatan pada saat pelanggan berlangganan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

r. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

i. Pendapatan telepon selular dan jaringan tetap nirkabel (lanjutan)

Pendapatan dari jasa prabayar, yang terdiri dari penjualan kartu perdana (yang berisi kartu SIM dan vauzer perdana) dan vauzer isi ulang diakui pertama kali sebagai pendapatan diterima di muka dan diakui sebagai pendapatan berdasarkan jumlah panggilan yang berhasil dilakukan dan pemakaian jasa nilai tambah oleh pelanggan atau pada saat sisa pulsa pada vauzer prabayar telah habis masa berlakunya.

ii. Pendapatan sambungan telepon tidak bergerak

Pendapatan dari pemakaian telepon diakui pada saat pelanggan memakai telepon tersebut. Biaya abonemen bulanan diakui sebagai pendapatan pada saat pelanggan berlangganan.

Penerimaan dari instalasi sambungan telepon tidak bergerak ditangguhkan dan diakui sebagai pendapatan dengan dasar metode garis lurus sepanjang taksiran jangka waktu hubungan dengan pelanggan. Berdasarkan reviu atas informasi historis dan tren pelanggan, Perusahaan menentukan taksiran jangka waktu hubungan dengan pelanggan adalah 18 tahun.

iii. Pendapatan interkoneksi

Pendapatan dari interkoneksi jaringan dengan penyelenggara telekomunikasi dalam negeri dan internasional diakui bulanan berdasarkan lalu lintas tercatat aktual untuk bulan tersebut. Pendapatan interkoneksi terdiri dari pendapatan yang berasal dari panggilan pelanggan operator lain kepada pelanggan Grup (*incoming*) serta panggilan antar pelanggan operator lain yang melalui jaringan Grup (*transit*).

iv. Pendapatan data, internet, dan jasa teknologi informatika

Pendapatan dari komunikasi data dan internet diakui berdasarkan pemakaian, yang diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian internet atau berdasarkan jumlah biaya tetap tergantung pengaturan dengan pelanggan.

Pendapatan dari penjualan, instalasi dan implementasi piranti lunak dan perangkat keras komputer, jasa pemasangan jaringan data komputer, dan instalasi diakui pada saat penyerahan barang kepada pelanggan atau instalasi perangkat.

Pendapatan dari jasa pengembangan piranti lunak komputer diakui berdasarkan metode persentase penyelesaian.

v. Pendapatan jaringan

Pendapatan dari jaringan terdiri dari pendapatan dari sewa sirkuit dan *transponder* satelit yang diakui pada periode saat jasa diberikan.

vi. Pendapatan lainnya

Pendapatan dari penjualan *handset* atau perangkat telekomunikasi lainnya diakui pada saat penyerahan kepada pelanggan.

Pendapatan sewa menara telekomunikasi diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa sesuai kesepakatan dengan pelanggan.

Pendapatan jasa lainnya diakui pada saat jasa diserahkan kepada pelanggan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

r. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

vii. *Multiple-element arrangements*

Ketika dua atau lebih barang dan jasa yang menghasilkan pendapatan dijual sebagai satu unit penjualan, tiap barang atau jasa yang telah dikaji sebagai unit akuntansi terpisah dicatat secara terpisah. Jumlah pendapatan dialokasikan secara terpisah pada tiap barang dan jasa teridentifikasi berdasarkan nilai wajar masing-masing barang dan jasa tersebut dan kriteria pengakuan pendapatan yang tepat diterapkan pada tiap barang dan jasa sebagaimana dijelaskan diatas.

viii. Hubungan keagenan

Pendapatan dalam hubungan keagenan dicatat sebesar jumlah tagihan bruto kepada pelanggan ketika Grup bertindak sebagai prinsipal dalam penjualan barang dan jasa. Pendapatan dicatat sebesar jumlah bersih yang diperoleh (jumlah yang dibayarkan oleh pelanggan dikurangi jumlah yang dibayarkan kepada pemasok) ketika secara substansi, Grup bertindak sebagai agen dan memperoleh komisi dari pemasok atas penjualan barang dan jasa.

ix. Program loyalitas pelanggan

Grup melaksanakan program loyalitas pelanggan dimana pelanggan dapat mengumpulkan poin penghargaan untuk setiap kelipatan tertentu pemakaian jasa telekomunikasi. Poin penghargaan dapat ditukarkan di masa depan dengan barang atau jasa secara gratis atau dengan potongan harga, sepanjang ketentuan program lainnya terpenuhi.

Imbalan yang diterima dialokasikan antara jasa telekomunikasi dan poin penghargaan yang diberikan, dimana imbalan yang dialokasikan ke poin penghargaan adalah sebesar nilai wajarnya. Nilai wajar poin penghargaan ditentukan dengan menggunakan data historis tingkat penukaran poin penghargaan dari program sejenis. Nilai wajar poin penghargaan yang diberikan ditanggihkan dan diakui sebagai pendapatan ketika poin penghargaan tersebut ditukar oleh pelanggan atau telah habis masa berlakunya.

x. Beban

Beban diakui pada saat terjadinya.

s. Imbalan kerja

i. Imbalan kerja jangka pendek

Seluruh imbalan kerja jangka pendek yang terdiri dari gaji dan imbalan terkait, tunjangan cuti, insentif, dan imbalan kerja jangka pendek lain diakui sebagai biaya yang tidak didiskonto saat karyawan telah memberikan jasa kepada Grup.

ii. Imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lain

Imbalan pasca kerja terdiri dari program pensiun imbalan pasti yang *funded* dan *unfunded*, program pensiun iuran pasti, imbalan pasca kerja lainnya, program imbalan kesehatan pasca kerja imbalan pasti, program imbalan kesehatan kerja iuran pasti, dan kewajiban berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

s. Imbalan kerja (lanjutan)

ii. Imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lain (lanjutan)

Imbalan kerja jangka panjang lain terdiri dari penghargaan masa kerja, cuti masa kerja, dan masa persiapan pensiun.

Perhitungan biaya terkait dengan program imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lain dilakukan oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*.

Kewajiban bersih Perusahaan berkaitan dengan imbalan pasti pensiun dan imbalan kesehatan pasca kerja dihitung sebesar nilai kini dari estimasi imbalan yang akan diperoleh karyawan di masa depan sehubungan dengan jasa di masa sekarang dan masa lalu, dikurangi dengan nilai wajar dari aset program. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar di masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah, yang didenominasi dalam mata uang dimana manfaat akan dibayarkan dan yang mempunyai jangka waktu sampai dengan jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban imbalan pasca kerja terkait. Obligasi pemerintah digunakan karena tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi.

Aset program adalah aset yang dimiliki oleh program pensiun imbalan pasti dan imbalan kesehatan pasca kerja serta polis asuransi yang memenuhi syarat. Aset ini diukur pada nilai wajar pada akhir periode pelaporan. Nilai wajar polis asuransi adalah jumlah yang sama dengan kewajiban yang terkait (dan dapat dikurangi jika jumlah yang dapat diterima dari polis asuransi tidak dapat diperoleh secara penuh).

Pengukuran kembali, terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, dampak batas atas aset (tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto) dan imbal hasil aset program (tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto) diakui pada ekuitas melalui penghasilan komprehensif lain di periode terjadinya. Pengukuran kembali tidak diklasifikasikan ke laba rugi di periode selanjutnya.

Biaya jasa lalu diakui di laba rugi pada tanggal yang lebih awal antara:

- ketika amandemen atau kurtailmen program terjadi; dan
- ketika Grup mengakui biaya restrukturisasi terkait

Bunga neto dihitung dengan mengalikan liabilitas (aset) imbalan pasti neto dengan tingkat diskonto.

Laba atau rugi kurtailmen diakui apabila terdapat komitmen untuk melakukan pengurangan jumlah karyawan dalam jumlah yang material yang ditanggung oleh suatu program atau apabila terdapat perubahan ketentuan-ketentuan pada suatu program imbalan pasti, dimana bagian yang material dari jasa yang diberikan karyawan pada masa depan tidak lagi memberikan imbalan, atau memberikan imbalan yang lebih rendah.

Laba atau rugi penyelesaian diakui apabila terdapat transaksi yang menghapuskan semua kewajiban hukum atau konstruktif atas sebagian atau seluruh imbalan dalam program manfaat pasti (selain pembayaran imbalan sesuai dengan ketentuan program dan termasuk dalam asumsi aktuarial).

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

s. Imbalan kerja (lanjutan)

ii. Imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lain (lanjutan)

Untuk program iuran pasti, Perusahaan membayar iuran secara rutin yang merupakan biaya berkala bersih untuk periode iuran tersebut dan dicatat sebagai bagian dari beban karyawan ketika terutang.

iii. Kompensasi berbasis saham

Perusahaan menjalankan program kompensasi berbasis saham dengan penyelesaian menggunakan ekuitas. Nilai wajar dari jasa karyawan yang dikompensasikan dengan saham Perusahaan diakui sebagai beban pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan mengkredit akun tambahan modal disetor pada tanggal pemberian kompensasi.

iv. Pensiun dini ("Pendi")

Beban Pendi diakui pada saat Grup berkomitmen untuk membayar pesangon Pendi yang timbul sehubungan dengan tawaran yang diajukan Grup agar karyawan mengundurkan diri secara sukarela. Grup dianggap berkomitmen untuk membayar pesangon Pendi jika, dan hanya jika, Grup telah memiliki rencana formal terinci yang tidak dapat dibatalkan.

t. Pajak penghasilan ("PPh")

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai penghasilan atau beban dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, kecuali pajak penghasilan tersebut sehubungan dengan transaksi atau kejadian yang diakui secara langsung di ekuitas dimana pajak penghasilannya diakui secara langsung di ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak kini dihitung sebesar jumlah yang diperkirakan dapat diperoleh atau dibayar dengan menggunakan tarif dan ketentuan pajak yang telah ditetapkan pada setiap tanggal pelaporan. Manajemen secara periodik mengevaluasi perlakuan pajak yang diterapkan dalam Surat Pemberitahuan ("SPT") Tahunan sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Grup mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada setiap tanggal pelaporan. Grup juga mengakui aset pajak tangguhan yang berasal dari manfaat pajak pada masa depan, seperti kompensasi rugi fiskal, jika kemungkinan realisasi manfaat tersebut di masa depan cukup besar (*probable*). Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diperkirakan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan direviu pada setiap tanggal neraca dan dikurangi apabila tidak lagi terdapat kemungkinan besar bahwa laba pajak yang memadai akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan saling hapus di laporan posisi keuangan konsolidasian, kecuali aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk entitas yang berbeda, sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

t. Pajak penghasilan (“PPH”) (lanjutan)

Perubahan terhadap liabilitas perpajakan dicatat pada saat diterimanya Surat Ketetapan Pajak (“SKP”) atau apabila dilakukan banding, ketika hasil banding sudah diputuskan. Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dengan SKP diakui sebagai pendapatan atau beban dalam laba rugi periode berjalan, kecuali jika diajukan upaya penyelesaian selanjutnya. Jumlah tambahan pokok pajak dan denda yang ditetapkan dengan SKP ditangguhkan pembebanannya sepanjang memenuhi kriteria pengakuan aset.

Peraturan perpajakan Indonesia mengatur beberapa jenis penghasilan dikenakan pajak yang bersifat final. Pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian. Mengacu pada revisi PSAK No. 46, pajak final tersebut tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK No. 46.

PPH final atas jasa konstruksi dan sewa disajikan sebagai bagian dari “Beban lain-lain”.

u. Instrumen Keuangan

Grup mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan. Aset dan liabilitas keuangan diakui pertama kali pada nilai wajar termasuk biaya transaksi. Aset dan liabilitas keuangan ini selanjutnya diukur pada nilai wajar atau biaya diamortisasi menggunakan metode bunga efektif sesuai dengan klasifikasinya.

i. Aset keuangan

Grup mengklasifikasikan aset keuangannya sebagai: (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang, (iii) aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo, atau (iv) aset keuangan tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian yang lazim) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Grup berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Aset keuangan Perusahaan termasuk kas dan setara kas, aset keuangan lancar lainnya, piutang usaha, piutang lain-lain dan aset keuangan tidak lancar lainnya.

a. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi adalah aset keuangan yang diperdagangkan. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diperdagangkan jika perolehannya ditujukan untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti adanya kecenderungan untuk mengambil keuntungan dalam jangka pendek. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar disajikan sebagai (beban)/penghasilan lain-lain pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dalam periode timbulnya keuntungan atau kerugian tersebut. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi terdiri dari aset derivatif opsi jual yang dicatat sebagai “Aset Keuangan Lancar Lainnya” didalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Tidak ada aset keuangan yang diklasifikasi sebagai Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi masing-masing pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Instrumen Keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

b. Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif.

Pinjaman yang diberikan dan piutang meliputi, antara lain, kas dan setara kas, aset keuangan lancar lainnya, piutang usaha, piutang lain-lain, dan aset keuangan tidak lancar lainnya (piutang usaha jangka panjang dan kas yang dibatasi penggunaannya).

Pinjaman yang diberikan dan piutang pada awalnya diakui pada nilai wajar termasuk biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya diamortisasi, menggunakan metode bunga efektif.

c. Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo

Investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta manajemen mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, kecuali:

a) investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan Grup sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;

b) investasi yang ditetapkan oleh Grup sebagai kelompok tersedia untuk dijual; dan

c) investasi yang memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.

Tidak ada aset keuangan yang diklasifikasi sebagai kelompok dimiliki hingga jatuh tempo masing-masing pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016.

d. Aset keuangan tersedia untuk dijual

Investasi dalam kelompok tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditujukan untuk dimiliki sampai periode yang tidak ditentukan, yang mana dapat dijual dalam rangka pemenuhan likuiditas atau perubahan suku bunga, valuta asing atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Aset keuangan tersedia untuk dijual terdiri dari surat berharga yang tersedia untuk dijual yang dicatat sebagai "Aset Keuangan Lancar Lainnya" di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Penyertaan pada efek yang tersedia untuk dijual (*available-for-sale*) dinyatakan sebesar nilai wajarnya. Laba atau rugi yang belum direalisasi atas efek yang tersedia untuk dijual tidak diakui sebagai pendapatan periode berjalan, dan dilaporkan sebagai komponen terpisah pada bagian ekuitas di laporan posisi keuangan konsolidasian hingga terealisasi. Laba atau rugi yang telah direalisasi atas efek yang tersedia untuk dijual dicatat pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dihitung berdasarkan metode identifikasi khusus.

ii. Liabilitas keuangan

Grup mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai (i) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi atau (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Instrumen keuangan (lanjutan)

ii. Liabilitas keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan Grup terdiri dari utang usaha, utang lain-lain, beban yang masih harus dibayar, pinjaman dan liabilitas lainnya. Pinjaman dan liabilitas lainnya termasuk utang bank jangka pendek, pinjaman penerusan, obligasi dan wesel bayar, utang bank dan utang sewa pembiayaan.

a. Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah liabilitas keuangan yang diperdagangkan. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diperdagangkan jika perolehannya ditujukan untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti adanya kecenderungan untuk mengambil keuntungan dalam jangka pendek.

Tidak ada liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diperdagangkan pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016.

b. Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diklasifikasikan dalam kategori ini dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi antara lain utang usaha, utang lain-lain, biaya yang masih harus dibayar, pinjaman dan liabilitas lainnya. Pinjaman termasuk utang bank jangka pendek, pinjaman penerusan, obligasi dan wesel bayar, utang bank jangka panjang dan utang sewa pembiayaan.

iii. Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapus dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan konsolidasian ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan. Hak saling hapus harus tidak kontinjen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan secara hukum terhadap seluruh keadaan sebagai berikut:

- a. situasi bisnis yang normal;
- b. peristiwa kegagalan; dan
- c. peristiwa kepailitan atau kebangkrutan dari Grup dan seluruh pihak lawan.

iv. Pengukuran nilai wajar instrumen keuangan

Nilai wajar adalah suatu jumlah dimana aset dapat ditukar, atau liabilitas dapat diselesaikan dengan transaksi yang dilakukan secara wajar.

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan dalam pasar aktif pada setiap tanggal pelaporan ditentukan berdasarkan referensi harga pasar kuotasian, tanpa dikurangi biaya transaksi.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Instrumen keuangan (lanjutan)

iv. Pengukuran nilai wajar instrumen keuangan

Untuk instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan dalam pasar aktif, nilai wajarnya ditentukan berdasarkan teknik penilaian yang sesuai. Teknik penilaian tersebut meliputi transaksi pasar wajar terkini, referensi kepada nilai wajar kini instrumen keuangan lainnya yang secara substansi adalah serupa dan analisis arus kas diskonto atau model penilaian lainnya.

Analisis nilai wajar instrumen keuangan dan rincian lebih lanjut mengenai penentuan nilai wajar diungkapkan dalam Catatan 37.

v. Penurunan nilai aset keuangan

Grup mendeteksi penurunan nilai aset keuangannya apabila terdapat bukti objektif adanya peristiwa merugikan ("*loss event*") yang menimbulkan pengaruh negatif terhadap arus kas masa depan dari suatu aset keuangan. Penurunan nilai tersebut diakui apabila *loss event* tersebut dapat diperkirakan secara andal telah terjadi. Kerugian yang diperkirakan akan timbul akibat dari peristiwa masa depan tidak boleh diakui, terlepas hal tersebut sangat mungkin terjadi.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya diamortisasi, Grup terlebih dahulu menilai apakah penurunan nilai terjadi secara individual untuk aset keuangan yang secara individu memang signifikan, atau secara gabungan apabila aset keuangan tersebut secara individu tidak signifikan. Jika Grup tidak menemukan bukti yang objektif atas penurunan nilai aset keuangan yang dinilai secara individu, terlepas apakah signifikan maupun tidak, aset keuangan tersebut dimasukkan dalam kelompok aset keuangan dengan karakteristik risiko kredit serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tidak diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Penurunan nilai aset keuangan yang diukur pada biaya diamortisasi diukur dari perbedaan antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan (diluar rugi kredit yang diperkirakan muncul di masa depan yang belum terjadi saat ini). Arus kas masa depan ini didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Nilai tercatat aset berkurang melalui penggunaan akun cadangan. Jumlah kerugian yang terjadi diakui pada laba rugi.

Untuk aset keuangan tersedia untuk dijual, pada setiap tanggal pelaporan Grup menilai apakah terdapat bukti objektif bahwa suatu investasi atau grup investasi mengalami penurunan nilai. Jika penurunan dalam nilai wajar atas aset keuangan tersedia untuk dijual telah diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan terdapat bukti objektif bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai, maka kerugian kumulatif yang sebelumnya telah diakui dalam pendapatan komprehensif lain diakui dalam laba rugi sebagai kerugian penurunan nilai. Jumlah kerugian kumulatif tersebut merupakan selisih antara biaya perolehan (setelah dikurangi pelunasan pokok dan amortisasi) dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui.

vi. Penghentian pengakuan instrumen keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau saat seluruh resiko dan manfaat dari aset keuangan tersebut ditransfer secara substansial kepada pihak lain.

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan saat kewajiban kontraktual untuk membayar dilepaskan, dibatalkan atau berakhir.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

v. Modal saham yang diperoleh kembali

Saham diperoleh kembali dicatat dengan menggunakan nilai perolehannya sebagai "Modal Saham yang Diperoleh Kembali" dan disajikan sebagai pengurang ekuitas pemegang saham. Harga pokok dari penjualan/pengalihan saham yang diperoleh kembali dicatat dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Modal saham diperoleh kembali yang dialihkan dalam bentuk kepemilikan saham karyawan dicatat sebesar nilai wajarnya. Selisih antara harga perolehan kembali dan harga jual kembali/nilai pengalihan saham dicatat sebagai "Tambahan Modal Disetor".

w. Dividen

Pembagian dividen kepada para pemegang saham Perusahaan diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian pada periode ketika dividen tersebut disetujui oleh para pemegang saham Perusahaan. Untuk dividen interim, Perusahaan mengakui sebagai liabilitas berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris.

x. Laba per saham dan laba per ADS

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar selama periode tersebut. Laba per ADS dihitung dengan mengalikan laba per saham dasar dengan 100, yaitu jumlah lembar saham per ADS.

Perusahaan tidak memiliki instrumen keuangan yang berpotensi ditulif.

y. Informasi segmen

Informasi segmen Grup disajikan menurut segmen operasi yang telah diidentifikasi. Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas; a) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama); b) hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional Grup misalnya Direksi untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan c) tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

z. Provisi

Provisi diakui ketika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinan penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi untuk kontrak yang memberatkan diakui ketika kontrak tersebut menjadi memberatkan sebesar mana yang lebih rendah antara biaya neto memenuhi kontrak dengan denda atau kompensasi yang dibayar jika tidak memenuhi kontrak.

aa. Penurunan nilai aset non-keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual. Jika tidak mungkin untuk mengestimasi jumlah terpulihkan aset individual, maka Grup menentukan jumlah terpulihkan dari Unit Penghasil Kas ("UPK") yang mana aset tercakup ("aset UPK").

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

aa. Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)

Jumlah terpulihkan dari suatu aset (baik aset individual maupun UPK) adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajarnya dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada jumlah terpulihkannya, maka aset tersebut dianggap mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan nilai menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Grup menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikator nilai wajar lain yang tersedia.

Rugi penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan dibebankan pada operasi berjalan dan disajikan sebagai bagian dari "Penyusutan dan Amortisasi" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya, untuk aset selain *goodwill*, mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka jumlah terpulihkan aset tersebut diestimasi. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya, untuk aset selain *goodwill*, dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat yang telah ditentukan, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada periode sebelumnya. Pemulihan rugi penurunan nilai diakui sebagai laba rugi.

Penurunan nilai *goodwill* diuji setiap tahun dan ketika terdapat keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai. Penurunan nilai untuk *goodwill* ditentukan dengan menilai jumlah terpulihkan dari UPK (atau kelompok UPK) yang mana *goodwill* tercakup. Jika nilai terpulihkan dari UPK lebih rendah dari nilai tercatatnya, maka rugi penurunan nilai diakui. Rugi penurunan nilai atas *goodwill* tidak dapat dipulihkan pada periode mendatang.

ab. Estimasi dan pertimbangan akuntansi yang penting

Estimasi dan pertimbangan terus dievaluasi dan didasarkan kepada pengalaman historis dan faktor-faktor lain, termasuk ekspektasi peristiwa masa depan yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada.

Grup membuat estimasi dan asumsi mengenai masa depan. Estimasi akuntansi yang dihasilkan, menurut definisi, jarang yang sama dengan hasil aktualnya. Estimasi dan asumsi yang secara signifikan berisiko menyebabkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas selama satu tahun laporan keuangan ke depan dipaparkan dibawah ini.

i. Imbalan pasca kerja

Nilai kini kewajiban imbalan pasca kerja tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya (penghasilan) pensiun neto mencakup tingkat diskonto. Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat liabilitas imbalan pasca kerja.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ab. Estimasi dan pertimbangan akuntansi yang penting (lanjutan)

i. Imbalan pasca kerja

Grup menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada akhir periode pelaporan. Tingkat diskonto tersebut adalah tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini dari estimasi arus kas keluar masa depan yang diharapkan untuk menyelesaikan kewajiban. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Grup mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang imbalan yang akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas yang terkait.

Jika terdapat peningkatan peringkat seperti pada obligasi pemerintah atau penurunan tingkat bunga sebagai hasil dari peningkatan kondisi ekonomi, maka akan terdapat dampak material terhadap tingkat diskonto yang digunakan dalam menentukan kewajiban pasca kerja.

Asumsi kunci kewajiban imbalan pasca kerja lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini. Informasi tambahan diungkapkan pada Catatan 29 dan 30.

ii. Umur manfaat aset

Grup mengestimasi umur manfaat aset tetap berdasarkan ekspektasi penggunaan aset oleh Grup dengan mempertimbangkan rencana strategi usaha, perkembangan teknologi di masa depan dan perilaku pasar. Estimasi umur manfaat aset tetap adalah berdasarkan pada penelaahan Grup secara kolektif terhadap praktik industri, evaluasi teknis internal dan pengalaman untuk aset yang sejenis.

Grup melakukan revaluasi atas estimasi umur manfaat sekurang-kurangnya setiap akhir periode pelaporan dan diperbarui jika ekspektasi berbeda dengan estimasi sebelumnya, yang dikarenakan adanya perubahan ekspektasi daya pakai aset akibat pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan hukum atau pembatasan lain atas penggunaan aset. Jumlah beban tercatat setiap tahun akan terpengaruh oleh perubahan atas faktor-faktor dan situasi tersebut. Perubahan estimasi umur manfaat aset tetap merupakan perubahan estimasi akuntansi dan diakui secara prospektif dalam laporan laba rugi pada periode perubahan dan periode mendatang.

Rincian atas sifat dan jumlah tercatat atas aset tetap diungkapkan pada Catatan 9.

iii. Provisi untuk penurunan nilai piutang

Grup mengevaluasi adanya bukti obyektif bahwa piutang usaha mengalami penurunan nilai pada tiap akhir periode pelaporan. Provisi atas penurunan nilai piutang usaha dihitung berdasarkan kondisi terkini dan tingkat ketertagihan historis piutang usaha. Provisi ini disesuaikan secara berkala untuk mencerminkan hasil aktual dan taksiran. Rincian atas sifat dan jumlah tercatat provisi penurunan nilai piutang diungkapkan pada Catatan 5.

iv. Pajak penghasilan

Pertimbangan signifikan diperlukan dalam menentukan provisi pajak penghasilan. Terdapat banyak transaksi dan perhitungan yang hasil pajak akhirnya tidak pasti. Grup mengakui liabilitas untuk area pemeriksaan pajak yang diantisipasi berdasarkan estimasi apakah tambahan pajak akan terutang. Jika hasil akhir pajak berbeda dengan jumlah yang sudah dicatat, selisihnya akan mempengaruhi aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan pada periode ditentukannya hasil pajak tersebut. Rincian atas sifat dan jumlah tercatat pajak penghasilan diungkapkan pada Catatan 26.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KAS DAN SETARA KAS

	Mata uang	31 Maret 2017		31 Desember 2016	
		Saldo		Saldo	
		Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah	Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Kas	Rp	-	41	-	10
Bank					
Pihak berelasi					
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")	Rp	-	867	-	1.897
	US\$	34	456	41	548
	JPY	6	1	6	1
	EUR	1	11	1	11
	HKD	1	1	1	1
	AUD	0	0	0	0
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")	Rp	-	716	-	581
	US\$	10	134	6	84
	EUR	5	72	5	68
	SGD	0	0	0	0
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")	Rp	-	115	-	95
	US\$	7	93	8	107
Lain-lain	Rp	-	10	-	22
	US\$	0	0	0	0
Sub-jumlah			<u>2.476</u>		<u>3.415</u>
Pihak ketiga					
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. ("HSBC")	US\$	12	156	13	176
	HKD	2	4	2	4
Standard Chartered Bank ("SCB")	Rp	-	0	-	0
	US\$	7	89	6	74
	SGD	1	10	5	43
PT Bank Permata Tbk ("Bank Permata")	Rp	-	13	-	14
	US\$	5	67	7	96
Development Bank of Singapore ("DBS")	Rp	-	84	-	101
	US\$	0	0	0	0
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Bank Muamalat")	Rp	-	78	-	6
	US\$	0	1	2	24
PT Bank CIM Niaga Tbk ("Bank CIMB Niaga")	Rp	-	80	-	37
	US\$	0	1	0	4
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp75 miliar)	Rp	-	115	-	114
	US\$	4	52	3	41
	SGD	0	0	0	0
	EUR	0	1	0	1
	AUD	0	0	1	12
	TWD	4	2	3	1
	MYR	0	0	0	0
	HKD	0	0	0	0
	MOP	3	4	0	1
Sub-jumlah			<u>757</u>		<u>749</u>
Jumlah bank			<u>3.234</u>		<u>4.164</u>
Deposito berjangka					
Pihak berelasi					
BRI	Rp	-	3.705	-	4.076
	US\$	42	561	47	632
BNI	Rp	-	8.784	-	4.043
	US\$	23	302	25	336
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("Bank BTN")	Rp	-	2.753	-	3.356
Bank Mandiri	Rp	-	2.041	-	1.552
	US\$	5	67	5	67
Sub-jumlah			<u>18.213</u>		<u>14.062</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

	Mata uang	31 Maret 2017		31 Desember 2016	
		Saldo		Saldo	
		Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah	Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Deposito berjangka (lanjutan)					
Pihak ketiga					
PT Bank CIMB Niaga Tbk ("Bank CIMB Niaga")	Rp	-	-	-	2.025
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk ("BJB")	Rp	-	2.385	-	2.020
PT Bank OCBC NISP Tbk ("OCBC NISP")	Rp	-	2.400	-	1.550
Bank Permata	US\$	10	133	10	134
PT Bank Mega Tbk ("Bank Mega")	Rp	-	1.146	-	1.492
	US\$	-	1.625	-	1.226
PT Bank UOB Indonesia ("UOB")	Rp	4	60	14	185
	US\$	-	846	-	1.345
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ("BTPN")	Rp	0	1	-	-
	US\$	-	2.311	-	461
SCB	US\$	13	173	-	-
	SGD	18	240	18	242
Bank Muamalat	Rp	11	101	15	139
Bank ANZ ("Bank ANZ")	Rp	-	109	-	305
PT Bank Bukopin Tbk ("Bank Bukopin")	Rp	-	-	-	200
PT Bank Central Asia ("Bank BCA")	Rp	-	336	-	148
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp75 miliar)	Rp	-	300	-	-
			45		59
Sub-jumlah			12.211		11.531
Jumlah deposito berjangka			30.424		25.593
Jumlah			33.699		29.767

Tingkat bunga deposito berjangka per tahun adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2017	31 Desember 2016
Rupiah	3,30%-9,75%	3,20%-10,00%
Mata uang asing	0,30%-2,00%	0,10%-2,00%

Pihak berelasi dimana Grup melakukan penempatan dananya merupakan bank milik negara. Grup menempatkan sebagian besar kas dan setara kasnya di bank-bank tersebut karena mereka memiliki jaringan cabang yang luas di Indonesia dan secara keuangan dianggap aman karena dimiliki oleh negara.

Lihat Catatan 31 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. ASET KEUANGAN LANCAR LAINNYA

	Mata uang	31 Maret 2017		31 Desember 2016	
		Saldo		Saldo	
		Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah	Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Deposito berjangka					
Pihak berelasi					
BNI	Rp	-	63	-	63
Pihak ketiga					
UOB	US\$	1	13	1	13
Jumlah deposito berjangka			76		76
Aset keuangan tersedia untuk dijual					
Pihak berelasi					
PT Bahana TCW Investment Management ("Bahana TCW")	Rp	-	569	-	559
PT Mandiri Manajemen Investasi	Rp	-	505	-	500
Badan Usaha Milik Negara ("BUMN")	US\$	-	-	4	55
Pemerintah	US\$	4	54	2	27
Sub-jumlah			1.128		1.141
Pihak ketiga	Rp	-	17	-	17
Jumlah aset keuangan tersedia untuk dijual			1.145		1.158
Rekening penampungan	Rp	-	112	-	112
	US\$	2	22	2	22
Lainnya	Rp	-	112	-	98
	AUD	1	7	0	5
Jumlah			1.474		1.471

Deposito berjangka yang jatuh temponya lebih dari tiga bulan tetapi tidak lebih dari satu tahun, dengan tingkat bunga per tahun sebagai berikut:

	31 Maret 2017	31 Desember 2016
Rupiah	5,75%-6,00%	5,75%-6,00%
Mata uang asing	0,58%-1,64%	0,58%-1,64%

Lihat Catatan 31 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PIUTANG USAHA

Piutang usaha sehubungan dengan jasa yang diberikan kepada pelanggan *retail* dan *non-retail*, dengan rincian sebagai berikut:

a. Berdasarkan pelanggan

(i) Pihak berelasi

	<u>31 Maret 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
BUMN	615	151
PT Indosat Tbk ("Indosat")	485	370
Indonusa	470	431
Lain-lain	403	348
Jumlah	1.973	1.300
Provisi penurunan nilai piutang	(318)	(406)
Jumlah bersih	<u>1.655</u>	<u>894</u>

(ii) Pihak ketiga

	<u>31 Maret 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Pelanggan individual dan bisnis	9.633	7.801
Penyelenggara jasa telekomunikasi internasional luar negeri	911	1.252
Jumlah	10.544	9.053
Provisi penurunan nilai piutang	(3.151)	(2.584)
Jumlah bersih	<u>7.393</u>	<u>6.469</u>

b. Berdasarkan umur

(i) Pihak berelasi

	<u>31 Maret 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Sampai dengan 3 bulan	1.259	690
3 sampai dengan 6 bulan	114	39
Lebih dari 6 bulan	600	571
Jumlah	1.973	1.300
Provisi penurunan nilai piutang	(318)	(406)
Jumlah bersih	<u>1.655</u>	<u>894</u>

(ii) Pihak ketiga

	<u>31 Maret 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Sampai dengan 3 bulan	7.960	5.566
3 sampai dengan 6 bulan	265	658
Lebih dari 6 bulan	2.319	2.829
Jumlah	10.544	9.053
Provisi penurunan nilai piutang	(3.151)	(2.584)
Jumlah bersih	<u>7.393</u>	<u>6.469</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PIUTANG USAHA (lanjutan)

b. Berdasarkan umur (lanjutan)

(iii) Umur total piutang usaha

	31 Maret 2017		31 Desember 2016	
	Sebelum provisi	Provisi penurunan nilai piutang	Sebelum provisi	Provisi penurunan nilai piutang
Belum jatuh tempo	6.037	194	4.535	177
Jatuh tempo hingga 3 bulan	3.182	291	1.721	401
Jatuh tempo lebih dari 3 bulan hingga 6 bulan	379	308	697	495
Jatuh tempo lebih dari 6 bulan	2.919	2.676	3.400	1.917
Jumlah	12.517	3.469	10.353	2.990

Grup telah membentuk provisi penurunan nilai piutang usaha berdasarkan tingkat penurunan nilai historis secara kolektif dan historis kredit para pelanggan secara individual. Grup tidak membedakan piutang usaha pihak berelasi dan piutang usaha pihak ketiga dalam menilai jumlah yang jatuh tempo. Pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016, nilai tercatat piutang usaha Grup yang telah jatuh tempo tetapi tidak diturunkan nilainya masing-masing sebesar Rp3.205 miliar dan Rp3.005 miliar. Manajemen telah menyimpulkan bahwa piutang usaha yang telah jatuh tempo tetapi tidak diturunkan nilainya, termasuk piutang usaha yang belum jatuh tempo dan juga tidak diturunkan nilainya, adalah terutang dari para pelanggan dengan tingkat ketertagihan yang baik dan diharapkan dapat terpulihkan.

c. Berdasarkan mata uang

(i) Pihak berelasi

	31 Maret 2017	31 Desember 2016
Rupiah	1.933	1.300
Dolar A.S.	40	0
Jumlah	1.973	1.300
Provisi penurunan nilai piutang	(318)	(406)
Jumlah bersih	1.655	894

(ii) Pihak ketiga

	31 Maret 2017	31 Desember 2016
Rupiah	9.282	7.565
Dolar A.S.	1.224	1.437
Dolar Australia	31	40
Lain-lain	7	11
Jumlah	10.544	9.053
Provisi penurunan nilai piutang	(3.151)	(2.584)
Jumlah bersih	7.393	6.469

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PIUTANG USAHA (lanjutan)

d. Mutasi provisi penurunan nilai piutang

	<u>31 Maret 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Saldo awal	2.990	3.048
Provisi diakui selama periode berjalan (Catatan 25)	479	743
Penghapusbukuan piutang	-	(801)
Saldo akhir	<u>3.469</u>	<u>2.990</u>

Penghapusbukuan piutang merupakan penghapusbukuan piutang usaha pihak berelasi dan pihak ketiga.

Manajemen berpendapat bahwa saldo provisi atas penurunan nilai piutang usaha cukup untuk menutup kerugian atas tidak tertagihnya piutang.

Pada tanggal 31 Maret 2017, piutang usaha tertentu entitas anak sebesar Rp4.422 miliar telah dijamin dalam beberapa perjanjian pinjaman (Catatan 15, 16b dan 16c).

Lihat Catatan 31 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

6. PERSEDIAAN

	<u>31 Maret 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Komponen	332	299
Kartu SIM dan vaucer Prabayar	158	168
Lain-lain	170	164
Jumlah	<u>660</u>	<u>631</u>
Provisi atas persediaan usang		
Komponen	(18)	(18)
Kartu SIM dan vaucer Prabayar	(29)	(29)
Lain-lain	0	0
Jumlah	<u>(47)</u>	<u>(47)</u>
Jumlah bersih	<u>613</u>	<u>584</u>

Mutasi provisi atas persediaan usang adalah sebagai berikut:

	<u>31 Maret 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Saldo awal	47	41
Provisi diakui selama periode berjalan	-	11
Penghapusbukuan persediaan	-	(5)
Saldo akhir	<u>47</u>	<u>47</u>

Persediaan yang diakui sebagai beban dan termasuk dalam beban usaha-operasi, pemeliharaan, dan jasa telekomunikasi pada 31 Maret 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp581 miliar dan Rp478 miliar (Catatan 24).

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. PERSEDIAAN (lanjutan)

Manajemen berpendapat bahwa saldo provisi atas persediaan usang cukup untuk menutup kerugian akibat dari penurunan nilai persediaan karena usang.

Persediaan tertentu entitas anak sebesar Rp256 miliar telah dijaminakan dalam beberapa perjanjian pinjaman (Catatan 15, 16b dan 16c).

Pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016, modul dan komponen yang dimiliki oleh Grup telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian, dan risiko lain dengan nilai buku masing-masing sebesar Rp196 miliar dan Rp199 miliar. Modul dicatat sebagai bagian dari aset tetap. Total nilai pertanggungan pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing adalah sebesar Rp220 miliar.

Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas persediaan yang muncul dari risiko yang ditanggung.

7. UANG MUKA DAN BEBAN DIBAYAR DI MUKA

	<u>31 Maret 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Izin penggunaan frekuensi (Catatan 34c.i dan 34c.ii)	2.195	3.056
Sewa dibayar di muka	1.899	1.234
Uang muka	434	394
Gaji	358	229
Panjar kerja	72	32
Lain-lain	710	301
Jumlah	<u>5.668</u>	<u>5.246</u>

Lihat Catatan 31 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

8. PENYERTAAN JANGKA PANJANG

	<u>31 Maret 2017</u>						
	<u>Persentase kepemilikan</u>	<u>Saldo awal</u>	<u>Penambahan (pengurangan)</u>	<u>Bagian (rugi) laba bersih entitas asosiasi</u>	<u>Dividen</u>	<u>Bagian penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi</u>	<u>Saldo akhir</u>
Penyertaan jangka panjang pada entitas asosiasi:							
Tiphone ^a	24,43	1.488	-	20	-	-	1.508
Indonusa ^b	20,00	221	-	-	-	-	221
Teltranet ^c	51,00	38	-	(3)	-	-	35
PT Integrasi Logistik Cipta Solusi ("ILCS") ^e	49,00	42	-	0	-	-	42
Telin Malaysia ^f	49,00	0	-	0	-	-	0
CSM ^g	25,00	-	-	-	-	-	-
Sub-jumlah		<u>1.789</u>	<u>-</u>	<u>17</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.806</u>
Penyertaan jangka panjang lainnya		<u>58</u>	<u>1</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>59</u>
Jumlah penyertaan jangka panjang		<u>1.847</u>	<u>1</u>	<u>17</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.865</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. PENYERTAAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

Ringkasan informasi keuangan investasi Grup yang diperhitungkan dengan menggunakan metode ekuitas untuk tahun 2017:

	Tiphone*	Indonusa*	Teltranet	ILCS	Telin Malaysia	CSM*
<i>Laporan posisi keuangan</i>						
Aset lancar	7.709	170	66	141	24	161
Aset tidak lancar	743	444	90	20	14	761
Liabilitas jangka pendek	(1.248)	(532)	(84)	(74)	(66)	(594)
Liabilitas jangka panjang	(3.762)	(405)	(3)	(1)	-	(1.206)
Ekuitas (defisit)	3.442	(323)	69	86	(28)	(878)
<i>Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya</i>						
Pendapatan	27.310	605	30	18	23	131
Beban operasional	(26.445)	(583)	(37)	(17)	(29)	(221)
Penghasilan (beban) lain-lain termasuk biaya pendanaan - bersih	(231)	(17)	-	-	-	(88)
Laba (rugi) sebelum pajak	634	5	(7)	1	(6)	(178)
Beban pajak penghasilan	(166)	(33)	2	0	-	-
Laba (rugi) periode berjalan	468	(28)	(5)	1	(6)	(178)
Penghasilan (beban) komprehensif lain	(5)	7	-	-	-	-
Jumlah laba komprehensif periode berjalan	463	(21)	(5)	1	(6)	(178)

*Menggunakan informasi keuangan tanggal 31 Desember 2016 dan periode yang berakhir pada tanggal tersebut.

	31 Desember 2016						
	Persentase kepemilikan	Saldo awal	Penambahan (pengurangan)	Bagian (rugi) laba bersih entitas asosiasi	Dividen	Bagian penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi	Saldo akhir
Penyertaan jangka panjang pada entitas asosiasi:							
Tiphone ^a	24,43	1.404	-	108	(23)	(1)	1.488
Indonusa ^b	20,00	221	-	-	-	-	221
Teltranet ^c	51,00	71	-	(33)	-	-	38
PT Melon Indonesia ("Melon") ^d	51,00	50	(67)	17	-	-	-
PT Integrasi Logistik Cipta Solusi ("ILCS") ^e	49,00	40	-	2	-	-	42
Telin Malaysia ^f	49,00	6	-	(6)	-	-	0
CSM ^g	25,00	-	-	-	-	-	-
Sub-jumlah		1.792	(67)	88	(23)	(1)	1.789
Penyertaan jangka panjang lainnya		15	43	-	-	-	58
Jumlah penyertaan jangka panjang		1.807	(24)	88	(23)	(1)	1.847

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. PENYERTAAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

Ringkasan informasi keuangan investasi Grup yang diperhitungkan dengan menggunakan metode ekuitas untuk tahun 2016:

	Tiphone	Indonusa	Teltranet	ILCS	Telin Malaysia	CSM
<i>Laporan posisi keuangan</i>						
Aset lancar	7.709	170	66	131	9	161
Aset tidak lancar	743	444	88	29	10	761
Liabilitas jangka pendek	(1.248)	(532)	(78)	(73)	(35)	(594)
Liabilitas jangka panjang	(3.762)	(405)	(2)	(1)	(6)	(1.206)
Ekuitas (defisit)	3.442	(323)	74	86	(22)	(878)
<i>Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya</i>						
Pendapatan	27.310	605	66	116	8	131
Beban operasional	(26.445)	(583)	(149)	(112)	(43)	(221)
Penghasilan (beban) lain-lain termasuk biaya pendanaan-bersih	(231)	(17)	(3)	0	-	(88)
Laba (rugi) sebelum pajak	634	5	(86)	4	(35)	(178)
Beban pajak penghasilan	(166)	(33)	21	0	-	-
Laba (rugi) tahun berjalan	468	(28)	(65)	4	(35)	(178)
Penghasilan (beban) komprehensif lain	(5)	7	(0)	(0)	-	-
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	463	(21)	(65)	4	(35)	(178)

^a Tiphone berdiri pada 25 Juni 2008 dengan nama Tiphone Mobile Indonesia Tbk. Tiphone bergerak di bidang perdagangan perangkat telekomunikasi berupa telepon seluler berikut suku cadang, aksesoris, pulsa serta jasa perbaikan dan penyediaan konten melalui anak perusahaan. Pada tanggal 18 September 2014, Perusahaan melalui PINS melakukan pembelian 25% saham kepemilikan di Tiphone senilai Rp1.395 miliar.

Nilai wajar penyertaan pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing adalah sebesar Rp1.693 miliar dan Rp1.500 miliar. Nilai wajar dihitung dengan mengalikan jumlah lembar saham dengan harga pasar pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp965 dan Rp855 per lembar saham.

Rekonsiliasi informasi keuangan dan nilai tercatat penyertaan jangka panjang pada Tiphone pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

	2016
Aset	8.599
Liabilitas	(5.157)
Aset bersih	3.442
Bagian grup atas aset bersih (24.43% pada tahun 2016)	841
Goodwill	647
Nilai tercatat penyertaan jangka panjang	1.488

^b Indonusa sebelumnya adalah anak perusahaan. Pada tahun 2013 Perusahaan menjual 80% kepemilikan sahamnya. Pada tanggal 14 Mei 2014, berdasarkan Surat Sirkuler Pemegang Saham Indonusa yang tercakup dalam akta notaris No. 57 tanggal 23 April 2014 oleh FX Budi Santoso Isbandi, S.H., yang disetujui oleh Menkumham dalam Surat No. AHU-02078.40.20.2014 tanggal 29 April 2014, pemegang saham Indonusa menyetujui atas peningkatan jumlah saham yang diterbitkan dan dibayar penuh sejumlah Rp80 miliar. Perusahaan telah menggunakan haknya atas saham yang diterbitkan dan melakukan pengalihan ke Metra sehingga kepemilikan Metra atas Indonusa meningkat menjadi 4,33%.

^c Investasi pada Teltranet dicatat dengan metode ekuitas berdasarkan perjanjian antara Metra dengan Telstra Holding Singapore Pte. Ltd. pada tanggal 29 Agustus 2014. Teltranet bergerak dalam bidang jasa sistem komunikasi. Metra tidak memiliki pengendalian dalam menentukan kebijakan keuangan dan operasi dari Teltranet.

^d Melon sebelumnya adalah entitas asosiasi. Pada tahun 2016, Perusahaan melalui Metranet membeli 49% saham Melon, sehingga menjadi anak perusahaan terkonsolidasi (Catatan 1d).

^e ILCS bergerak dalam bidang penyelenggaraan jasa layanan *E-trade logistic* dan jasa terkait lainnya.

^f Telin Malaysia bergerak di jasa telekomunikasi di Malaysia. Bagian kumulatif Telin Malaysia yang tidak diakui hingga tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp2 miliar.

^g CSM bergerak dalam bidang penyediaan Sistem Komunikasi Stasiun Bumi Mikro ("*Very Small Aperture Terminal*" atau "VSAT"), jasa aplikasi jaringan, dan jasa konsultasi mengenai teknologi telekomunikasi dan sarana lain yang terkait. Bagian kumulatif rugi CSM yang tidak diakui hingga tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp219 miliar.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. ASET TETAP

	1 Januari 2017	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi/ Translasi	31 Maret 2017
Harga perolehan:					
Aset tetap pemilikan langsung					
Tanah	1.417	8	-	-	1.425
Bangunan	7.837	7	-	(9)	7.835
Renovasi bangunan sewa	1.116	-	(11)	21	1.126
Peralatan sentral telepon	20.490	21	(68)	113	20.556
Peralatan telegraf, teleks dan komunikasi data	1.586	-	-	(21)	1.565
Peralatan dan instalasi transmisi	121.552	472	(553)	2.850	124.321
Satelit, stasiun bumi dan peralatannya	8.445	23	-	50	8.518
Jaringan kabel	44.791	625	(100)	110	45.426
Catu daya	15.022	15	(139)	368	15.266
Peralatan pengolahan data	12.515	91	(108)	167	12.665
Peralatan telekomunikasi lainnya	700	-	-	(11)	689
Peralatan kantor	1.453	29	(5)	(98)	1.379
Kendaraan	387	1	(2)	6	392
Peralatan lainnya	100	-	-	-	100
Aset dalam pembangunan	4.550	4.709	(3)	(3.973)	5.283
Aset sewa pembiayaan					
Peralatan dan instalasi transmisi	5.354	65	-	-	5.419
Peralatan pengolahan data	84	-	-	-	84
Kendaraan	135	-	-	-	135
Peralatan kantor	76	-	-	-	76
Aset CPE	22	-	-	-	22
Catu daya	215	-	-	-	215
Aset PBH	252	-	-	-	252
Jumlah	<u>248.099</u>	<u>6.066</u>	<u>(989)</u>	<u>(427)</u>	<u>252.749</u>

	1 Januari 2017	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi/ Translasi	31 Maret 2017
Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai:					
Aset tetap pemilikan langsung					
Bangunan	2.435	77	-	(4)	2.508
Renovasi bangunan sewa	692	35	(9)	-	718
Peralatan sentral telepon	16.650	378	(66)	(1)	16.961
Peralatan telegraf, teleks dan komunikasi data	333	93	-	-	426
Peralatan dan instalasi transmisi	62.302	2.520	(500)	(40)	64.282
Satelit, stasiun bumi dan peralatannya	7.098	103	-	-	7.201
Jaringan kabel	20.301	443	(99)	(64)	20.581
Catu daya	10.164	304	(86)	(3)	10.379
Peralatan pengolahan data	9.468	296	(96)	-	9.668
Peralatan telekomunikasi lainnya	461	23	-	-	484
Peralatan kantor	846	46	(4)	(4)	884
Kendaraan	168	15	(2)	(2)	179
Peralatan lainnya	99	-	-	-	99
Aset sewa pembiayaan					
Peralatan dan instalasi transmisi	2.054	141	-	-	2.195
Peralatan pengolahan data	44	7	-	-	51
Kendaraan	32	6	-	-	38
Peralatan kantor	94	10	-	-	104
Aset CPE	19	1	-	-	20
Catu daya	98	6	-	-	104
Aset PBH	243	3	-	-	246
Jumlah	<u>133.601</u>	<u>4.507</u>	<u>(862)</u>	<u>(118)</u>	<u>137.128</u>
Nilai buku bersih	<u>114.498</u>				<u>115.621</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. ASET TETAP (lanjutan)

	1 Januari 2016	Akuisisi	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi/ Translasi	31 Desember 2016
Harga perolehan:						
Aset tetap pemilikan langsung						
Tanah	1.270	89	59	(1)	-	1.417
Bangunan	6.033	10	311	(3)	1.486	7.837
Renovasi bangunan sewa	1.036	-	13	(37)	104	1.116
Peralatan sentral telepon	19.823	-	218	(160)	609	20.490
Peralatan telegraf, teleks dan komunikasi data	876	-	751	(41)	-	1.586
Peralatan dan instalasi transmisi	119.047	-	2.603	(11.319)	11.221	121.552
Satelit, stasiun bumi dan peralatannya	8.146	-	80	-	219	8.445
Jaringan kabel	37.887	-	6.746	(302)	460	44.791
Catu daya	13.822	-	161	(77)	1.116	15.022
Peralatan pengolahan data	11.351	12	318	(82)	916	12.515
Peralatan telekomunikasi lainnya	632	-	73	-	(5)	700
Peralatan kantor	1.062	5	139	(12)	259	1.453
Kendaraan	475	-	60	(147)	(1)	387
Peralatan lainnya	99	-	1	-	-	100
Aset dalam pembangunan	4.580	-	17.169	-	(17.199)	4.550
Aset sewa pembiayaan						
Peralatan dan instalasi transmisi	5.940	-	229	(815)	-	5.354
Peralatan pengolahan data	63	-	77	(56)	-	84
Kendaraan	94	-	63	(22)	-	135
Peralatan kantor	73	-	3	-	-	76
Aset CPE	22	-	-	-	-	22
Catu daya	90	-	125	-	-	215
Aset PBH	252	-	-	-	-	252
Jumlah	<u>232.673</u>	<u>116</u>	<u>29.199</u>	<u>(13.074)</u>	<u>(815)</u>	<u>248.099</u>

	1 Januari 2016	Akuisisi	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi/ Translasi	31 Desember 2016
Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai:						
Aset tetap pemilikan langsung						
Bangunan	2.141	-	290	(2)	6	2.435
Renovasi bangunan sewa	623	-	106	(37)	-	692
Peralatan sentral telepon	15.223	-	1.588	(160)	(1)	16.650
Peralatan telegraf, teleks dan komunikasi data	4	-	329	-	-	333
Peralatan dan instalasi transmisi	63.063	-	9.957	(10.686)	(32)	62.302
Satelit, stasiun bumi dan peralatannya	6.706	-	415	-	(23)	7.098
Jaringan kabel	19.524	-	1.534	(302)	(455)	20.301
Catu daya	9.114	-	1.145	(70)	(25)	10.164
Peralatan pengolahan data	8.503	-	1.067	(62)	(40)	9.468
Peralatan telekomunikasi lainnya	385	-	77	-	(1)	461
Peralatan kantor	713	-	141	(11)	3	846
Kendaraan	166	-	69	(66)	(1)	168
Peralatan lainnya	99	-	-	-	-	99
Aset sewa pembiayaan						
Peralatan dan instalasi transmisi	2.327	-	542	(815)	-	2.054
Peralatan pengolahan data	53	-	47	(56)	-	44
Kendaraan	13	-	19	-	-	32
Peralatan kantor	51	-	43	-	-	94
Aset CPE	17	-	2	-	-	19
Catu daya	18	-	80	-	-	98
Aset PBH	230	-	13	-	-	243
Jumlah	<u>128.973</u>	<u>-</u>	<u>17.464</u>	<u>(12.267)</u>	<u>(569)</u>	<u>133.601</u>
Nilai buku bersih	<u>103.700</u>					<u>114.498</u>

a. Laba dari pelepasan atau penjualan aset tetap

	2017	2016
Hasil penjualan aset tetap	333	104
Nilai buku bersih	(140)	(0)
Laba dari pelepasan atau penjualan aset tetap	<u>193</u>	<u>104</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. ASET TETAP (lanjutan)

b. Penurunan nilai aset

Pada tahun 2014, Grup telah memutuskan untuk menghentikan bisnis sambungan nirkabel tidak bergerak paling lambat 14 Desember 2015. Perusahaan menghitung jumlah terpulihkan adalah sebesar Rp549 miliar dan menentukan bahwa kelompok aset dalam UPK sambungan nirkabel tidak bergerak mengalami penurunan nilai lebih lanjut sebesar Rp805 miliar. Jumlah terpulihkan ditentukan berdasarkan perhitungan nilai pakai yang menggunakan proyeksi arus kas dari anggaran keuangan terkini yang telah disetujui manajemen. Proyeksi arus kas ini mencakup arus kas yang akan diperoleh selama sisa periode layanan dan proyeksi arus kas neto yang akan diterima dari pelepasan kelompok aset dalam UPK sambungan nirkabel tidak bergerak pada akhir periode layanan. Proyeksi arus kas bersih dari pelepasan kelompok aset dihitung dengan menggunakan metode pendekatan biaya disesuaikan dengan faktor keusangan fisik, teknologi dan ekonomis. Manajemen menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak sebesar 13,5% yang berasal dari perhitungan rata-rata tertimbang biaya modal Perusahaan setelah pajak dan diperbandingkan dengan data eksternal yang tersedia. Disamping itu, manajemen juga menggunakan asumsi tingkat keusangan teknologi dan ekonomis sebesar 30% berdasarkan data internal perusahaan, yang disebabkan kurang tersedianya data pasar sebanding karena sifat dari kelompok aset tersebut. Perhitungan nilai pakai paling terpengaruh terhadap asumsi tingkat keusangan teknologi dan ekonomis. Kenaikan tingkat keusangan teknologi dan ekonomis menjadi 40% akan menyebabkan tambahan penurunan nilai sebesar Rp70 miliar.

Rugi penurunan nilai diakui sebagai bagian dari “Penyusutan dan Amortisasi” dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Sehubungan dengan restrukturisasi unit bisnis jaringan telekomunikasi nirkabel tetap (Catatan 34c.ii), Perusahaan melakukan percepatan pencatatan penyusutan aset bisnis sambungan nirkabel. Pada tanggal 31 Desember 2015, nilai aset bisnis sambungan nirkabel telah disusutkan secara penuh.

Pada tahun 2016, Perusahaan menghapusbukkan aset bisnis sambungan nirkabel dengan harga perolehan dan akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp5.203 miliar.

Manajemen berpendapat bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai aset dari UPK lainnya pada tanggal 31 Desember 2016.

c. Lain-lain

- (i) Bunga pinjaman yang dikapitalisasi ke aset dalam pembangunan masing-masing sejumlah Rp196 miliar dan Rp229 miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dan 2016. Tarif kapitalisasi yang digunakan untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang layak dikapitalisasi adalah berkisar antara 2,50% - 11% dan 1,63% - 11,00% masing-masing untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dan 2016.
- (ii) Tidak ada rugi selisih kurs yang dikapitalisasi ke aset dalam pembangunan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
- (iii) Pada tanggal 31 Maret 2017 dan 2016, Grup telah menerima klaim asuransi atas aset tetap yang hilang dan rusak masing-masing sebesar Rp79 miliar dan Rp12 miliar dan dicatat sebagai bagian dari “Penghasilan Lain-Lain” dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Pada tanggal 31 Maret 2017 dan 2016, nilai tercatat aset tetap tersebut masing-masing sebesar Rp19 miliar dan Rp5 miliar, telah dibebankan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. ASET TETAP (lanjutan)

c. Lain-lain (lanjutan)

- (iv) Pada tahun 2017, Telkomsel memutuskan untuk mengganti peralatan tertentu dengan nilai tercatat bersih sebesar Rp464 miliar, sebagai bagian dari program modernisasi. Oleh karena itu, Telkomsel melakukan percepatan pencatatan penyusutan peralatan tersebut. Dampak penambahan beban penyusutan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebesar Rp134 miliar.

Pada tahun 2015, Telkomsel memutuskan untuk mengganti peralatan tertentu dengan nilai tercatat bersih sebesar Rp1.967 miliar, sebagai bagian dari program modernisasi. Oleh karena itu, Telkomsel melakukan percepatan pencatatan penyusutan peralatan tersebut. Dampak penambahan beban penyusutan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebesar Rp30 miliar.

Pada tahun 2014, umur manfaat bangunan dan transmisi Telkomsel diubah masing-masing dari 20 tahun menjadi 40 tahun, dan dari 10 tahun menjadi 15 dan 20 tahun agar mencerminkan umur ekonomis bangunan dan transmisi pada saat ini. Dampak pengurangan beban penyusutan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebesar Rp50 miliar. Dampak perubahan estimasi masa manfaat bangunan dan transmisi tersebut pada periode mendatang adalah meningkatkan laba sebelum pajak sebagai berikut:

<u>Tahun</u>	<u>Jumlah</u>
2017 (9 bulan)	149
2018	135

- (v) Pertukaran aset tetap

Pada tahun 2012 dan 2011, Perusahaan mengadakan perjanjian Pengadaan dan Instalasi Modernisasi Jaringan Kabel Tembaga Melalui Optimalisasi Aset Jaringan Kabel Tembaga dengan Pola *Trade In/Trade Off* masing-masing dengan PT Len Industri ("LEN") dan PT Industri Telekomunikasi Indonesia ("INTI").

Pada tahun 2017 dan 2016, Perusahaan telah menghapusbukkan aset jaringan tembaga dengan nilai catat bersih masing-masing sebesar Rp822 juta dan Rp3 miliar dan telah mencatat aset jaringan *fiber optic* hasil pertukaran aset dengan nilai masing-masing sebesar Rp1.000 miliar dan Rp801 miliar.

Sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016, peralatan Telkomsel dengan nilai tercatat bersih masing-masing sebesar Rp46 miliar dan Rp636 miliar ditukarkan dengan peralatan Ericsson AB dan PT Huawei Tech Investment ("Huawei"). Pada tanggal 31 Maret 2017, peralatan Telkomsel dengan nilai tercatat bersih Rp29 miliar akan ditukarkan dengan peralatan dari Ericsson AB dan Huawei, dan oleh karenanya peralatan tersebut direklasifikasi sebagai aset tersedia untuk dijual pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

- (vi) Grup memiliki beberapa bidang tanah yang terletak di berbagai daerah di Indonesia dengan status Hak Guna Bangunan ("HGB") berjangka waktu 10-45 tahun yang akan habis masa berlakunya antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2053. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak akan terdapat kesulitan untuk memperpanjang hak atas tanah pada saat berakhirnya hak tersebut.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. ASET TETAP (lanjutan)

c. Lain-lain (lanjutan)

- (vii) Pada tanggal 31 Maret 2017, aset tetap milik Grup kecuali tanah, dengan nilai tercatat bersih sebesar Rp105.337 miliar telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian, gempa bumi dan risiko lainnya, termasuk gangguan bisnis, dengan jumlah keseluruhan pertanggungan sebesar Rp10.385 miliar, US\$1.236 juta, HKD3 juta dan SGD194 juta. Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.
- (viii) Pada tanggal 31 Maret 2017, tingkat persentase penyelesaian aset dalam pembangunan adalah sekitar 53,42% dari nilai kontrak dengan perkiraan tanggal penyelesaian antara April 2017 sampai dengan Maret 2018. Saldo aset dalam pembangunan tersebut terutama terdiri dari bangunan, peralatan dan instalasi transmisi, jaringan kabel dan catu daya. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat hambatan yang dapat mempengaruhi penyelesaian aset dalam pembangunan.
- (ix) Seluruh aset yang dimiliki Perusahaan telah dijaminkan dalam perjanjian obligasi (Catatan 16b.i dan 16b.ii). Aset tetap entitas anak tertentu dengan biaya perolehan sebesar Rp11.386 miliar telah dijaminkan dalam beberapa perjanjian pinjaman (Catatan 15 dan 16).
- (x) Pada tanggal 31 Maret 2017, jumlah tercatat bruto dari setiap aset tetap Grup yang telah disusutkan secara penuh dan masih digunakan adalah sebesar Rp66.198 miliar. Grup saat ini sedang melakukan modernisasi aset jaringan untuk menggantikan aset tetap yang sudah disusutkan secara penuh.
- (xi) Pada tahun 2016, nilai wajar tanah dan bangunan Grup, yang ditentukan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak ("NJOP") tanah dan bangunan yang bersangkutan adalah sebesar Rp28.521 miliar.
- (xii) Telkomsel menandatangani perjanjian dengan perusahaan penyedia menara lainnya untuk penyewaan ruangan di menara telekomunikasi (slot) dan lokasi menara dengan jangka waktu selama 10 tahun. Perusahaan dan Telkomsel dapat memperpanjang periode sewa berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Disamping itu, Grup juga memiliki komitmen berkaitan dengan sewa pembiayaan untuk peralatan dan instalasi transmisi, peralatan pengolahan data, peralatan kantor, kendaraan, dan aset CPE dengan hak opsi untuk membeli aset-aset pembiayaan tertentu pada akhir masa sewa pembiayaan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. ASET TETAP (lanjutan)

c. Lain-lain (lanjutan)

Pembayaran sewa pembiayaan minimum di masa depan untuk aset sewa pembiayaan adalah sebagai berikut:

Tahun	31 Maret 2017	31 Desember 2016
2017	992	987
2018	693	892
2019	818	816
2020	787	771
2021	755	740
Selanjutnya	957	954
Jumlah pembayaran minimum sewa pembiayaan	5.002	5.160
Bunga	(1.080)	(1.150)
Nilai kini bersih atas pembayaran minimum sewa pembiayaan	3.922	4.010
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun (Catatan 15b)	(672)	(658)
Bagian jangka panjang (Catatan 16)	3.250	3.352

Rincian saldo kewajiban sewa guna usaha pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016, adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2017	31 Desember 2016
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	1.420	1.465
PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	1.252	1.295
PT Solusi Tunas Pratama	234	241
PT Putra Arga Binangun	211	217
PT Bali Towerindo Sentra	109	112
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp75 miliar)	696	680
Jumlah	3.922	4.010

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. UANG MUKA DAN ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

Uang muka dan aset tidak lancar lainnya pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016 terdiri dari:

	<u>31 Maret 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Uang muka pembelian aset tetap	5.742	5.432
Sewa dibayar di muka - setelah dikurangi bagian jangka pendek (Catatan 7)	2.583	2.471
Pajak dibayar dimuka (Catatan 26)	1.338	1.228
Klaim restitusi pajak jangka panjang - setelah dikurangi bagian jangka pendek (Catatan 26)	1.278	1.428
Beban tangguhan	446	387
Izin penggunaan frekuensi - setelah dikurangi bagian jangka pendek (Catatan 7)	298	320
Setoran jaminan	149	144
Kas yang dibatasi penggunaannya	93	31
Piutang usaha jangka panjang - setelah dikurangi bagian jangka pendek	20	35
Lain-lain	40	32
Jumlah	<u>11.987</u>	<u>11.508</u>

Sewa dibayar di muka mencerminkan sewa atas perjanjian sewa jaringan dan peralatan telekomunikasi serta sewa tanah dan bangunan oleh Perusahaan dan beberapa entitas anak dengan jangka waktu berkisar antara 1 sampai dengan 40 tahun.

Pada tanggal 31 Maret 2017 dan 2016, beban tangguhan mencerminkan Hak Penggunaan yang Tidak Dapat Dibatalkan (*Indefeasible Right of Use* atau "IRU"). Jumlah beban amortisasi pada tanggal 31 Maret 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp12 miliar.

Lihat Catatan 31 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. ASET TAKBERWUJUD

Rincian aset takberwujud adalah sebagai berikut:

	<i>Goodwill</i>	Piranti lunak	Lisensi	Aset takberwujud lainnya	Jumlah
Nilai tercatat bruto:					
Saldo, 1 Januari 2017	449	7.222	75	607	8.353
Penambahan	-	191	2	20	213
Pengurangan	(3)	-	-	-	(3)
Reklasifikasi/translasi	2	(6)	-	3	(1)
Akuisisi					
Saldo, 31 Maret 2017	448	7.407	77	630	8.562
Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai:					
Saldo, 1 Januari 2017	(29)	(4.776)	(56)	(403)	(5.264)
Beban amortisasi	-	(170)	(88)	(8)	(266)
Pengurangan					
Reklasifikasi/translasi	-	7	-	(1)	6
Saldo, 31 Maret 2017	(29)	(4.939)	(144)	(412)	(5.524)
Nilai buku bersih	419	2.468	(67)	218	3.038

	<i>Goodwill</i>	Piranti lunak	Lisensi	Aset takberwujud lainnya	Jumlah
Nilai tercatat bruto:					
Saldo, 1 Januari 2016	336	6.267	68	580	7.251
Penambahan	-	925	9	27	961
Pengurangan	-	-	(2)	-	(2)
Reklasifikasi/translasi	(4)	20	-	-	16
Akuisisi	117	10	-	-	127
Saldo, 31 Desember 2016	449	7.222	75	607	8.353
Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai:					
Saldo, 1 Januari 2016	(29)	(3.748)	(49)	(369)	(4.195)
Beban amortisasi	-	(1.027)	(7)	(34)	(1.068)
Pengurangan	-	-	-	-	-
Reklasifikasi/translasi	-	(1)	-	-	(1)
Saldo, 31 Desember 2016	(29)	(4.776)	(56)	(403)	(5.264)
Nilai buku bersih	420	2.446	19	204	3.089

- (i) *Goodwill* timbul dari akuisisi Sigma (2008), Admedika (2010), *data center* BDM (2012), Contact Centres Australia Pty.Ltd. (2014), MNDG (2015) dan Melon (2016) (Catatan 1d). Selain itu, terdapat akuisisi 80% kepemilikan saham PT Griya Silkindo Drajatmoerni ("GSDm") oleh NSI.
- (ii) Beban amortisasi diakui sebagai bagian dari "Penyusutan dan Amortisasi" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Sisa periode amortisasi dari aset tak berwujud piranti lunak adalah 1-5 tahun.
- (iii) Pada tanggal 31 Maret 2017, jumlah tercatat bruto dari aset takberwujud yang telah diamortisasi seluruhnya dan masih digunakan adalah sebesar Rp2.927 miliar.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. UTANG USAHA

	<u>31 Maret 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Pihak berelasi		
Pembelian peralatan, barang dan jasa	1.158	1.223
Utang kepada penyelenggara telekomunikasi lainnya	333	324
Sub-jumlah	<u>1.491</u>	<u>1.547</u>
Pihak ketiga		
Pembelian peralatan, barang dan jasa	7.977	9.434
Beban pemakaian frekuensi radio, beban hak penyelenggaraan dan Kewajiban Pelayanan Universal	1.510	1.256
Utang kepada penyelenggara telekomunikasi lainnya	1.420	1.281
Sub-jumlah	<u>10.907</u>	<u>11.971</u>
Jumlah	<u>12.398</u>	<u>13.518</u>

Utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	<u>31 Maret 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Rupiah	11.006	11.270
Dolar A.S.	1.340	2.196
Lain-lain	52	52
Jumlah	<u>12.398</u>	<u>13.518</u>

Lihat Catatan 31 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

13. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

	<u>31 Maret 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi	7.602	6.165
Gaji dan tunjangan	2.998	2.993
Umum, administrasi dan pemasaran	1.774	1.914
Beban bunga dan administrasi bank	193	211
Jumlah	<u>12.567</u>	<u>11.283</u>

Lihat Catatan 31 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

14. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA

a. Pendapatan diterima di muka jangka pendek

	<u>31 Maret 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Kartu pulsa Prabayar	4.300	4.959
Sewa menara telekomunikasi	183	199
Jasa telekomunikasi lainnya	326	189
Lain-lain	268	216
Jumlah	<u>5.077</u>	<u>5.563</u>

b. Pendapatan diterima di muka jangka panjang

	<u>31 Maret 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Jasa telekomunikasi lainnya	208	256
Hak penggunaan yang tidak dapat dibatalkan	276	169
Jumlah	<u>484</u>	<u>425</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM SATU TAHUN

a. Utang bank jangka pendek

Kreditur	Mata uang	31 Maret 2017		31 Desember 2016	
		Saldo terutang		Saldo terutang	
		Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah	Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Pihak berelasi					
BNI	Rp	-	133	-	143
Sub-jumlah			133		143
Pihak ketiga					
UOB	Rp	-	500	-	269
Bank CIMB Niaga	Rp	-	145	-	143
PT Bank DBS Indonesia	Rp	-	22	-	95
SCB	Rp	-	-	-	90
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk ("Danamon")	Rp	-	60	-	60
Lain-lain	Rp	-	54	-	111
Sub-jumlah			781		768
Jumlah			914		911

Beberapa informasi lain yang signifikan terkait utang bank jangka pendek pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebagai berikut:

	Peminjam	Mata uang	Total fasilitas (dalam miliaran)	Jatuh tempo fasilitas pinjaman	Periode pembayaran bunga	Tingkat bunga per tahun	Jaminan
UOB							
22 November 2013	Infomedia	Rp	200	22 November 2017	Bulanan	11,5%-12%	Piutang usaha (Catatan 5)
20 Desember 2016	Finnnet	Rp	300	21 Desember 2018	Bulanan	1 bulan JIBOR+2,25%	Tidak ada
Bank CIMB Niaga							
28 April 2013 ^a	GSD	Rp	85	1 Januari 2018 ^c	Bulanan	10,9%-11,5%	Aset tetap (Catatan 9) dan piutang usaha (Catatan 5)
BNI							
31 Oktober 2016	Telkom Infra	Rp	44	31 Oktober 2017	Bulanan	1 bulan JIBOR+3,35%	Piutang usaha (Catatan 5)
31 Desember 2016	Telkom Infra	Rp	101	30 November 2017	Bulanan	1 Bulan JIBOR+3,35%	Piutang usaha (Catatan 5)
PT. Bank DBS Indonesia							
12 April 2016	Sigma ^b	USD	0,02	31 Juli 2017	Semesteran	3,25% (USD) / 10,75% (IDR)	Piutang usaha (Catatan 5)
Danamon							
15 Desember 2016	Infomedia	Rp	60	15 Desember 2017	Bulanan	11%-12%	Piutang usaha (Catatan 5)

Fasilitas utang bank yang diperoleh entitas anak tersebut digunakan untuk keperluan modal kerja.

^a Berdasarkan amandemen terakhir tanggal 11 November 2014.

^b Fasilitas dalam mata uang USD. Penarikan dapat dilakukan dalam mata uang USD dan IDR.

^c Perpanjangan otomatis bila belum dilunasi.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM SATU TAHUN (lanjutan)

b. Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun

	Catatan	31 Maret 2017	31 Desember 2016
Pinjaman penerusan (<i>two-step loans</i>)	16a	227	225
Obligasi dan wesel bayar	16b	-	1
Utang bank	16c	3.651	3.637
Utang sewa pembiayaan	9c.xii	672	658
Jumlah		4.550	4.521

16. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA

	Catatan	31 Maret 2017	31 Desember 2016
Pinjaman penerusan (<i>two-step loans</i>)	16a	1.055	1.067
Obligasi dan wesel bayar	16b	9.322	9.322
Utang bank	16c	11.995	11.929
Pinjaman lainnya	16d	697	697
Utang sewa pembiayaan	9c.xii	3.250	3.352
Jumlah		26.319	26.367

Pembayaran pokok utang yang dijadwalkan pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebagai berikut:

	Catatan	Jumlah	Tahun				Selanjutnya
			2018	2019	2020	2021	
Pinjaman penerusan (<i>two-step loans</i>)	16a	1.055	172	185	185	169	344
Obligasi dan wesel bayar	16b	9.322	-	220	2.115	-	6.987
Utang bank	16c	11.995	3.984	2.350	2.401	1.292	1.968
Pinjaman lainnya	16d	697	53	107	107	107	323
Utang sewa pembiayaan	9c.xii	3.250	494	605	626	649	876
Jumlah		26.319	4.703	3.467	5.434	2.217	10.498

a. Pinjaman penerusan (*two-step loans*)

Pinjaman penerusan (*two-step loans*) adalah pinjaman tanpa jaminan yang diperoleh Pemerintah yang kemudian diteruskan kepada Perusahaan. Pinjaman yang diperoleh hingga bulan Juli 1994 dicatat dan terutang dalam Rupiah berdasarkan kurs pada tanggal penarikan pinjaman. Pinjaman yang diperoleh setelah bulan Juli 1994 terutang dalam mata uang asalnya dan keuntungan atau kerugian selisih kurs yang terjadi ditanggung oleh Perusahaan.

Kreditur	Mata uang	31 Maret 2017		31 Desember 2016	
		Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah	Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Bank luar negeri	Yen	6.143	732	6.143	707
	US\$	20	263	22	295
	Rp	-	287	-	290
Jumlah			1.282		1.292
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun (Catatan 15b)			(227)		(225)
Bagian jangka panjang			1.055		1.067

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)

a. Pinjaman penerusan (*two-step loans*) (lanjutan)

Kreditur	Mata uang	Periode jadwal pembayaran	Pembayaran bunga	Tingkat bunga per tahun
Bank luar negeri	Yen	Semesteran	Semesteran	2,95%
	US\$	Semesteran	Semesteran	3,85%
	Rp	Semesteran	Semesteran	8,25%

Pinjaman tersebut ditujukan untuk membiayai pengembangan infrastruktur dan sarana penunjang telekomunikasi. Pinjaman ini akan dilunasi dalam angsuran semesteran dan jatuh tempo pada berbagai tanggal sampai dengan tahun 2024.

Sejak 2008, perusahaan telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman penerusan dan periode penarikan pinjaman penerusan tersebut telah berakhir.

Perusahaan diharuskan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio *projected net revenue to projected debt service* harus melebihi 1,2:1 untuk pinjaman penerusan yang berasal dari Bank Pembangunan Asia ("ADB").
- Pendanaan dari sumber internal (laba sebelum penyusutan dan biaya pendanaan) harus melebihi 20% dari rata-rata jumlah pengeluaran barang modal tahunan untuk pinjaman penerusan yang berasal dari ADB.

Pada tanggal 31 Maret 2017, Perusahaan memenuhi ketentuan mengenai rasio-rasio tersebut di atas.

b. Obligasi dan wesel bayar

Obligasi dan wesel bayar	Mata uang	31 Maret 2017		31 Desember 2016	
		Saldo terutang		Saldo terutang	
		Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah	Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Obligasi					
Tahun 2010					
Seri B	Rp	-	1.995	-	1.995
Tahun 2015					
Seri A	Rp	-	2.200	-	2.200
Seri B	Rp	-	2.100	-	2.100
Seri C	Rp	-	1.200	-	1.200
Seri D	Rp	-	1.500	-	1.500
Wesel bayar jangka menengah (<i>Medium Term Notes</i> atau "MTN")					
GSD					
Seri A	Rp	-	220	-	220
Seri B	Rp	-	120	-	120
Promes					
PT ZTE Indonesia ("ZTE")	US\$	-	-	0	1
Jumlah			9.335	0	9.336
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi			(13)		(13)
Jumlah			9.322		9.323
Bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun (Catatan 15b)			-		(1)
Bagian jangka panjang			9.322		9.322

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)

b. Obligasi dan wesel bayar (lanjutan)

i. Obligasi

Tahun 2010

<u>Obligasi</u>	<u>Pokok utang</u>	<u>Penerbit</u>	<u>Tempat pencatatan</u>	<u>Tanggal terbit</u>	<u>Jatuh tempo</u>	<u>Periode pembayaran bunga</u>	<u>Tingkat bunga per tahun</u>
Seri B	1.995	Perusahaan	BEI	25 Juni 2010	6 Juli 2020	Kuartalan	10,20%

Obligasi tersebut dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari (Catatan 9c.ix). Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi ini adalah PT Bahana Sekuritas ("Bahana"), PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas. Sedangkan bertindak sebagai Wali Amanat adalah Bank CIMB Niaga.

Perusahaan menerima hasil penerbitan obligasi ini pada tanggal 6 Juli 2010.

Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk membiayai belanja modal yang meliputi: *wave broadband* (pita lebar, *softswitching*, datakom, teknologi informasi dan lainnya), infrastruktur (*backbone*, *metro network*, *regional metro junction*, *internet protocol*, dan *system satelit*) dan optimasi legacy dan fasilitas penunjang (*fixed wireline* dan *wireless*).

Pada tanggal 31 Maret 2017, peringkat obligasi Perusahaan yang diberikan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) adalah idAAA (*stable outlook*).

Berdasarkan perjanjian perwaliamanatan, Perusahaan dipersyaratkan untuk menaati semua pembatasan, termasuk mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

1. *Debt to equity* tidak lebih dari 2:1.
2. EBITDA terhadap beban bunga tidak kurang dari 5:1.
3. *Debt service coverage* minimal sebesar 125%.

Pada tanggal 31 Maret 2017, Perusahaan memenuhi ketentuan mengenai rasio-rasio tersebut di atas.

Tahun 2015

<u>Obligasi</u>	<u>Pokok utang</u>	<u>Penerbit</u>	<u>Tempat pencatatan</u>	<u>Tanggal terbit</u>	<u>Jatuh tempo</u>	<u>Periode pembayaran bunga</u>	<u>Tingkat bunga per tahun</u>
Seri A	2.200	Perusahaan	BEI	23 Juni 2015	23 Juni 2022	Kuartalan	9,93%
Seri B	2.100	Perusahaan	BEI	23 Juni 2015	23 Juni 2025	Kuartalan	10,25%
Seri C	1.200	Perusahaan	BEI	23 Juni 2015	23 Juni 2030	Kuartalan	10,60%
Seri D	1.500	Perusahaan	BEI	23 Juni 2015	23 Juni 2045	Kuartalan	11,00%
Total	7.000						

Obligasi tersebut dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari (Catatan 9c.ix). Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi ini adalah Bahana, PT Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas. Sedangkan bertindak sebagai Wali Amanat adalah Bank Permata.

Perusahaan menerima hasil penerbitan obligasi ini pada tanggal 23 Juni 2015.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)

b. Obligasi dan wesel bayar (lanjutan)

i. Obligasi (lanjutan)

Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk pengembangan usaha: *Broadband, Backbone, Metro & RMJ* serta *IT App & Support* dan akuisisi beberapa perusahaan baik dalam lingkup domestik maupun internasional.

Pada tanggal 31 Maret 2017, peringkat obligasi Perusahaan yang diberikan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) adalah idAAA (*stable outlook*).

Berdasarkan perjanjian perwaliamanatan, Perusahaan dipersyaratkan untuk menaati semua pembatasan, termasuk mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

1. *Debt to equity* tidak lebih dari 2:1.
2. EBITDA terhadap beban bunga tidak kurang dari 4:1.
3. *Debt service coverage* minimal sebesar 125%.

Pada tanggal 31 Maret 2017, Perusahaan memenuhi ketentuan mengenai rasio-rasio tersebut di atas.

ii. MTN

GSD

<u>Wesel bayar</u>	<u>Mata uang</u>	<u>Pokok utang</u>	<u>Tanggal terbit</u>	<u>Jatuh tempo</u>	<u>Periode pembayaran bunga</u>	<u>Tingkat bunga per tahun</u>
Seri A	Rp	220	14 November 2014	14 November 2019	Semesteran	11%
Seri B	Rp	120	6 Maret 2015	6 Maret 2020	Semesteran	11%
Total		340				

Berdasarkan Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau dan Agen Jaminan *Medium Term Notes* (MTN) PT Graha Sarana Duta Tahun 2014 yang dinyatakan dalam akta Notaris No. 30 tanggal 13 Nopember 2014 oleh Arry Supratno, S.H., GSD akan menerbitkan MTN dengan keseluruhan nilai pokok MTN yaitu sebanyak-banyaknya sebesar Rp500 miliar yang diterbitkan secara berseri.

Bertindak sebagai *Arranger* atas MTN adalah PT Mandiri Sekuritas, Bank Mandiri sebagai Agen Pemantau dan Agen Jaminan, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") bertindak sebagai Agen Pembayaran dan Jasa Penitipan Kolektif (Kustodian). Dana yang diperoleh dari MTN tersebut digunakan untuk proyek investasi.

GSD memberikan jaminan berupa piutang usaha lancar, persediaan, tanah dan bangunan sehubungan dengan pengembangan investasi yang dibiayai oleh penerbitan MTN ini, baik yang telah dimiliki dan/atau akan dimiliki oleh GSD (Catatan 5,6, dan 9c.ix).

Berdasarkan perjanjian, GSD dipersyaratkan menaati seluruh perjanjian dan pembatasan termasuk mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

1. *Debt to equity* tidak lebih dari 6,5:1.
2. EBITDA terhadap beban bunga tidak kurang dari 1,2:1.
3. *Current ratio* minimal 120%.
4. *Leverage ratio* maksimal 450%.

Pada tanggal 31 Maret 2017, GSD memenuhi ketentuan mengenai rasio-rasio tersebut di atas.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)

b. Obligasi dan wesel bayar (lanjutan)

ii. Promes

Pemasok	Mata uang	Pokok utang* (dalam miliaran)	Tanggal perjanjian	Tanggal pembayaran	Periode pembayaran bunga	Tingkat bunga per tahun
ZTE	US\$	0,1	20 Agustus 2009 ^b	4 Februari 2017	Semesteran	6 bulan LIBOR+1,5%

*Disajikan dalam mata uang asal

^bBerdasarkan amandemen terakhir tanggal 15 Agustus 2011 dan telah dilunasi pada tanggal 4 Februari 2017.

Promes yang dikeluarkan Perusahaan kepada ZTE dan PT Huawei tersebut merupakan fasilitas pembiayaan pemasok tanpa jaminan untuk pembayaran 85% dari nilai berita acara serah terima proyek-proyek dengan ZTE dan PT Huawei.

c. Utang bank

Kreditur	Mata uang	31 Maret 2017		31 Desember 2016	
		Saldo terutang		Saldo terutang	
		Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah	Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Pihak berelasi					
BNI	Rp	-	3.501	-	3.222
BRI	Rp	-	1.747	-	1.871
Bank Mandiri	Rp	-	1.729	-	1.232
Sub-jumlah			6.977		6.325
Pihak ketiga					
Sindikasi bank	Rp	-	3.100	-	3.650
The Bank of Tokyo-Mitsubishi-UFJ, Ltd.	Rp	-	2.307	-	2.361
Bank CIMB Niaga	Rp	-	1.254	-	1.162
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	Rp	-	634	-	647
UOB	Rp	-	500	-	500
United Overseas Bank Limited ("UOB Singapore")	US\$	36	480	36	484
PT Bank ANZ Indonesia	Rp	-	240	-	240
Japan Bank for International Cooperation ("JBIC")	US\$	13	167	16	211
Lain-lain	Rp	-	34	-	37
Sub-jumlah			8.716		9.292
Jumlah			15.693		15.617
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi			(47)		(51)
			15.646		15.566
Utang bank yang akan jatuh tempo dalam satu tahun (Catatan 15b)			(3.651)		(3.637)
Bagian jangka panjang			11.995		11.929

Beberapa informasi lain yang signifikan terkait utang bank pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebagai berikut:

Peminjam	Mata uang	Total fasilitas* (dalam miliaran)	Pembayaran periode berjalan (dalam miliaran)	Jadwal pembayaran	Periode pembayaran bunga	Tingkat suku bunga per tahun	Jaminan
19 Desember 2012 (BNI, BRI and Bank Mandiri) ^a	Rp	2.500	300	Semesteran (2014-2020)	Kuartalan	3 bulan JIBOR+3,00%	Piutang usaha (Catatan 5) dan aset tetap (Catatan 9)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)

c. Utang bank (lanjutan)

	Peminjam	Mata uang	Total fasilitas* (dalam miliaran)	Pembayaran periode berjalan (dalam miliaran)	Jadwal pembayaran	Periode pembayaran bunga	Tingkat suku Bunga per tahun	Jaminan
Sindikasi bank								
13 Maret 2015 (BNI and BCA) ^{a&h}	Perusahaan	Rp	2.900	242	Semesteran (2016-2022)	Kuartalan	3 bulan JIBOR +2,50%	Seluruh aset
13 Maret 2015 (BNI and BCA) ^{a&h}	GSD	Rp	100	8	Semesteran (2016-2022)	Kuartalan	3 bulan JIBOR +2,50%	Seluruh aset
BNI								
13 Maret 2013 ^{a&c}	Sigma	Rp	1.400	19	Bulanan (2016-2020)	Bulanan	1 bulan JIBOR+3,00%	Piutang usaha (Catatan 5) dan aset tetap (Catatan 9)
20 November 2013	Perusahaan	Rp	1.500	-	Semesteran (2015-2018)	Kuartalan	3 bulan JIBOR+2,65%	Tidak ada
10 Januari 2014 ^{a&c}	Sigma	Rp	247	10	Bulanan (2016-2022)	Bulanan	1 bulan JIBOR+3,35%	Piutang usaha (Catatan 5) dan aset tetap (Catatan 9)
21 Juli 2014 ^a	Metra	Rp	40	7	Semesteran (2015-2017)	Bulanan	10,00%	Piutang usaha (Catatan 5) dan aset tetap (Catatan 9)
3 November 2014 ^{a&g}	Telkom Infratel	Rp	450	41	Kuartalan (2015-2018)	Bulanan	1 bulan JIBOR+3,35%	Piutang usaha (Catatan 5)
8 April 2015 ^a	Telkomsel	Rp	1.000	-	14 April 2018	Kuartalan	3 bulan JIBOR+1,95%	Tidak ada
10 Juni 2015 ^a	Metra	Rp	44	-	Semesteran (2015-2017)	Bulanan	10,00%	Piutang usaha (Catatan 5) dan aset tetap (Catatan 9)
12 Oktober 2015 ^a	Telkom Akses	Rp	1.400	28	Semesteran (2016-2019)	Kuartalan	3 bulan JIBOR+2,90%	Piutang usaha (Catatan 5), persediaan (Catatan 6) dan aset tetap (Catatan 9)
31 Oktober 2016	Telkom Infra	Rp	59	6	Kuartalan (2017-2019)	Bulanan	1 bulan JIBOR+3,35%	Piutang usaha (Catatan 5)
27 Juni 2013	NSI	Rp	4	0	Bulanan (2014-2023)	Bulanan	11%	Aset tetap (Catatan 9)
17 Maret 2014	NSI	Rp	0,7	0	Bulanan (2014-2023)	Bulanan	12,25%	Aset tetap (Catatan 9)
27 Juni 2014	NSI	Rp	2,5	0	Bulanan (2014-2023)	Bulanan	13,50%	Aset tetap (Catatan 9)
The Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ, Ltd.								
9 Oktober 2014	Dayamitra	Rp	600	40	Kuartalan (2016-2019)	Kuartalan	3 bulan JIBOR+2,40%	Piutang usaha (Catatan 5) dan aset tetap (Catatan 9)
13 Maret 2015 ^{a&h}	Metra	Rp	400	8	Kuartalan (2016-2020)	Kuartalan	3 bulan JIBOR+2,15%	Tidak ada

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)

c. Utang bank (lanjutan)

	<u>Peminjam</u>	<u>Mata uang</u>	<u>Total fasilitas* (dalam miliaran)</u>	<u>Pembayaran periode berjalan (dalam miliaran)</u>	<u>Jadwal pembayaran</u>	<u>Periode pembayaran bunga</u>	<u>Tingkat suku Bunga per tahun</u>	<u>Jaminan</u>	
The Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ, Ltd. (lanjutan)									
	13 Maret 2015 ^{a&h}	Infomedia	Rp	250	3	Kuartalan (2016-2020)	Kuartalan	3 bulan JIBOR+2,15%	Tidak ada
	8 April 2015 ^a	Telkomsel	Rp	1.000	-	14 April 2018	Kuartalan	3 bulan JIBOR+1,95%	Tidak ada
	2 November 2015	Dayamitra	Rp	400	-	Kuartalan (2017-2020)	Kuartalan	3 bulan JIBOR+2,60%	Piutang usaha (Catatan 5) dan aset tetap (Catatan 9)
	13 Maret 2015 ^{a&h}	Dayamitra	Rp	100	2	Kuartalan (2016-2020)	Kuartalan	3 bulan JIBOR+2,15%	Tidak ada
	3 Oktober 2016	Dayamitra	Rp	500	-	Semesteran (2019-2024)	Kuartalan	3 bulan JIBOR+2,25%	Aset tetap (Catatan 9)
BRI									
	20 Juli 2011 ^a	Dayamitra	Rp	1.000	120	Semesteran (2013-2017)	Kuartalan	3 bulan JIBOR+1,40% dan 3 bulan JIBOR+3,50%	Aset tetap (Catatan 9)
	30 Oktober 2013	GSD	Rp	70	3	Bulanan (2014-2021)	Bulanan	10,00%	Piutang usaha (Catatan 5), aset tetap (Catatan 9) dan kontrak sewa
	30 Oktober 2013	GSD	Rp	34	1	Bulanan (2014-2021)	Bulanan	10,00%	Piutang usaha (Catatan 5), aset tetap (Catatan 9) dan kontrak sewa
	20 November 2013	Perusahaan	Rp	1.500	-	Semesteran (2015-2018)	Kuartalan	3 bulan JIBOR+2,65%	Tidak ada
	18 Desember 2015	Dayamitra	Rp	800	-	Semesteran (2017-2020)	Kuartalan	3 bulan JIBOR+2,70%	Aset tetap (Catatan 9)
Bank Mandiri									
	20 November 2013	Perusahaan	Rp	1.500	-	Semesteran (2015-2018)	Kuartalan	3 bulan JIBOR+2,65%	Tidak ada
	11 Agustus 2014	Graha Yasa Selaras	Rp	71	1	Bulanan (2016-2021)	Bulanan	3 bulan JIBOR+3,25%	Aset tetap (Catatan 9)
	11 Agustus 2014	Graha Yasa Selaras	Rp	71	3	Bulanan (2016-2021)	Bulanan	3 bulan JIBOR+3,25%	Aset tetap (Catatan 9)
	8 April 2015 ^a	Telkomsel	Rp	1.000	-	14 April 2018	Kuartalan	3 bulan JIBOR+1,95%	Tidak ada
	27 September 2016	Patrakom	Rp	70	-	Kuartalan (2017-2019)	Bulanan	9,50%	Piutang usaha (Catatan 5) dan aset tetap (Catatan 9)
	30 Maret 2017	Dayamitra	Rp	500	-	Semesteran (2019-2024)	Kuartalan	3 bulan JIBOR+1,85%	Seluruh aset
Bank CIMB Niaga (lanjutan)									
	31 Maret 2011	GSD	Rp	24	1	Bulanan (2011-2020)	Bulanan	9,75%	Aset tetap (Catatan 9) dan kontrak sewa

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)

c. Utang bank (lanjutan)

	Peminjam	Mata uang	Total fasilitas* (dalam miliaran)	Pembayaran periode berjalan (dalam miliaran)	Jadwal pembayaran	Periode pembayaran bunga	Tingkat suku Bunga per tahun	Jaminan
Bank CIMB Niaga (lanjutan)								
31 Maret 2011	GSD	Rp	13	0	Bulanan (2011-2019)	Bulanan	9,75%	Aset tetap (Catatan 9) dan kontrak sewa
9 September 2011	GSD	Rp	41	1	Bulanan (2011-2021)	Bulanan	9,75%	Aset tetap (Catatan 9) dan kontrak sewa
20 September 2012 ^a	TLT	Rp	1.150	-	Bulanan (2015-2030)	Kuartalan	3 bulan JIBOR	Aset tetap (Catatan 9)
20 September 2012 ^a	TLT	Rp	118	-	Bulanan (2015-2030)	Bulanan	+3,45% 9,00%	Aset tetap (Catatan 9)
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia								
13 Maret 2015 ^{a&h}	Metra	Rp	400	8	Kuartalan (2016-2020)	Kuartalan	3 bulan JIBOR+2,15%	Tidak ada
13 Maret 2015 ^{a&h}	Infomedia	Rp	250	3	Kuartalan (2016-2020)	Kuartalan	3 bulan JIBOR+2,15%	Tidak ada
13 Maret 2015 ^{a&h}	Dayamitra	Rp	100	2	Kuartalan (2016-2020)	Kuartalan	3 bulan JIBOR+2,15%	Tidak ada
UOB								
22 September 2016	Dayamitra	Rp	500	-	Semesteran (2018-2024)	Kuartalan	3 bulan JIBOR+2,20%	Aset tetap (Catatan 9)
UOB Singapore								
9 September 2016	TII	US\$	0,06	-	Semesteran (2019-2022)	Kuartalan	3 bulan LIBOR+1,5%	Tidak ada
Bank ANZ Indonesia								
13 Maret 2015 ^{a&h}	GSD	Rp	249,5	-	13 Juni 2020	Kuartalan	3 bulan JIBOR+2,00%	Tidak ada
JBIC								
28 Maret 2013 ^{a&e}	Perusahaan	US\$	0,03	0,003	Semesteran (2014-2019)	Semesteran	2.18% dan 6 bulan LIBOR+1,20%	Tidak ada

Fasilitas utang bank yang diperoleh Grup tersebut digunakan untuk keperluan modal kerja.

* Disajikan dalam mata uang asal

^a Sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian, Grup diharuskan untuk menaati semua persyaratan atau batasan seperti adanya pembatasan pembagian dividen, pembatasan perolehan utang baru, termasuk mempertahankan rasio-rasio keuangan. Pada tanggal 31 Desember 2016, Grup telah memenuhi ketentuan mengenai rasio keuangan tersebut, kecuali untuk pinjaman tertentu. Pada tanggal 31 Desember 2016, Grup telah memperoleh persetujuan (*waiver*) dari pemberi pinjaman untuk tidak mensyaratkan pembayaran sebagai konsekuensi atas pelanggaran tersebut.

^b Telkomsel tidak memberikan jaminan apa pun atas setiap pinjaman atau fasilitas kredit lainnya. Persyaratan dari berbagai pinjaman antara Telkomsel dengan krediturnya dan penyedia dana, mengharuskan ketaatan terhadap sejumlah jaminan dan larangan termasuk persyaratan keuangan dan lainnya, diantaranya pembatasan atas jumlah dividen dan bentuk distribusi laba lainnya yang dapat berdampak buruk pada kemampuan Telkomsel untuk memenuhi persyaratan dari fasilitas-fasilitas tersebut. Persyaratan dari perjanjian yang relevan juga meliputi klausul gagal bayar dan gagal bayar silang. Pada tanggal 31 Maret 2017, Telkomsel memenuhi persyaratan tersebut di atas.

^c Berdasarkan amandemen terakhir pada tanggal 12 Januari 2015.

^d Berdasarkan amandemen terakhir pada tanggal 22 September 2014.

^e Sehubungan dengan perjanjian dengan Konsorsium NEC Corporation dan TE SubCom, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman dengan JBIC, untuk pengadaan barang dan jasa dari konsorsium NEC Corporation dan TE SubCom untuk proyek *Southeast Asia Japan Cable System*. Fasilitas tersebut terdiri dari fasilitas A dan B masing-masing sebesar US\$18,8 juta dan US\$12,5 juta.

^f Entitas anak dari MD Media.

^g Berdasarkan amandemen terakhir pada tanggal 13 Juli 2015.

^h Pada tanggal 13 Maret 2015, Perusahaan, GSD, Metra dan Infomedia menandatangani perjanjian kredit dari PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia, The Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ Ltd., PT Bank ANZ Indonesia dan sindikasi bank (BCA dan BNI) masing-masing sebesar Rp750 miliar, Rp 750 miliar, Rp500 miliar dan Rp3.000 miliar. Per 31 Maret 2017, fasilitas yang belum digunakan dari PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia, The Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ Ltd. dan PT Bank ANZ Indonesia masing-masing sebesar Rp82,5 miliar, Rp82,5 miliar dan Rp250,5 miliar.

ⁱ Berdasarkan amandemen terakhir pada tanggal 14 November 2016.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)

d. Pinjaman lainnya

	<u>Peminjam</u>	<u>Mata uang</u>	<u>Total fasilitas (dalam miliaran)</u>	<u>Pembayaran periode berjalan (dalam miliaran)</u>	<u>Jadwal pembayaran</u>	<u>Periode pembayaran bunga</u>	<u>Tingkat suku Bunga per tahun</u>	<u>Jaminan</u>
PT Sarana Multi Infrastruktur 12 Oktober 2016	Dayamitra	Rp	700	-	Semesteran (2017-2025)	Kuartalan	3 bulan JIBOR+2,20%	Aset tetap (Catatan 9)

Berdasarkan perjanjian tersebut, Dayamitra diharuskan memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan, diantaranya mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

1. *Debt to equity* tidak lebih dari 5:1.
2. *Net debt* terhadap EBITDA tidak lebih dari 4:1.
3. *Debt service coverage* minimal 100%.

Pada tanggal 31 Maret 2017, Dayamitra memenuhi ketentuan mengenai rasio-rasio tersebut diatas.

17. KEPENTINGAN NONPENGENDALI

	<u>31 Maret 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Kepentingan nonpengendali atas aset bersih entitas anak:		
Telkomsel	21.033	20.778
GSD	141	141
Metra	172	208
TII	34	33
Jumlah	21.380	21.160
	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Kepentingan nonpengendali atas laba (rugi) komprehensif tahun berjalan entitas anak:		
Telkomsel	2.703	2.308
Metra	(14)	(3)
TII	(0)	3
GSD	(1)	(1)
Jumlah	2.688	2.307

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. KEPENTINGAN NONPENGENDALI (lanjutan)

Anak Perusahaan dengan kepemilikan nonpengendali yang material

Pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016, kepemilikan kepentingan nonpengendali yang dianggap material oleh Perusahaan adalah kepemilikan kepentingan nonpengendali atas Telkomsel sebesar 35% (Catatan 1d).

Ringkasan informasi keuangan Telkomsel dibawah ini disajikan berdasarkan nilai sebelum eliminasi saldo dan transaksi antar perusahaan.

Ringkasan laporan posisi keuangan

	<u>31 Maret 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Aset lancar	33.938	28.818
Aset tidak lancar	58.866	60.963
Liabilitas jangka pendek	(24.154)	(21.891)
Liabilitas jangka panjang	(8.549)	(8.520)
Jumlah ekuitas	<u>60.101</u>	<u>59.370</u>
Yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	39.068	38.592
Kepentingan nonpengendali	21.033	20.778

Ringkasan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Pendapatan	22.300	20.217
Beban operasi	(12.385)	(11.513)
Pendapatan lain-lain	280	-
Laba sebelum pajak penghasilan	10.195	8.704
Beban pajak penghasilan - bersih	(2.471)	(2.108)
Laba periode berjalan dari operasi yang masih berlanjut	<u>7.724</u>	<u>6.596</u>
Penghasilan komprehensif lain - bersih	-	-
Jumlah laba komprehensif periode berjalan	<u>7.724</u>	<u>6.596</u>

Yang dapat diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali	2.703	2.308
Dividen yang dibayar kepada kepentingan nonpengendali	7.036	7.810

Ringkasan laporan arus kas

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Kegiatan operasi	12.620	12.854
Kegiatan investasi	(2.764)	(2.274)
Kegiatan pendanaan	(6.920)	(268)
Kenaikan bersih kas dan setara kas	<u>2.936</u>	<u>10.312</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. MODAL SAHAM

Keterangan	31 Maret 2017		
	Jumlah saham	Persentase kepemilikan	Jumlah modal disetor
Saham seri A Dwiwarna			
Pemerintah	1	0	0
Saham seri B			
Pemerintah	51.602.353.559	52,09	2.580
The Bank of New York Mellon Corporation*	6.600.041.280	6,67	330
Komisaris (Catatan 1b):			
Hendri Saparini	414.157	0	0
Dolfie Othniel Fredric Palit	372.741	0	0
Hadiyanto	875.297	0	0
Direksi (Catatan 1b):			
Alex Janangkih Sinaga	920.349	0	0
Indra Utoyo	1.972.644	0	0
Honesti Basyir	1.945.644	0	0
Herdy Rosadi Harman	828.012	0	0
Abdus Somad Arief	828.314	0	0
Dian Rachmawan	888.854	0	0
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	40.850.775.748	41,24	2.043
Jumlah	99.062.216.600	100,00	4.953
Modal saham yang diperoleh kembali (Catatan 20)	1.737.779.800	0	87
Jumlah	100.799.996.400	100,00	5.040
Keterangan	31 Desember 2016		
	Jumlah saham	Persentase kepemilikan	Jumlah modal disetor
Saham seri A Dwiwarna			
Pemerintah	1	0	0
Saham seri B			
Pemerintah	51.602.353.559	52,09	2.580
The Bank of New York Mellon Corporation*	7.000.589.980	7,07	350
Komisaris (Catatan 1b):			
Hendri Saparini	414.157	0	0
Dolfie Othniel Fredric Palit	372.741	0	0
Hadiyanto	875.297	0	0
Direksi (Catatan 1b):			
Alex Janangkih Sinaga	920.349	0	0
Indra Utoyo	1.972.644	0	0
Honesti Basyir	1.945.644	0	0
Herdy Rosadi Harman	828.012	0	0
Abdus Somad Arief	828.314	0	0
Dian Rachmawan	888.854	0	0
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	40.450.227.048	40,84	2.023
Jumlah	99.062.216.600	100,00	4.953
Modal saham yang diperoleh kembali (Catatan 20)	1.737.779.800	0	87
Jumlah	100.799.996.400	100,00	5.040

* The Bank of New York Mellon Corporation bertindak sebagai lembaga penyimpanan untuk saham ADS Perusahaan.

Perusahaan hanya menerbitkan 1 saham Seri A Dwiwarna yang dimiliki oleh Pemerintah dan tidak dapat dialihkan kepada siapapun, dan mempunyai hak veto dalam RUPS Perusahaan berkaitan dengan pengangkatan dan penggantian Dewan Komisaris dan Direksi, penerbitan saham baru, serta perubahan Anggaran Dasar Perusahaan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. TAMBAHAN MODAL DISETOR

	31 Maret 2017	31 Desember 2016
Hasil penjualan 933.333.000 saham di atas nilai nominal melalui IPO pada tahun 1995	1.446	1.446
Selisih lebih harga penjualan kembali 215.000.000 saham yang diperoleh kembali pada tahap II atas biaya perolehannya (Catatan 20)	576	576
Selisih lebih harga penjualan kembali 211.290.500 saham yang diperoleh kembali pada tahap I atas biaya perolehannya (Catatan 20)	544	544
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	478	478
Selisih lebih harga pengalihan saham yang diperoleh kembali untuk program kepemilikan saham karyawan atas biaya perolehannya (Catatan 20)	228	228
Selisih lebih harga penjualan kembali 22.363.000 sisa saham yang diperoleh kembali pada tahap III atas biaya perolehannya (Catatan 20)	36	36
Selisih lebih harga penjualan kembali 864.000.000 saham yang diperoleh kembali pada tahap IV atas biaya perolehannya (Catatan 20)	1.996	1.996
Kapitalisasi menjadi 746.666.640 saham Seri B pada tahun 1999	(373)	(373)
Jumlah bersih	4.931	4.931

Saldo selisih transaksi restrukturisasi dan transaksi lainnya entitas sepengendalian berjumlah Rp478 miliar berasal dari terminasi dini hak eksklusif Perusahaan sebagai penyelenggara layanan sambungan tidak bergerak lokal dan jarak jauh dalam negeri, dimana Perusahaan diwajibkan oleh Pemerintah untuk menggunakan dana kompensasi ini untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016, akumulasi pembangunan infrastruktur yang terkait masing-masing sebesar Rp537 miliar.

20. MODAL SAHAM YANG DIPEROLEH KEMBALI

Tahap	Dasar	Jangka waktu	Maksimum pembelian	
			Lembar	Nilai
I	RUPSLB	21 Desember 2005 - 20 Juni 2007	1.007.999.964	Rp5.250
II	RUPST	29 Juni 2007 - 28 Desember 2008	215.000.000	Rp2.000
III	RUPST	20 Juni 2008 - 20 Desember 2009	339.443.313	Rp3.000
-	BAPEPAM - LK	13 Oktober 2008 - 12 Januari 2009	4.031.999.856	Rp3.000
IV	RUPST	19 Mei 2011 - 20 November 2012	645.161.290	Rp5.000

Mutasi modal saham yang diperoleh kembali adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2017			31 Desember 2016		
	Jumlah saham	%	Rp	Jumlah saham	%	Rp
Saldo awal	1.737.779.800	1,72	2.541	2.601.779.800	2,58	3.804
Penjualan atas saham yang diperoleh kembali	-	-	-	(864.000.000)	(0,86)	(1.263)
Saldo akhir	1.737.779.800	1,72	2.541	1.737.779.800	1,72	2.541

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. MODAL SAHAM YANG DIPEROLEH KEMBALI (lanjutan)

Berdasarkan keputusan RUPST Perusahaan tanggal 11 Juni 2010, para pemegang saham Perusahaan menyetujui perubahan rencana Perusahaan atas saham yang diperoleh kembali dari hasil pembelian kembali saham tahap I, II, dan III, sebagai berikut: (i) dijual baik di bursa efek maupun di luar bursa efek; (ii) ditarik kembali dengan cara pengurangan modal; (iii) pelaksanaan konversi efek bersifat ekuitas; dan (iv) untuk keperluan pendanaan.

Berdasarkan keputusan RUPST Perusahaan tanggal 19 Mei 2011, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pelaksanaan pembelian kembali modal saham tahap IV.

Pada tahun 2012, Perusahaan melakukan pembelian kembali sejumlah 237.270.500 lembar saham (setara dengan 1.186.352.500 lembar saham setelah pemecahan saham) yang beredar di publik (sebagai bagian dari proses program pembelian kembali saham tahap IV) sebesar Rp1.744 miliar.

Berdasarkan keputusan RUPST Perusahaan tanggal 19 April 2013, para pemegang saham Perusahaan menyetujui perubahan rencana Perusahaan atas saham yang diperoleh kembali tahap III untuk digunakan sebagai pelaksanaan program kepemilikan saham karyawan atau Employee Stock Ownership Program ("ESOP") tahun 2013.

Pada tanggal 30 Juli 2013, Perusahaan telah menjual kembali sebanyak 211.290.500 saham yang diperoleh kembali (setara dengan 1.056.452.500 lembar saham setelah pemecahan saham) yang merupakan saham yang diperoleh kembali dari program pembelian kembali saham tahap I yang memiliki nilai wajar keseluruhan Rp2.368 miliar (bersih setelah dikurangi biaya-biaya terkait penjualan saham). Selisih lebih atas nilai penjualan atas pembelian kembali saham dengan nilai perolehan saham yang dibeli kembali tersebut sebesar Rp544 miliar dicatat sebagai tambahan modal disetor (Catatan 19).

Pada tanggal 13 Juni 2014, Perusahaan telah menjual kembali sebanyak 215.000.000 saham yang diperoleh kembali (setara dengan 1.075.000.000 lembar saham setelah pemecahan saham) yang merupakan saham yang diperoleh kembali dari program pembelian kembali saham tahap II yang memiliki nilai wajar keseluruhan Rp2.541 miliar (bersih setelah dikurangi biaya-biaya terkait penjualan saham). Selisih lebih nilai penjualan atas pembelian kembali saham dengan nilai perolehan saham yang dibeli kembali tersebut sebesar Rp576 miliar dicatat sebagai tambahan modal disetor (Catatan 19).

Pada tanggal 21 Desember 2015, Perusahaan telah menjual kembali sebanyak 4.472.600 saham yang diperoleh kembali (setara dengan 22.363.000 lembar saham setelah pemecahan saham) yang merupakan sisa saham yang diperoleh kembali dari program pembelian kembali saham tahap III yang memiliki nilai wajar keseluruhan Rp68 miliar (bersih setelah dikurangi biaya-biaya terkait penjualan saham). Selisih lebih nilai penjualan atas pembelian kembali saham dengan nilai perolehan saham yang dibeli kembali tersebut sebesar Rp36 miliar dicatat sebagai tambahan modal disetor (Catatan 19).

Pada tanggal 29 Juni 2016, Perusahaan telah menjual kembali sebanyak 172.800.000 saham yang diperoleh kembali (setara dengan 864.000.000 lembar saham setelah pemecahan saham) yang merupakan saham yang diperoleh kembali sebagian dari program pembelian kembali saham tahap IV yang memiliki nilai wajar keseluruhan Rp3.259 miliar (bersih setelah dikurangi biaya-biaya terkait penjualan saham). Selisih lebih nilai penjualan atas pembelian kembali saham dengan nilai perolehan saham yang dibeli kembali tersebut sebesar Rp1.996 miliar dicatat sebagai tambahan modal disetor (Catatan 19).

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. KOMPONEN EKUITAS LAINNYA

	31 Maret 2017	31 Desember 2016
Selisih transaksi perubahan ekuitas entitas asosiasi	386	386
Laba belum direalisasi atas kepemilikan efek yang tersedia untuk dijual	53	38
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	493	503
Selisih transaksi akuisisi kepemilikan kepentingan nonpengendali pada entitas anak	(637)	(637)
Komponen ekuitas lainnya	49	49
Jumlah	344	339

22. PENDAPATAN

	2017	2016
Pendapatan telepon		
Selular		
Pendapatan pemakaian	9.612	8.818
Pendapatan abonemen bulanan	7	107
	<u>9.619</u>	<u>8.925</u>
Tidak bergerak		
Pendapatan pemakaian	891	1.032
Pendapatan abonemen bulanan	814	822
<i>Call center</i>	75	69
Lain-lain	86	22
	<u>1.866</u>	<u>1.945</u>
Jumlah pendapatan telepon	11.485	10.870
Pendapatan interkoneksi	1.270	1.082
Pendapatan data, internet, dan jasa teknologi informatika		
Internet dan data selular	8.094	6.313
Internet, komunikasi data dan jasa teknologi informatika	4.424	3.711
<i>Short Messaging Services</i> ("SMS")	3.376	3.957
TV berbayar	320	249
Lain-lain	79	28
Jumlah pendapatan data, internet, dan jasa teknologi informatika	16.293	14.258
Pendapatan jaringan	302	290
Pendapatan lainnya		
Penjualan <i>handset</i>	371	370
CPE dan terminal	396	60
Sewa menara telekomunikasi	183	178
<i>Call center service</i>	144	137
<i>E-payment</i>	129	48
<i>E-health</i>	111	54
Lain-lain	338	195
Jumlah pendapatan lainnya	1.672	1.042
Jumlah pendapatan	31.022	27.542

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. PENDAPATAN (lanjutan)

Rincian dari komponen pendapatan neto yang diperoleh Grup dari transaksi keagenan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Pendapatan bruto	8.351	6.521
Kompensasi kepada penyedia jasa nilai tambah	(257)	(208)
Pendapatan neto	<u>8.094</u>	<u>6.313</u>

Lihat Catatan 31 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

23. BEBAN KARYAWAN

Rincian dari beban karyawan adalah sebagai berikut:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Gaji dan tunjangan	1.740	1.616
Cuti, insentif dan tunjangan lainnya	886	1.106
Beban pensiun (Catatan 29)	217	176
Beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala bersih (Catatan 29)	76	45
Beban manfaat karyawan lainnya (Catatan 29)	16	12
Beban penghargaan masa kerja (Catatan 30)	30	27
Beban imbalan pasca kerja lainnya (Catatan 29)	11	12
Lain-lain	1	5
Jumlah	<u>2.977</u>	<u>2.999</u>

Lihat Catatan 31 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

24. BEBAN OPERASI, PEMELIHARAAN DAN JASA TELEKOMUNIKASI

Rincian dari beban operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi adalah sebagai berikut:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Operasi dan pemeliharaan	4.303	4.308
Beban pemakaian frekuensi radio (Catatan 34c.i dan 34c.ii)	1.006	966
Beban hak penyelenggaraan dan Kewajiban Pelayanan Universal	547	527
Sewa sirkit dan CPE	672	498
Beban pokok jasa teknologi informatika	635	355
Beban pokok penjualan <i>handset</i> (Catatan 6)	365	367
Listrik, gas dan air	240	249
Beban pokok penjualan kartu SIM dan voucher (Catatan 6)	216	110
Sewa menara	101	96
Sewa kendaraan dan fasilitas pendukung	90	71
Lain-lain	123	104
Jumlah	<u>8.298</u>	<u>7.651</u>

Lihat Catatan 31 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Rincian dari beban umum dan administrasi adalah sebagai berikut:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Provisi penurunan nilai piutang (Catatan 5d)	479	(207)
Beban umum	268	404
Jasa profesional	56	177
Perjalanan	111	80
Pelatihan, pendidikan dan rekrutmen	109	70
Rapat	60	41
Beban penagihan	33	52
Sumbangan sosial	44	3
Lain-lain	66	81
Jumlah	<u>1.226</u>	<u>701</u>

Lihat Catatan 31 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

26. PERPAJAKAN

a. Tagihan restitusi pajak

	<u>31 Maret 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Perusahaan		
Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") (Catatan 26e.i)	335	335
PPH Badan	473	473
Entitas anak		
PPH Badan	318	66
PPN	836	1.146
Total tagihan restitusi pajak	<u>1.962</u>	<u>2.020</u>
Bagian jangka pendek	(684)	(592)
Bagian jangka panjang	<u>1.278</u>	<u>1.428</u>

b. Pajak dibayar di muka

	<u>31 Maret 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Perusahaan		
PPH Pasal 19 - penilaian kembali aset tetap (Catatan 26f)	538	538
PPN	1.160	1.075
Entitas anak		
PPH badan	227	62
PPN	1.840	1.639
PPH		
Pasal 23 - Penyerahan jasa	104	52
Total pajak dibayar di muka	<u>3.869</u>	<u>3.366</u>
Bagian jangka pendek	(2.531)	(2.138)
Bagian jangka panjang	<u>1.338</u>	<u>1.228</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Utang pajak

	<u>31 Maret 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Perusahaan		
PPH		
Pasal 4 (2) - Pajak final	12	29
Pasal 21 - PPh pribadi	44	141
Pasal 22 - Pembelian barang	3	2
Pasal 23 - Penyerahan jasa	26	42
Pasal 25 - Angsuran PPh badan	17	-
Pasal 26 - PPh pribadi luar negeri	1	136
Pasal 29 - PPh badan	237	-
PPN		
PPN WAPU	290	297
	<u>630</u>	<u>647</u>
Entitas anak		
PPH		
Pasal 4 (2) - Pajak final	55	63
Pasal 21 - PPh pribadi	69	121
Pasal 22 - Pembelian barang	1	2
Pasal 23 - Penyerahan jasa	78	93
Pasal 25 - Angsuran PPh Badan	643	136
Pasal 26 - PPh pribadi luar negeri	263	16
Pasal 29 - PPh badan	1.790	1.100
PPN	786	776
	<u>3.685</u>	<u>2.307</u>
Total utang pajak	<u>4.315</u>	<u>2.954</u>

d. Komponen beban (manfaat) pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Kini		
Perusahaan	366	306
Entitas anak	2.625	2.301
	<u>2.991</u>	<u>2.607</u>
Tangguhan		
Perusahaan	(33)	(99)
Entitas anak	(10)	(85)
	<u>(43)</u>	<u>(184)</u>
Beban pajak penghasilan bersih	<u>2.948</u>	<u>2.423</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Komponen beban (manfaat) pajak penghasilan adalah sebagai berikut (lanjutan):

Rekonsiliasi antara pajak penghasilan yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak perusahaan 20% terhadap laba sebelum pajak penghasilan setelah dikurang pendapatan yang dikenakan pajak final dan beban pajak bersih pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Laba sebelum pajak penghasilan	12.324	9.316
Dikurang pendapatan yang dikenakan pajak final - bersih	(421)	(131)
	<u>11.903</u>	<u>9.185</u>
Pajak dihitung pada tarif Perusahaan 20%	2.381	1.837
Perbedaan pada tarif pajak entitas anak	514	438
Beban yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan perpajakan	61	55
Pajak penghasilan final	27	56
Lain-lain	(35)	37
Beban pajak penghasilan bersih	<u>2.948</u>	<u>2.423</u>

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan dengan estimasi laba kena pajak untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Laba sebelum pajak penghasilan	12.324	9.316
Penambahan kembali eliminasi konsolidasian	5.395	4.507
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan dan eliminasi	17.719	13.823
Dikurangi: laba sebelum pajak penghasilan entitas anak	(10.932)	(8.683)
Laba sebelum pajak penghasilan Perusahaan	6.787	5.140
Dikurangi: penghasilan yang telah dikenakan pajak final	(98)	(150)
	<u>6.689</u>	<u>4.990</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Komponen beban (manfaat) pajak penghasilan adalah sebagai berikut (lanjutan):

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Perbedaan temporer:		
Penyisihan beban karyawan	236	523
Beban pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya berkala bersih	59	51
Pengukuran nilai wajar opsi jual dan investasi jangka panjang		
Pendapatan instalasi tanggungan	(15)	(2)
Penyisihan beban insentif migrasi pelanggan		
Penyusutan dan laba atas penjualan aset tetap	(528)	(271)
Provisi terminasi atas kontrak yang memberatkan	-	430
Sewa pembiayaan	1	1
Provisi penurunan nilai piutang usaha dan penghapusbukuan piutang	374	(255)
Penyisihan lain-lain	40	32
Jumlah perbedaan temporer bersih	167	509
Perbedaan tetap:		
Manfaat kerja tidak dapat dibebankan	54	60
Beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala bersih	76	45
Sumbangan	37	18
Bagian laba bersih entitas asosiasi dan entitas anak	(5.298)	(4.513)
Lain-lain	38	302
Jumlah perbedaan tetap bersih	(5.093)	(4.088)
Laba kena pajak	1.763	1.411
Beban pajak kini	353	282
Beban pajak final	13	24
Jumlah beban pajak kini - Perusahaan	366	306
Beban pajak kini - entitas anak	2.625	2.301
Jumlah beban pajak penghasilan kini	2.991	2.607

Dalam Undang-Undang Pajak No. 36 tahun 2008 yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 81 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 77 tahun 2013 dan diubah terakhir dengan PP No. 56 tahun 2015 mengenai pemberian pengurangan tarif pajak sebesar 5% dari tarif pajak tertinggi kepada perusahaan yang sahamnya tercatat dan diperdagangkan di BEI dengan jumlah paling sedikit 40% dari jumlah seluruh saham yang disetor perusahaan dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 pemegang saham, dimana kepemilikan masing-masing tidak boleh melebihi 5%. Ketentuan tersebut harus dipenuhi oleh perusahaan yang mencatatkan sahamnya di bursa dalam waktu paling singkat 183 hari kalender dalam jangka waktu satu tahun fiskal. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, Perusahaan memenuhi seluruh kriteria yang dipersyaratkan, maka Perusahaan menurunkan tarif pajak sebesar 5% dalam perhitungan beban dan liabilitas pajak penghasilan badan Perusahaan.

Perusahaan menerapkan tarif pajak sebesar 20% untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dan 2016. Entitas anak menerapkan tarif pajak sebesar 25% untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dan 2016.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak

Perusahaan akan menyampaikan perhitungan PPh Badan diatas dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan untuk tahun fiskal 2016 kepada kantor pajak dan dilaporkan berdasarkan peraturan yang berlaku. Jumlah PPh Badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 desember 2015 telah sesuai dengan yang dilaporkan dalam SPT Tahunan.

(i) Perusahaan

Pada bulan November 2013, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") No. 00056/207/07/093/13 hingga No. 00065/207/07/093/13 tanggal 15 November 2013 perihal Kurang Bayar PPN masa pajak Januari hingga September dan November 2007 senilai Rp142 miliar. Atas SKPKB tersebut, pada tanggal 20 Januari 2014 Perusahaan telah mengajukan keberatan ke Otoritas Pajak. Atas keberatan tersebut, Perusahaan telah mendapatkan jawaban berupa penolakan keberatan dari Otoritas Pajak melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 2498 sampai dengan 2504 dan 2541 sampai dengan 2543/WPJ.19/2014 tertanggal 16 dan 18 Desember 2014. Perusahaan menerima hasil pemeriksaan kurang bayar PPN sebesar Rp22 miliar (termasuk denda Rp10 miliar). Bagian yang diterima dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2014 dan bagian atas PPN Interkoneksi sebesar Rp120 miliar (termasuk denda Rp39 miliar) dicatat sebagai tagihan restitusi pajak. Perusahaan telah mengajukan banding atas penolakan keberatan SKPKB PPN Interkoneksi dengan No. surat Tel. 59/KU000/COP-10000000/2015 hingga No. Tel. 68/KU000/COP-10000000/2015 pada tanggal 12 Maret 2015. Sampai dengan tanggal penerbitan pelaporan keuangan konsolidasian ini, pengajuan banding tersebut masih dalam proses pengadilan pajak.

Pada bulan November 2014, Perusahaan menerima SKPKB sebagai hasil pemeriksaan pajak untuk tahun fiskal 2011 dari Otoritas Pajak. Berdasarkan surat tersebut, Perusahaan menerima ketetapan kurang bayar PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011 senilai Rp182,5 miliar (termasuk denda Rp60 miliar) dan ketetapan kurang bayar pajak penghasilan badan sebesar Rp2,8 miliar (termasuk denda Rp929 juta). Perusahaan telah membayar kurang bayar tersebut. Bagian yang telah diterima oleh manajemen atas SKPKB tersebut sebesar Rp4,7 miliar (termasuk denda sebesar Rp2 miliar) dibebankan di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun 2014 dan bagian atas PPN Interkoneksi sebesar Rp178 miliar (termasuk denda Rp58 miliar) dicatat sebagai tagihan restitusi pajak. Perusahaan telah mengajukan keberatan atas kurang bayar PPN interkoneksi tahun 2011 pada tanggal 7 Januari 2015 ke Otoritas Pajak. Atas keberatan tersebut, Perusahaan telah mendapatkan jawaban berupa penolakan keberatan dari Otoritas Pajak melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 1907 sampai dengan 1914 tanggal 20 Oktober 2015 untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Agustus 2011, No. 2026 sampai dengan 2028 tanggal 2 November 2015 untuk Masa Pajak Oktober sampai dengan Desember 2011 serta No. 2642/WPJ.19/2015 tanggal 29 Desember 2015 untuk Masa Pajak September 2011. Perusahaan telah mengajukan banding atas penolakan keberatan tersebut pada tanggal 20 Januari 2016. Sampai dengan tanggal penerbitan pelaporan keuangan konsolidasian ini, pengajuan banding tersebut masih dalam proses pengadilan pajak. Atas PPN Interkoneksi tersebut diatas, telah diterima Penerbitan Putusan Pengadilan Pajak No. 81994/PP/M.XIA/16/2017 s.d No. 82005/PP/M.XIA/16/2017 tanggal 20 Maret 2017 tentang Keberatan atas SKPKB PPN barang dan jasa masa Januari s.d Desember 2011, dengan hasil untuk masa pajak Januari, September, Oktober, November dan Desember: atas jasa interkoneksi *International Incoming Call* adalah jasa yang terutang PPN dan termasuk Jasa Kena Pajak Ekspor yang dikenakan tarif 0%. Sedangkan untuk masa pajak Februari s.d Agustus 2011, permohonan Perusahaan ditolak karena tidak memenuhi ketentuan formal pengajuan banding.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

(i) Perusahaan (lanjutan)

Perusahaan menerima surat dari Otoritas Pajak No. Pemb-00427/WPJ.19/KP.0405/RIK.SIS/2015 tanggal 29 Juni 2015 tentang Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan masa pajak Januari sampai dengan Desember 2014. Pada tanggal 20 April 2016 Perusahaan telah menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00022/406/14/093/16 yang menetapkan jumlah PPh lebih bayar Perusahaan untuk tahun pajak 2014 sebesar Rp51,5 miliar.

Pada tanggal 3 Mei 2016, Otoritas Pajak mengeluarkan surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan masa pajak Januari sampai dengan Desember 2012, dan atas pemeriksaan tersebut telah menerbitkan ketetapan kurang bayar PPh Badan senilai Rp991,6 miliar (termasuk denda Rp321,6 miliar), ketetapan kurang bayar PPN senilai Rp467 miliar (termasuk denda Rp153,5 miliar), ketetapan kurang bayar PPN atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak ("JKP") dari Luar Daerah Pabean senilai Rp1,2 miliar (termasuk denda Rp392 juta), ketetapan kurang bayar PPN atas Pemungutan Pajak senilai Rp57 miliar (termasuk denda Rp18,5 miliar), tagihan pajak PPN senilai Rp37,5 miliar, ketetapan kurang bayar PPh pasal 21 senilai Rp16,2 miliar (termasuk denda Rp5,3 miliar), ketetapan kurang bayar PPh Final pasal 21 senilai Rp1,2 miliar (termasuk denda Rp407 juta) ketetapan kurang bayar PPh pasal 23 senilai Rp63,5 miliar (termasuk denda Rp20,6 miliar), ketetapan kurang bayar PPh pasal 4 (2) senilai Rp25 miliar (termasuk denda Rp8,1 miliar) dan ketetapan kurang bayar PPh pasal 26 senilai Rp197,6 miliar (termasuk denda Rp64 miliar).

Perusahaan telah menyetujui sebesar Rp35 miliar terkait Perhitungan Kembali Pengkreditan Pajak Masukan atas Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Incoming, Rp613 juta atas Pajak Penghasilan, dan Rp311,5 juta atas PPh pasal 26 dan telah diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Atas bagian lainnya, Perusahaan telah mengajukan keberatan pada tanggal 16 November 2016, dan sampai dengan tanggal penerbitan dan pelaporan konsolidasian ini, pengajuan keberatan tersebut masih dalam proses.

Pada tanggal 23 Agustus 2016, Otoritas Pajak mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan masa pajak Januari sampai dengan Desember 2015. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, proses pemeriksaan masih berlangsung.

(ii) Telkomsel

Pada bulan Desember 2013, Pengadilan Pajak telah menerima banding Telkomsel atas PPN dan *withholding tax* tahun 2006 dengan total Rp116 miliar. Pada bulan Februari 2014, Telkomsel menerima pengembalian pajak. Pada tanggal 3 Juli 2015, dalam hal menanggapi surat Telkomsel untuk klaim pendapatan bunga atas putusan PPN dan Pemotongan Pajak yang menguntungkan tahun 2006, Otoritas pajak menginformasikan bahwa klaim tersebut tidak bisa dijamin sampai Otoritas Pajak mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung. Pada tanggal 19 Agustus 2016 Telkomsel menerima pemberitahuan dari Pengadilan Pajak bahwa Otoritas Pajak mengajukan uji materi peninjauan kembali ke Mahkamah Agung atas PPN sebesar Rp108 miliar. Kontra memorandum untuk pengujian materi telah dikirim pada tanggal 14 September 2016.

Pada tanggal 21 April 2010, Otoritas Pajak mengajukan uji materi kepada Mahkamah Agung terkait putusan Pengadilan Pajak yang menerima permintaan Telkomsel untuk membatalkan Surat Tagihan Pajak ("STP") atas kurang bayar PPh pasal 25 untuk bulan Desember 2008 sebesar Rp429 miliar (termasuk denda sebesar Rp8,4 miliar). Pada bulan Mei 2010, Telkomsel mengajukan kontra memori kepada Mahkamah Agung.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

(ii) Telkomsel (lanjutan)

Pada bulan Juli 2016, kasus tersebut telah diumumkan di *website* Mahkamah Agung. Meskipun Telkomsel belum menerima putusan dari pengadilan, secara konservatif Telkomsel telah mengakui denda pajak sebesar Rp8,4 miliar. Dasar pajak sebesar Rp421 miliar seharusnya bukan merupakan tambahan beban pajak, dimana pajak penghasilan badan dapat dikreditkan.

Pada bulan Mei dan Juni 2012, Telkomsel menerima pengembalian denda atas kurang bayar PPh pasal 25 untuk tahun 2010 sebesar Rp15,7 miliar berdasarkan keputusan Pengadilan Pajak. Pada tanggal 17 Juli 2012, Otoritas Pajak mengajukan uji materi kepada Mahkamah Agung. Pada tanggal 14 September 2012, Telkomsel mengajukan kontra memori kepada Mahkamah Agung.

Pada bulan Juli 2016, secara konservatif Telkomsel mengakui denda pajak sebesar Rp15,7 miliar dimana memiliki substansi hukum yang sama dengan kasus denda pajak tahun 2008.

Pada tanggal 24 Mei 2012, Telkomsel mengajukan keberatan kepada Otoritas Pajak atas kurang bayar PPN sebesar Rp290,6 miliar (termasuk denda Rp67 miliar) untuk tahun 2010 dan dicatat sebagai tagihan restitusi pajak. Pada tanggal 1 Mei 2013, Otoritas Pajak menolak keberatan Telkomsel. Selanjutnya pada tanggal 29 Juli 2013, Telkomsel mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak. Pada tanggal 16 Maret 2015, Pengadilan Pajak menerima banding dan pada tanggal 13 Mei 2015, Telkomsel menerima restitusi sebesar Rp290,6 miliar. Pada tanggal 24 Juni 2015, Otoritas Pajak mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung dan pada tanggal 2 Mei 2016, Telkomsel menerima pemberitahuan dari Pengadilan Pajak terkait uji materi. Selanjutnya, pada tanggal 27 Mei 2016 Telkomsel mengajukan naik banding ke Mahkamah Agung. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, uji materi tersebut masih dalam proses.

Pada tanggal 7 November 2014, sebagai hasil dari pemeriksaan pajak oleh Otoritas Pajak, Telkomsel menerima surat ketetapan kekurangan bayar PPh Badan, PPN dan *withholding tax* masing-masing sebesar Rp257,8 miliar, Rp2,9 miliar dan Rp2,2 miliar (termasuk denda Rp85,3 miliar). Selanjutnya pada bulan Desember 2014, Telkomsel menerima ketetapan kurang bayar PPh Badan sebesar Rp7,8 miliar, kurang bayar PPN sebesar Rp1 miliar, dan kurang bayar *withholding tax* sebesar Rp2,2 miliar (termasuk denda Rp3,5 miliar). Bagian yang telah disetujui diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2014. Pada bulan Desember 2014, Telkomsel telah membayar sesuai ketetapan tersebut dan mengajukan keberatan kepada Otoritas Pajak atas kurang bayar PPh Badan sebesar Rp250 miliar (termasuk denda Rp81,1 miliar), dan PPN sebesar Rp1,9 miliar (termasuk denda Rp670 juta). Pada bulan November dan Desember 2015, Telkomsel menerima surat penolakan dari Otoritas Pajak atas PPh badan sebesar Rp250 miliar dan PPN sebesar Rp1,4 miliar. Jumlah sisa sebesar Rp250 juta atas PPN telah diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2015.

Pada bulan Agustus 2015, Telkomsel menerima surat dari Otoritas Pajak untuk meminta Telkomsel merubah umur manfaat fiskal atas aset menara telekomunikasi. Sehubungan dengan hal tersebut, atas tagihan restitusi pajak PPh Badan tahun 2011 sebesar Rp125,5 miliar telah direklasifikasi ke kewajiban pajak tangguhan, denda sebesar Rp60 miliar telah dibebankan di laba rugi tahun 2015.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

(ii) Telkomsel (lanjutan)

Pada tanggal 15 Februari 2016, Telkomsel mengajukan banding kepada Otoritas Pajak atas kurang bayar PPh Badan sebesar Rp250 miliar (termasuk denda Rp81,1 miliar). Selanjutnya, pada tanggal 17 Maret 2016, Telkomsel juga mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas kurang bayar PPN sebesar Rp1,2 miliar (termasuk denda Rp392 juta).

Pada tanggal 6 Februari 2017, Telkomsel menerima keputusan Pengadilan Pajak atas kasus PPN sebesar Rp1,2 miliar. Pada tanggal 2 Maret 2017, Telkomsel menerima keputusan Pengadilan Pajak atas kurang bayar beban pajak kini, dimana sebagian telah disetujui untuk dilakukan banding sebesar Rp247,6 miliar. Oleh karena itu jumlah tagihan restitusi pajak meningkat dari Rp48 miliar menjadi Rp248 miliar.

Pada tanggal 28 Juli 2016, Telkomsel telah menerima surat perintah untuk dilakukan pemeriksaan pajak tahun fiskal 2014. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan ini, pemeriksaan pajak masih dalam proses.

f. Insentif pajak

Pada bulan Desember 2015, Perusahaan memanfaatkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid V dalam bentuk insentif pajak untuk penilaian kembali aset tetap sebagaimana diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Keuangan ("PMK") No. 191/PMK.010/2015 jo PMK No. 233/PMK.03/2015 jo PMK No.29/PMK.03/2016. Sesuai dengan PMK tersebut, Perusahaan dapat melakukan penilaian kembali aset tetap untuk tujuan perpajakan dengan mendapatkan perlakuan khusus apabila permohonan penilaian kembali diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak ("DJP") dalam jangka waktu sejak berlakunya PMK tersebut sampai dengan tanggal 31 Desember 2016. Perlakuan khusus tersebut berupa PPh yang bersifat final berkisar 3%-6% atas selisih lebih nilai aset tetap hasil penilaian kembali di atas nilai sisa buku fiskal semula.

Pada tanggal 29 Desember 2015, Perusahaan telah mengajukan permohonan penilaian kembali aset tetap berdasarkan hasil perkiraan penilaian kembali sendiri dan telah melunasi PPh Final terkait sebesar Rp750 miliar. Sesuai PMK, nilai aset tetap hasil perkiraan penilaian kembali sendiri harus dilakukan penilaian kembali dan ditetapkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP") atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah, paling lambat tanggal 31 Desember 2016. Setelah meneliti kelengkapan dan kebenaran permohonan, DJP dalam jangka waktu 30 hari sejak permohonan diterima lengkap dapat menerbitkan surat keputusan persetujuan penilaian kembali aset tetap. Perusahaan telah menunjuk KJPP untuk melakukan penilaian kembali aset tetap Perusahaan.

Perusahaan telah menyampaikan kelengkapan Dokumen Penilaian Kembali Aset Tetap tahap 1 beserta Laporan Penilaian Kembali Aset Tetap dari KJPP yang meliputi bangunan dan alat produksi *indoor* ke DJP pada tanggal 29 September 2016. Pada tanggal 10 November 2016, DJP telah mengeluarkan persetujuan atas Penilaian Kembali Aset Tetap senilai Rp7.078 miliar dengan PPh Final sebesar Rp212 miliar.

Pada tanggal 15 Desember 2016, Perusahaan menyampaikan kembali permohonan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan bagi permohonan yang diajukan pada tahun 2016 yang meliputi aset alat produksi *outdoor* dengan estimasi kenaikan nilai aset sebesar Rp8.960 miliar dan PPh Final sebesar Rp538 miliar. Sampai dengan tanggal penerbitan dan pelaporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan masih dalam proses menunggu laporan hasil penilaian kembali aset dari KJPP.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Insentif pajak (lanjutan)

Penilaian kembali aset tetap untuk tujuan perpajakan ini menimbulkan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, karena dasar pengenaan pajak atas aset tetap menjadi lebih tinggi dari jumlah tercatat secara akuntansi. Perbedaan temporer tersebut menimbulkan aset pajak tangguhan karena manfaat ekonomik akan mengalir ke Perusahaan dalam bentuk pengurangan laba kena pajak di masa depan ketika jumlah tercatat aset tersebut terpulihkan.

Pada tahun 2016, Perusahaan mengakui aset pajak tangguhan sebesar Rp1.415 miliar atas selisih lebih nilai aset tetap hasil penilaian kembali yang telah disetujui oleh DJP di atas nilai sisa buku fiskal semula.

g. Aset dan liabilitas pajak tangguhan

Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan Grup adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2016	(Dibebankan) dikreditkan ke laporan laba rugi konsolidasian	(Dibebankan) dikreditkan ke laporan komprehensif lain konsolidasian	Reklasifikasi	31 Maret 2017
Perusahaan					
Aset pajak tangguhan:					
Beban pensiun dan beban imbalan pasca kerja lainnya berkala bersih	563	12	-	-	575
Provisi penurunan nilai piutang	388	75	-	-	463
Penyisihan beban karyawan	209	47	-	-	256
Pendapatan instalasi tangguhan	75	(3)	-	-	72
Beban yang masih harus dibayar dan provisi persediaan usang	69	1	-	-	70
Sewa pembiayaan	1	-	-	-	1
Jumlah aset pajak tangguhan	<u>1.305</u>	<u>132</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.437</u>
Liabilitas pajak tangguhan:					
Perbedaan nilai buku aset tetap menurut akuntansi dan pajak	(772)	(93)	-	-	(865)
Penilaian investasi jangka panjang	(11)	-	-	-	(11)
Hak atas tanah, aset takberwujud, dan lainnya	(11)	7	-	-	(4)
Jumlah liabilitas pajak tangguhan	<u>(794)</u>	<u>(86)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(880)</u>
Jumlah aset pajak tangguhan Perusahaan - bersih	<u>511</u>	<u>46</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>557</u>
Telkomsel					
Aset pajak tangguhan:					
Penyisihan imbalan karyawan	478	17	-	-	495
Provisi penurunan nilai piutang	143	23	-	-	166
Jumlah aset pajak tangguhan	<u>621</u>	<u>40</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>661</u>
Liabilitas pajak tangguhan:					
Sewa pembiayaan	(549)	(42)	-	-	(591)
Perbedaan nilai buku aset tetap menurut akuntansi dan pajak	(482)	9	-	(125)	(598)
Aset takberwujud	(48)	(1)	-	-	(49)
Jumlah liabilitas pajak tangguhan	<u>(1.079)</u>	<u>(34)</u>	<u>-</u>	<u>(125)</u>	<u>(1.238)</u>
Liabilitas pajak tangguhan - Telkomsel - bersih	<u>(458)</u>	<u>6</u>	<u>-</u>	<u>(125)</u>	<u>(577)</u>
Liabilitas pajak tangguhan - entitas anak lainnya - bersih	<u>(287)</u>	<u>(41)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(328)</u>
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	<u>(745)</u>	<u>(35)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(780)</u>
Aset pajak tangguhan - entitas anak lainnya - bersih	<u>258</u>	<u>32</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>290</u>
Aset pajak tangguhan - bersih	<u>769</u>	<u>78</u>	<u>-</u>	<u>(125)</u>	<u>722</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Aset dan liabilitas pajak tangguhan (lanjutan)

	31 Desember 2015	(Dibebankan) dikreditkan ke laporan laba rugi konsolidasian	(Dibebankan) dikreditkan ke laporan komprehensif lain konsolidasian	(Dibebankan) dikreditkan ke ekuitas	31 Desember 2016
Perusahaan					
Aset pajak tangguhan:					
Beban pensiun dan beban imbalan pasca kerja lainnya berkala bersih	335	102	126	-	563
Provisi penurunan nilai piutang	429	(41)	-	-	388
Penyisihan beban karyawan	97	112	-	-	209
Pendapatan instalasi tangguhan	65	10	-	-	75
Beban yang masih harus dibayar dan provisi persediaan usang	211	(142)	-	-	69
Sewa pembiayaan	69	(68)	-	-	1
Jumlah aset pajak tangguhan	<u>1.206</u>	<u>(27)</u>	<u>126</u>	<u>-</u>	<u>1.305</u>
Liabilitas pajak tangguhan:					
Perbedaan nilai buku aset tetap menurut akuntansi dan pajak	(1.597)	825	-	-	(772)
Penilaian investasi jangka panjang	(45)	34	-	-	(11)
Hak atas tanah, aset takberwujud, dan lainnya	(23)	12	-	-	(11)
Jumlah liabilitas pajak tangguhan	<u>(1.665)</u>	<u>871</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(794)</u>
Jumlah aset pajak tangguhan Perusahaan - bersih	<u>(459)</u>	<u>844</u>	<u>126</u>	<u>-</u>	<u>511</u>
Telkomsel					
Aset pajak tangguhan:					
Penyisihan imbalan karyawan	349	55	74	-	478
Provisi penurunan nilai piutang	138	5	-	-	143
Jumlah aset pajak tangguhan	<u>487</u>	<u>60</u>	<u>74</u>	<u>-</u>	<u>621</u>
Liabilitas pajak tangguhan:					
Sewa pembiayaan	(385)	(164)	-	-	(549)
Perbedaan nilai buku aset tetap menurut akuntansi dan pajak	(1.395)	913	-	-	(482)
Aset takberwujud	(52)	4	-	-	(48)
Jumlah liabilitas pajak tangguhan	<u>(1.832)</u>	<u>753</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(1.079)</u>
Liabilitas pajak tangguhan - Telkomsel - bersih	<u>(1.345)</u>	<u>813</u>	<u>74</u>	<u>-</u>	<u>(458)</u>
Liabilitas pajak tangguhan - entitas anak lainnya - bersih	(306)	14	5	-	(287)
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	<u>(2.110)</u>	<u>1.286</u>	<u>79</u>	<u>-</u>	<u>(745)</u>
Aset pajak tangguhan - entitas anak lainnya - bersih	<u>201</u>	<u>50</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>258</u>
Aset pajak tangguhan - bersih	<u>201</u>	<u>435</u>	<u>129</u>	<u>4</u>	<u>769</u>

Pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016, jumlah agregat perbedaan temporer yang terkait dengan investasi pada entitas anak dan entitas asosiasi atas liabilitas pajak tangguhan yang belum diakui adalah masing-masing sebesar Rp35.298 miliar dan Rp34.568 miliar.

Realisasi dari aset pajak tangguhan tergantung kepada kemampuan Grup dalam menghasilkan laba di masa depan. Meskipun tidak ada jaminan atas realisasi tersebut, Grup yakin bahwa kemungkinan besar aset pajak tangguhan tersebut akan terealisasi melalui pengurangan atas laba fiskal masa depan ketika perbedaan temporer terpulihkan. Jumlah aset pajak tangguhan tersebut diperkirakan dapat direalisasi, namun bisa berkurang jika laba fiskal di masa depan lebih kecil dari pada yang diestimasikan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. PERPAJAKAN (lanjutan)

h. Administrasi

Sejak tahun 2008 hingga 2016, secara berturut-turut Perusahaan berhak memperoleh insentif pengurangan tarif pajak sebesar 5% karena telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.81 tahun 2007 sebagaimana telah diubah PP No.77 tahun 2013 dan diubah terakhir dengan PP No.56 tahun 2015, serta Peraturan Menteri Keuangan No.238/PMK.03/2008. Berdasarkan hal tersebut untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, Perusahaan menghitung pajak tangguhannya dengan menggunakan tarif 20%.

Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia mengatur bahwa Grup menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang secara individu. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, DJP dapat menetapkan atau mengubah jumlah pajak terutang dalam jangka waktu tertentu. Untuk tahun pajak 2007 dan sebelumnya, jangka waktu tersebut adalah sepuluh tahun sejak saat terutangnya pajak tetapi tidak lebih dari tahun 2013, sedangkan untuk tahun pajak 2008 dan seterusnya, jangka waktunya adalah lima tahun sejak saat terutangnya pajak.

Menteri Keuangan Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan No.85/PMK.03/2012 tanggal 6 Juni 2012 sebagaimana telah diubah oleh PMK No.136/PMK.03/2012 tanggal 16 Agustus 2012 tentang penunjukan BUMN untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atau PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ("PPnBM") yang berlaku efektif pada 1 Juli 2012 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 224/PMK.011/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang penunjukan kembali BUMN sebagai pemungut PPh Pasal 22 sebagaimana telah diubah terakhir oleh PMK No.16/PMK.010/2016 tanggal 3 Februari 2016. Perusahaan telah melakukan pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN dan PPnBM serta PPh 22 sesuai dengan peraturan tersebut.

27. LABA PER SAHAM DASAR DAN DILUSIAN

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp6.688 miliar dan Rp4.587 miliar dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar sejumlah 99.062.216.600 dan 98.175.853.600 masing-masing untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dan 2016. Jumlah rata-rata tertimbang juga memperhitungkan rata-rata tertimbang atas dampak transaksi modal saham yang diperoleh kembali dalam perubahan transaksi pembelian saham kembali selama tahun berjalan.

Laba per saham dasar masing-masing sejumlah Rp67,51 dan Rp46,72 (dalam jumlah penuh) untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dan 2016.

Perusahaan tidak memiliki instrumen keuangan yang berpotensi dilutif untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dan 2016.'

28. DIVIDEN KAS DAN CADANGAN UMUM

Berdasarkan hasil RUPST Perusahaan yang dinyatakan dalam akta notaris Ashoya Ratam, S.H., MKn. No. 50 tertanggal 22 April 2016, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pembagian dividen kas dan spesial dividen kas untuk 2015 masing-masing sebesar Rp7.744 miliar (Rp78,86 per lembar saham) dan Rp1.549 miliar (Rp15,77 per lembar saham). Pada tanggal 26 Mei 2016, Perusahaan telah melakukan pembayaran dividen kas dan spesial dividen kas sebesar Rp9.293 miliar.

Pada tanggal 27 Desember 2016, Perusahaan telah melakukan pembayaran dividen interim sebesar Rp1.920 miliar atau sebesar Rp19,38 lembar per saham

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. DIVIDEN KAS DAN CADANGAN UMUM (lanjutan)

Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya

Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Perusahaan diharuskan untuk membuat penyisihan cadangan wajib hingga sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh.

Saldo laba dicadangkan Perusahaan pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing adalah sebesar Rp15.337 miliar.

29. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA

Rincian liabilitas manfaat pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya adalah sebagai berikut:

	Catatan	31 Maret 2017	31 Desember 2016
Beban manfaat pensiun dibayar di muka			
Perusahaan - <i>funded</i>	29a.i.a	102	197
MDM		1	1
Infomedia		1	1
Beban manfaat pensiun dibayar di muka		104	199
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya			
Pensiun			
Perusahaan - <i>unfunded</i>	29a.i.b	2.475	2.507
Telkomsel	29a.ii	1.255	1.193
Patrakom		0	0
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun		3.730	3.700
Imbalan kesehatan pasca kerja	29b	1.668	1.592
Imbalan pasca kerja lainnya	29c	498	502
Kewajiban pensiun berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan	29d	346	332
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya		6.242	6.126

Beban manfaat yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

	Catatan	2017	2016
Beban pensiun			
Perusahaan - <i>funded</i>	29a.i.a	95	61
Perusahaan - <i>unfunded</i>	29a.i.b	60	70
Telkomsel	29a.ii	62	56
MDM		-	-
Infomedia		-	-
Patrakom		-	-
Beban pensiun	23	217	187
Beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala bersih	23,29b	76	-
Beban imbalan pasca kerja lainnya	23,29c	11	46
Beban pensiun berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan	23,29d	16	12
Jumlah		320	245

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. Pensiun dan Imbalan Pasca Kerja Lainnya (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun

i. Perusahaan

a. *Funded*

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti bagi karyawan tetap yang mulai bekerja sebelum 1 Juli 2002. Manfaat pensiun yang dibayar dihitung berdasarkan gaji pokok pada saat mulai pensiun dan masa kerja karyawan. Program pensiun ini diatur didalam undang-undang pensiun Indonesia dan dikelola oleh Dana Pensiun Telkom ("Dapen"). Karyawan yang ikut serta dalam program pensiun ini membayar kontribusi 18% (sebelum Maret 2003: 8,4%) dari gaji pokok ke dana pensiun. Pembayaran kontribusi Perusahaan ke dana pensiun untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp nihil.

Tabel berikut ini menyajikan perubahan liabilitas manfaat pensiun, perubahan aset program pensiun, status pendanaan program pensiun dan jumlah bersih yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016 untuk program pensiun manfaat pasti:

	<u>31 Maret 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Perubahan liabilitas manfaat pensiun		
Liabilitas manfaat pensiun pada awal tahun	18.849	16.505
Dibebankan pada laba rugi:		
Beban jasa	84	363
Beban jasa lalu - perubahan program	-	245
Beban bunga	365	1.444
Kontribusi peserta program pensiun	11	44
(Laba) rugi aktuarial	623	1.680
Pembayaran pensiun	(305)	(1.432)
Penyelesaian	-	-
Liabilitas manfaat pensiun pada akhir tahun	<u>19.627</u>	<u>18.849</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. PENSIIUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun (lanjutan)

i. Perusahaan (lanjutan)

a. *Funded* (lanjutan)

	31 Maret 2017	31 Desember 2016
Perubahan aset program pensiun		
Nilai wajar aset program pensiun pada awal tahun	19.046	17.834
Pendapatan bunga	369	1.458
Pengembalian aset program pensiun (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	623	1.188
Kontribusi peserta program pensiun	11	44
Pembayaran pensiun	(305)	(1.432)
Beban administrasi program	(15)	(46)
Nilai wajar aset program pensiun pada akhir tahun	<u>19.729</u>	<u>19.046</u>
Status pendanaan	102	197
Dampak batas atas aset	-	-
Beban manfaat pensiun dibayar di muka	<u>102</u>	<u>197</u>

Pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016, aset program sebagian besar terdiri dari:

	31 Maret 2017		31 Desember 2016	
	Harga kuotasian di pasar aktif	Tidak memiliki harga kuotasian	Harga kuotasian di pasar aktif	Tidak memiliki harga kuotasian
Kas dan setara kas	1.386	-	1.064	-
Instrumen ekuitas				
Keuangan	1.039	-	1.039	-
Barang konsumen	1.238	-	1.206	-
Infrastruktur, peralatan dan transportasi	579	-	536	-
Konstruksi, properti and real estat	482	-	577	-
Industri dasar dan bahan kimia	130	-	130	-
Perdagangan, jasa dan investasi	292	-	216	-
Tambang	64	-	62	-
Agrikultur	65	-	71	-
Industri lainnya	370	-	361	-
Reksadana berbasis saham	1.291	-	1.296	-
Instrumen keuangan pendapatan tetap				
Obligasi korporasi	-	3.978	-	3.817
Obligasi pemerintah	8.157	-	7.978	-
Reksadana	30	-	30	-
Saham non publik:				
Penempatan langsung	-	174	-	174
Properti	-	187	-	188
Lainnya	-	268	-	301
Total	<u>15.123</u>	<u>4.607</u>	<u>14.566</u>	<u>4.480</u>

Aset program pensiun termasuk didalamnya saham Seri B yang dikeluarkan oleh Perusahaan dengan nilai wajar Rp402 miliar dan Rp395 miliar, yang mewakili 2,04% dan 2,07% dari total aset program pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016, dan obligasi yang dikeluarkan oleh Perusahaan dengan nilai wajar masing-masing senilai Rp327 miliar dan Rp311 miliar mewakili 1,66% dan 1,63% dari total aset per tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun (lanjutan)

i. Perusahaan (lanjutan)

a. *Funded* (lanjutan)

Perkiraan pengembalian ditentukan berdasarkan ekspektasi pasar untuk pengembalian keseluruhan masa liabilitas dengan mempertimbangkan perpaduan portofolio dari aset program. Hasil aktual aset program adalah Rp978 miliar dan Rp2.600 miliar masing-masing untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Berdasarkan Peraturan Perusahaan yang diterbitkan tanggal 14 Januari 2014 mengenai kebijakan pendanaan Dapen, Perusahaan tidak akan memberikan kontribusi ke Dapen bila Rasio Kecukupan Pendanaan (RKD) Dapen diatas 105%. Berdasarkan laporan keuangan Dapen pada tanggal 31 Maret 2017, RKD Dapen diatas 105%. Oleh karena itu, Perusahaan memperkirakan tidak akan memberikan kontribusi pemberi kerja ke program pensiun manfaat pasti di tahun 2017.

Berdasarkan Peraturan Perusahaan yang diterbitkan tanggal 1 Juli 2014 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Telkom, terdapat kenaikan manfaat bulanan yang diberikan kepada pensiunan, janda/duda atau anak dari peserta yang berhenti bekerja sebelum akhir Juni 2002.

Selama tahun 2015, Perusahaan melakukan penyelesaian kepada pensiunan, janda/duda atau anak dari peserta yang manfaat pensiun bulannya dibawah Rp1.500.000 dan memilih untuk mengambil manfaat pensiun secara sekaligus.

Berdasarkan Peraturan Perusahaan yang diterbitkan tanggal 24 Juni 2016 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Telkom, terdapat kenaikan manfaat pensiun yang diberikan kepada janda/duda/anak dari peserta sebelum 20 April 1992 dari semula 60% menjadi 75% dari manfaat pensiun yang diterima pensiunan berlaku terhitung sejak 1 Januari 2016. Selain itu, Perusahaan juga memberikan manfaat lain yang hanya diberikan di tahun 2016 yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pensiunan. Perusahaan memberikan manfaat lain sebesar Rp6 juta kepada penerima manfaat pensiun bulanan dari peserta yang berhenti bekerja sebelum akhir bulan Juni 2002 dan Rp3 juta kepada penerima manfaat pensiun bulanan dari peserta yang berhenti bekerja sejak akhir bulan Juni 2002 sampai dengan akhir Mei 2016.

Mutasi beban manfaat pensiun dibayar di muka selama periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Maret 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Beban manfaat pensiun dibayar di muka pada awal tahun	197	1.329
Beban pensiun berkala bersih	(95)	(640)
Laba (rugi) aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	(623)	(1.680)
Batas atas yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	-	-
Pengembalian aset program pensiun (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	623	1.188
Beban manfaat pensiun dibayar di muka pada akhir tahun	<u>102</u>	<u>197</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. Pensiun dan Imbalan Pasca Kerja Lainnya (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun (lanjutan)

i. Perusahaan (lanjutan)

a. *Funded* (lanjutan)

Komponen beban pensiun berkala bersih untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dan 2016 sebagai berikut:

	2017	2016
Beban jasa	84	80
Beban jasa lalu - perubahan program	-	-
Beban administrasi program	15	12
Beban bunga bersih	(4)	(31)
Penyelesaian	-	-
Beban pensiun berkala bersih	95	61
Dibebankan kepada entitas anak berdasarkan perjanjian	-	-
Beban pensiun berkala bersih dikurangi jumlah yang dibebankan kepada entitas anak	95	61

Jumlah yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya adalah sebagai berikut:

	2017	2016
(Laba) rugi aktuarial yang diakui pada tahun berjalan	623	895
Dampak batas atas aset	-	-
Pengembalian aset program pensiun (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	(623)	(895)
Jumlah bersih	-	-

Penilaian aktuarial atas program pensiun manfaat pasti dilakukan berdasarkan perhitungan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, pada laporan masing-masing tertanggal 22 Februari 2017 dan 25 Februari 2016 yang dilakukan oleh PT Towers Watson Purbajaga ("TWP"), aktuaris independen yang berasosiasi dengan Willis Towers Watson ("WTW") (dahulu Towers Watson). Asumsi dasar aktuarial yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

	2016	2015
Tingkat diskonto	8,00%	9,00%
Tingkat kenaikan kompensasi	8,00%	8,00%
Tingkat angka kematian di Indonesia	2011	2011

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. PENSIIUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun (lanjutan)

i. Perusahaan (lanjutan)

b. *Unfunded*

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti tanpa pendanaan dan program pensiun iuran pasti untuk karyawannya.

Program pensiun iuran pasti diselenggarakan bagi karyawan tetap yang mulai bekerja pada atau setelah tanggal 1 Juli 2002. Program ini dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK"). Kontribusi Perusahaan kepada DPLK dihitung berdasarkan persentase tertentu dari gaji karyawan dimana untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp3 miliar dan Rp9 miliar.

Sejak tahun 2007, Perusahaan memberlakukan manfaat pensiun berdasarkan *uniformulation* bagi peserta sebelum 20 April 1992 dan peserta sejak 20 April 1992 yang mulai diterapkan bagi karyawan yang akan pensiun terhitung sejak 1 Februari 2009. Pada tahun 2010, Perusahaan menggantikan *uniformulation* dengan Manfaat Pensiun Sekaligus ("MPS"). MPS diberikan bagi karyawan yang telah mencapai usia pensiun, kematian, atau cacat sejak 1 Februari 2009.

Perusahaan juga menyelenggarakan manfaat bagi karyawan yang akan memasuki masa persiapan pensiun, dimana karyawan tidak aktif selama periode 6 bulan sebelum mencapai usia pensiun yakni 56 tahun yang disebut dengan Masa Persiapan Pensiun ("MPP"). Selama periode tersebut, karyawan tetap menerima manfaat-manfaat yang diselenggarakan bagi pegawai aktif, diantaranya termasuk, namun tidak terbatas pada gaji regular, kesehatan, cuti besar, bonus dan manfaat-manfaat lainnya. Sejak tahun 2012, Perusahaan memberlakukan ketentuan baru MPP yang mulai diterapkan bagi karyawan yang akan pensiun terhitung sejak 1 April 2012, dimana karyawan harus mengajukan permohonan MPP terlebih dahulu dan apabila tidak mengajukan MPP, maka dianggap tetap akan bekerja sampai dengan masa pensiun.

Tabel berikut ini menyajikan perubahan liabilitas program pensiun manfaat pasti tanpa pendanaan MPS dan MPP untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016:

	<u>31 Maret 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun tanpa pendanaan pada awal tahun	2.507	2.500
Beban jasa	13	64
Beban bunga	47	215
Rugi aktuarial diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	-	119
Pembayaran manfaat oleh pemberi kerja	(92)	(391)
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun tanpa pendanaan pada akhir tahun	<u>2.475</u>	<u>2.507</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. PENSIIUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun (lanjutan)

- i. Perusahaan (lanjutan)
- b. *Unfunded* (lanjutan)

Komponen biaya manfaat pensiun untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Beban jasa	13	16
Beban bunga bersih	47	54
Jumlah	60	70

Nilai yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2017 dan 2016 masing-masing sejumlah Rp nihil.

Penilaian aktuarial atas program pensiun manfaat pasti dilakukan berdasarkan perhitungan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, pada laporan masing-masing tertanggal 22 Februari 2017 dan 25 Februari 2016 yang dilakukan oleh TWP, aktuaris independen yang berasosiasi dengan WTW. Asumsi dasar aktuarial yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 untuk setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

	2016	2015
Tingkat diskonto	7,75% - 8,00%	9,00%
Tingkat kenaikan kompensasi	6,10% - 8,00%	bervariasi
Tabel tingkat angka kematian di Indonesia	2011	2011

ii. Telkomsel

Telkomsel menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti bagi para karyawannya. Berdasarkan program ini, para karyawan berhak atas manfaat pensiun berdasarkan gaji dasar terakhir atau gaji bersih yang diterima dan masa kerja karyawan. Program pensiun ini dikelola oleh PT Asuransi Jiwasraya ("Jiwasraya"), perusahaan asuransi jiwa milik negara, di bawah suatu kontrak asuransi anuitas. Sampai dengan tahun 2004, kontribusi karyawan terhadap program ini adalah sebesar 5% dari gaji pokok bulanan dan kontribusi atas sisa jumlah yang diperlukan untuk mendanai program tersebut ditanggung oleh Telkomsel. Mulai tahun 2005, kontribusi ditanggung sepenuhnya oleh Telkomsel.

Kontribusi Telkomsel ke Jiwasraya Rp nihil miliar dan Rp83 miliar masing-masing untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. Pensiun dan Imbalan Pasca Kerja Lainnya (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun (lanjutan)

ii. Telkomsel (lanjutan)

Tabel berikut ini menyajikan perubahan liabilitas manfaat pensiun, perubahan aset program pensiun, status pendanaan program pensiun dan nilai bersih yang tercatat pada laporan posisi keuangan konsolidasian untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 untuk program pensiun manfaat pasti.

	<u>31 Maret 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Perubahan liabilitas manfaat pensiun		
Liabilitas manfaat pensiun pada awal tahun	2.034	1.415
Dibebankan pada laba rugi:		
Beban jasa	37	107
Beban bunga	43	130
(Laba) rugi aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	-	392
Pembayaran pensiun	-	(10)
Liabilitas manfaat pensiun pada akhir tahun	<u>2.114</u>	<u>2.034</u>
Perubahan aset program pensiun		
Nilai wajar aset program pensiun pada awal tahun	841	612
Pendapatan bunga	18	56
Pengembalian aset program pensiun (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	-	100
Kontribusi pemberi kerja	-	83
Pembayaran pensiun	-	(10)
Nilai wajar aset program pensiun pada akhir tahun	<u>859</u>	<u>841</u>
Status pendanaan	<u>(1.255)</u>	<u>(1.193)</u>
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun	<u>(1.255)</u>	<u>(1.193)</u>

Perubahan liabilitas diestimasi manfaat pensiun untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016:

	<u>31 Maret 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun pada awal tahun	1.193	803
Beban manfaat pensiun	62	181
(Laba) rugi aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	-	392
Pengembalian aset program pensiun (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	-	(100)
Kontribusi pemberi kerja	-	(83)
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun pada akhir tahun	<u>1.255</u>	<u>1.193</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. Pensiun dan Imbalan Pasca Kerja Lainnya (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun (lanjutan)

ii. Telkomsel (lanjutan)

Komponen biaya manfaat pensiun untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Beban jasa	37	27
Beban bunga bersih	25	29
Jumlah	<u>62</u>	<u>56</u>

Jumlah yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp nihil.

Penilaian aktuarial atas program pensiun manfaat pasti dilakukan berdasarkan perhitungan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 dengan laporan tertanggal masing-masing 7 Februari 2017 dan 12 Februari 2016 yang dilakukan oleh TWP, aktuaris independen yang berasosiasi dengan WTW. Asumsi dasar aktuarial yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Tingkat diskonto	8,25%	9,25%
Tingkat kenaikan kompensasi	8,00%	8,00%
Tabel tingkat angka kematian di Indonesia	2011	2011

b. Imbalan kesehatan pasca kerja

Perusahaan menyelenggarakan program imbalan kesehatan pasca kerja untuk semua karyawannya yang sudah bekerja sebelum tanggal 1 November 1995 dengan masa kerja 20 tahun atau lebih pada saat pensiun, dan anggota keluarganya yang memenuhi syarat. Ketentuan untuk masa kerja selama 20 tahun ini tidak berlaku bagi karyawan yang memasuki masa pensiun sebelum tanggal 3 Juni 1995. Program ini tidak berlaku bagi karyawan yang mulai bekerja pada Perusahaan sejak tanggal 1 November 1995. Program jaminan kesehatan pasca kerja tersebut dikelola oleh Yakes.

Program imbalan kesehatan pasca kerja iuran pasti diselenggarakan bagi karyawan tetap yang mulai bekerja pada atau setelah tanggal 1 November 1995 atau karyawan dengan masa kerja kurang dari 20 tahun pada saat pensiun. Kontribusi pembayaran Perusahaan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp19 dan Rp nihil.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

b. Imbalan kesehatan pasca kerja

Tabel berikut ini menyajikan perubahan liabilitas imbalan kesehatan pasca kerja, perubahan aset program imbalan kesehatan pasca kerja, status pendanaan program imbalan kesehatan pasca kerja, dan jumlah bersih yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian Perusahaan pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016:

	<u>31 Maret 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Perubahan liabilitas imbalan kesehatan pasca kerja		
Liabilitas diestimasi imbalan kesehatan pasca kerja pada awal tahun	13.357	10.942
Dibebankan pada laba rugi:		
Beban jasa	-	9
Beban bunga	279	994
(Laba) rugi aktuarial	618	1.828
Pembayaran imbalan kesehatan pasca kerja	<u>(121)</u>	<u>(416)</u>
Liabilitas diestimasi imbalan kesehatan pasca kerja pada akhir tahun	<u>14.133</u>	<u>13.357</u>
Perubahan aset program		
Nilai wajar aset program pada awal tahun	11.765	10.824
Pendapatan bunga	245	982
Pengembalian aset program (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	618	519
Pembayaran imbalan kesehatan pasca kerja	(121)	(416)
Beban administrasi program	<u>(42)</u>	<u>(144)</u>
Nilai wajar aset program pada akhir tahun	<u>12.465</u>	<u>11.765</u>
Status pendanaan	<u>(1.668)</u>	<u>(1.592)</u>
Liabilitas diestimasi imbalan kesehatan pasca kerja	<u>(1.668)</u>	<u>(1.592)</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

b. Imbalan kesehatan pasca kerja (lanjutan)

Pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016, aset program terdiri dari:

	31 Maret 2017		31 Desember 2016	
	Harga kuotasian di pasar aktif	Tidak memiliki harga kuotasian	Harga kuotasian di pasar aktif	Tidak memiliki harga kuotasian
Kas dan setara kas	931	-	894	-
Saham publik:				
Manufaktur dan konsumen	754	-	754	-
Industri keuangan	609	-	540	-
Konstruksi	317	-	351	-
Infrastruktur dan telekomunikasi	310	-	245	-
Grosir	91	-	101	-
Tambang	27	-	27	-
Industri lainnya:				
Jasa	25	-	17	-
Agrikultur	36	-	44	-
Bioteknologi dan industri farmasi	72	-	6	-
Lainnya	2	-	2	-
Reksadana berbasis ekuitas	1.290	-	1.311	-
Instrumen keuangan pendapatan tetap:				
Reksadana pendapatan tetap	7.486	-	7.241	-
Saham non-publik:				
Penempatan privat	-	244	-	232
Lainnya	-	271	-	-
Total	11.950	515	11.533	232

Aset program Yakes juga termasuk saham Seri B yang diterbitkan Perusahaan dengan nilai wajar sebesar Rp178 miliar dan Rp217 miliar yang merupakan 1,46% dan 1,84% dari keseluruhan aset program masing-masing pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016.

Perkiraan pengembalian ditentukan berdasarkan ekspektasi pasar untuk pengembalian keseluruhan masa liabilitas dengan mempertimbangkan perpaduan portofolio dari aset program. Hasil aktual aset program adalah Rp821 miliar dan Rp1.357 miliar masing-masing untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Perubahan liabilitas diestimasi imbalan kesehatan pasca kerja untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016:

	31 Maret 2017	31 Desember 2016
Liabilitas diestimasi imbalan kesehatan pasca kerja pada awal tahun	1.592	118
Beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala	76	165
(Laba) rugi aktuarial yang diakui di penghasilan komprehensif lainnya	618	1.828
Pengembalian aset program (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	(618)	(519)
Liabilitas diestimasi imbalan kesehatan pasca kerja pada akhir tahun	1.668	1.592

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

b. Imbalan kesehatan pasca kerja (lanjutan)

Komponen beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala bersih untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Beban jasa	-	2
Beban administrasi program	42	41
Beban bunga bersih	34	3
Jumlah beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala	76	46
Dibebankan kepada entitas anak berdasarkan perjanjian	-	-
Beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala bersih dikurangi jumlah yang dibebankan kepada entitas anak	76	46

Jumlah yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	2017	2017
(Laba) rugi aktuarial yang diakui pada tahun berjalan	618	496
Pengembalian aset program pensiun (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	(618)	(496)
Jumlah bersih	-	-

Penilaian aktuarial untuk program imbalan kesehatan pasca kerja dilakukan berdasarkan perhitungan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 pada laporan masing-masing tertanggal 22 Februari 2017 dan 25 Februari 2016 yang dilakukan oleh TWP, aktuaris independen yang berasosiasi dengan WTW. Asumsi dasar aktuarial yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

	2016	2015
Tingkat diskonto	8,50%	9,25%
Tingkat pertumbuhan beban kesehatan untuk tahun depan	7,00%	7,00%
Tingkat tren beban kesehatan	7,00%	7,00%
Tahun tingkat tren beban kesehatan tercapai	2017	2016
Tabel tingkat kematian di Indonesia	2011	2011

c. Imbalan pasca kerja lainnya

Perusahaan memberikan imbalan pasca kerja lainnya dalam bentuk uang tunai yang dibayarkan pada saat karyawan pensiun atau saat pemutusan hubungan kerja. Imbalan pasca kerja lainnya tersebut adalah Biaya Fasilitas Perumahan Terakhir (BFPT) dan Biaya Perjalanan Pensiun dan Purnabhakti (BPP).

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

c. Imbalan pasca kerja lainnya (lanjutan)

Perubahan liabilitas diestimasi imbalan pasca kerja lainnya untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016:

	<u>31 Maret 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Liabilitas diestimasi imbalan pasca kerja lainnya pada awal tahun	502	497
Dibebankan pada laba rugi:		
Beban jasa kini	2	7
Beban bunga bersih	9	41
Rugi aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	-	20
Pembayaran manfaat oleh Perusahaan	(15)	(63)
Liabilitas diestimasi imbalan pasca kerja lainnya pada akhir tahun	<u>498</u>	<u>502</u>

Komponen beban imbalan pasca kerja lainnya untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dan 2016:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Beban jasa	2	2
Beban bunga bersih	9	10
Jumlah	<u>11</u>	<u>12</u>

Nilai yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp nihil.

Penilaian aktuarial untuk program imbalan pasca kerja lainnya dilakukan berdasarkan perhitungan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, pada laporan masing-masing tertanggal 22 Februari 2017 dan 25 Februari 2016 yang dilakukan oleh TWP, aktuaris independen yang berasosiasi dengan WTW. Asumsi dasar aktuarial yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Tingkat diskonto	7,75%	9,00%
Tabel tingkat kematian di Indonesia	2011	2011

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. Pensiun dan Imbalan Pasca Kerja Lainnya (lanjutan)

d. Kewajiban pensiun berdasarkan UU Ketenagakerjaan

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan, Perusahaan dan entitas anak diharuskan untuk memberikan manfaat pensiun minimum, jika belum dipenuhi oleh program pensiun yang diselenggarakan, kepada para karyawannya yang mencapai usia pensiun. Jumlah tercatat kewajiban tambahan ini pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp346 miliar dan Rp332 miliar. Beban pensiun yang dibebankan adalah masing-masing sebesar Rp16 miliar dan Rp12 miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dan 2016 (Catatan 23).

e. Profil jatuh tempo atas liabilitas manfaat pasti

Waktu perkiraan pembayaran manfaat dan rata-rata tertimbang durasi atas liabilitas manfaat pasti untuk 2016 adalah sebagai berikut (dalam miliaran Rupiah):

Jangka waktu	Perkiraan pembayaran manfaat				
	Perusahaan		Telkomsel	Imbalan	
	Funded	Unfunded		kesehatan pasca kerja	Imbalan pasca kerja lainnya
Dalam 10 tahun kedepan	16.583	2.822	1.653	6.152	563
Dalam 10-20 tahun	20.052	263	6.257	8.401	139
Dalam 20-30 tahun	17.289	29	5.758	8.648	47
Dalam 30-40 tahun	11.827	5	936	6.711	3
Dalam 40-50 tahun	2.872	-	-	2.986	-
Dalam 50-60 tahun	238	-	-	245	-
Dalam 60-70 tahun	9	-	-	1	-
Dalam 70-80 tahun	-	-	-	-	-
Rata-rata tertimbang durasi atas liabilitas manfaat pasti	9,15 tahun	4,33 tahun	11,33 tahun	13,81 tahun	3,62 tahun

f. Analisis sensitivitas

Perubahan 1% pada tingkat diskonto dan tingkat gaji akan memberikan dampak sebagai berikut:

Sensitivitas	Tingkat Diskonto		Tingkat gaji	
	Peningkatan 1%	Penurunan 1%	Peningkatan 1%	Penurunan 1%
	Jumlah peningkatan (penurunan)		Jumlah peningkatan (penurunan)	
Didanai	(1.644)	1.937	400	(413)
Tidak didanai	(67)	72	69	(69)
Telkomsel	(112)	121	120	(112)
Imbalan kesehatan pasca kerja	(1.633)	1.991	2.152	(1.785)
Imbalan pasca kerja lainnya	(16)	17	-	-

Analisis sensitivitas dilakukan dengan menggunakan metode yang mengekstrapolasi dampak atas liabilitas manfaat pasti sebagai akibat perubahan atas asumsi utama yang muncul pada akhir periode pelaporan.

Hasil sensitivitas tersebut diatas menentukan dampak secara individu atas liabilitas manfaat pasti masing-masing program pada akhir tahun. Dalam kenyataannya, setiap program bergantung pada beberapa hal lain eksternal yang dapat menyebabkan liabilitas manfaat pasti bergerak baik searah maupun berlawanan, dan sensitivitas setiap program dapat berubah secara bervariasi dari waktu ke waktu.

Tidak terdapat perubahan metode dan asumsi yang digunakan dalam menghitung analisis sensitivitas dari periode sebelumnya.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30. PENGHARGAAN MASA KERJA (“LONG SERVICE AWARDS” atau “LSA”)

Telkomsel dan Patrakom memberikan penghargaan dalam bentuk uang tunai atau sejumlah hari cuti tertentu kepada karyawan yang telah memenuhi syarat masa kerja tertentu, termasuk LSA dan LSL. LSA diberikan saat karyawan mencapai kelipatan tahun tertentu atau saat pemutusan hubungan kerja. LSL dalam bentuk sejumlah hari cuti atau uang tunai, tergantung persetujuan manajemen, diberikan kepada karyawan yang memenuhi syarat masa kerja dan dengan usia minimum tertentu.

Liabilitas yang timbul sehubungan dengan penghargaan ini ditentukan berdasarkan perhitungan aktuarial dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*, sebesar Rp614 miliar dan Rp613 miliar masing-masing pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016. Manfaat yang dibebankan adalah sebesar Rp30 miliar dan Rp27 miliar masing-masing untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dan 2016 (Catatan 23).

31. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

a. Hubungan dan sifat saldo akun/transaksi dengan pihak berelasi

Rincian hubungan dan sifat akun/transaksi dengan pihak berelasi yang signifikan adalah sebagai berikut:

Pihak Berelasi	Hubungan	Sifat Saldo Akun/ Transaksi
Pemerintah Menteri Keuangan	Pemegang saham utama	Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, penghasilan pendanaan, biaya pendanaan, investasi pada instrumen keuangan
BUMN	Entitas sepengendali	Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, beban operasi, pembelian aset tetap
Indosat	Entitas sepengendali	Pendapatan interkoneksi, pendapatan sewa jaringan, pendapatan atas penggunaan satelit transponder, beban interkoneksi, beban penggunaan fasilitas telekomunikasi, beban operasional dan pemeliharaan, beban atas penggunaan data jaringan sistem komunikasi
PT Applikanusa Lintasarta ("Lintasarta")	Entitas sepengendali	Pendapatan interkoneksi, pendapatan jasa jaringan, beban layanan sirkuit langganan, dan beban pemakaian sistem jaringan komunikasi
Indosat Mega Media	Entitas sepengendali	Pendapatan jasa jaringan
PT Perusahaan Listrik Negara ("PLN")	Entitas sepengendali	Beban listrik, penghasilan pendanaan, biaya pendanaan, investasi pada instrumen keuangan
PT Pertamina (Persero) ("Pertamina")	Entitas sepengendali	Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya
PT Kereta Api Indonesia ("KAI")	Entitas sepengendali	Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya
PT Pegadaian	Entitas sepengendali	Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya
PT Garuda Indonesia	Entitas sepengendali	Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya
PT Indonesia Comnet Plus ("ICON Plus")	Entitas sepengendali	Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, pendapatan interkoneksi, pendapatan jasa jaringan, beban interkoneksi
PT Asuransi Jasa Indonesia ("Jasindo")	Entitas sepengendali	Beban asuransi satelit dan beban asuransi kendaraan bermotor
PT Adhi Karya Tbk ("Adhi Karya")	Entitas sepengendali	Pembelian material dan jasa konstruksi
PT Waskita Karya Tbk ("Waskita")	Entitas sepengendali	Pembelian material dan jasa konstruksi
INTI	Entitas sepengendali	Pembelian aset tetap dan jasa konstruksi
LEN	Entitas sepengendali	Pembelian aset tetap dan jasa konstruksi
Bank milik negara	Entitas sepengendali	Penghasilan pendanaan dan biaya pendanaan

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

a. Hubungan dan sifat saldo akun/transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Pihak Berelasi	Hubungan	Sifat Saldo Akun/ Transaksi
BNI	Entitas sepengendali	Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, penghasilan pendanaan, dan biaya pendanaan
Bank Mandiri	Entitas sepengendali	Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, penghasilan pendanaan, dan biaya pendanaan
BRI	Entitas sepengendali	Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, penghasilan pendanaan, dan biaya pendanaan
BTN	Entitas sepengendali	Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, penghasilan pendanaan, dan biaya pendanaan
PT Bank Syariah Mandiri ("BSM")	Entitas sepengendali	Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, dan biaya pendanaan
PT Bank BRI Syariah ("BRI Syariah")	Entitas sepengendali	Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan telekomunikasi lainnya, dan biaya pendanaan
Bahana	Entitas sepengendali	Aset keuangan tersedia untuk dijual, dan obligasi dan wesel bayar
Sarana Mukti Infrastruktur CSM	Entitas sepengendali Entitas asosiasi	Biaya pendanaan Pendapatan atas penggunaan satelit transponder, pendapatan jasa jaringan dan beban sewa transmisi
Indonusa	Entitas asosiasi	Pendapatan jasa jaringan dan beban komunikasi data
PT Poin Multi Media Nusantara ("POIN")	Entitas asosiasi	Pembelian <i>handset</i>
Yakes	Entitas berelasi lainnya	Beban pengobatan
Koperasi Pegawai Telkom ("Kopeptel")	Entitas berelasi lainnya	Pembelian aset tetap, pembangunan dan instalasi, beban sewa bangunan, beban sewa mobil, pembelian mobil, dan pembelian barang dan jasa pembangunan, beban jasa pemeliharaan dan kebersihan, dan bagi hasil pendapatan PBH
PT Sandhy Putra Makmur ("SPM")	Entitas berelasi lainnya	Beban sewa bangunan, beban sewa mobil, pembelian barang dan jasa pembangunan, beban jasa pemeliharaan dan kebersihan
Koperasi Pegawai Telkomsel ("Kisel")	Entitas berelasi lainnya	Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, beban sewa mobil, beban pencetakan dan pendistribusian tagihan pelanggan, beban jasa penagihan, dan beban jasa-jasa lainnya, distribusi kartu SIM dan voucher prabayar dan pembelian aset tetap
PT Graha Informatika Nusantara ("Gratika")	Entitas berelasi lainnya	Pendapatan interkoneksi, pendapatan jasa jaringan, beban instalasi, beban pemeliharaan, dan pembelian aset tetap
PT Pembangunan Telekomunikasi Indonesia ("Bangtelindo")	Entitas berelasi lainnya	Pembelian aset tetap
Direksi dan Komisaris	Personil manajemen kunci	Gaji dan fasilitas

Jumlah saldo dari piutang dan utang usaha pada akhir tahun bebas dari bunga dan penyelesaiannya akan terjadi dalam bentuk kas. Tidak ada jaminan yang disediakan atau diterima untuk setiap piutang dan utang usaha dengan pihak berelasi. Pada tanggal 31 Maret 2017, Grup mencatat adanya penurunan nilai piutang dari pihak berelasi sebesar Rp(88) miliar. Penilaian ini dilakukan disetiap tahun dengan menilai status masa kini dari piutang yang ada dan historis penagihan piutang yang lalu.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

b. Transaksi dengan pihak berelasi

Berikut ini adalah transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi:

	2017		2016	
	Jumlah	% terhadap jumlah pendapatan	Jumlah	% terhadap jumlah pendapatan
PENDAPATAN				
Pemegang saham utama				
Pemerintah	53	0,17	32	0,12
Entitas sepengendali				
Indosat	392	1,26	269	0,98
BRI	77	0,25	48	0,17
Bank Mandiri	34	0,11	47	0,17
BTN	36	0,12	25	0,09
Pertamina	35	0,11	24	0,09
Lain-lain	280	0,89	161	0,59
Sub-jumlah	854	2,74	574	2,09
Lain-lain	17	0,05	132	0,48
Jumlah	924	2,96	738	2,69

	2017		2016	
	Jumlah	% terhadap jumlah beban	Jumlah	% terhadap jumlah beban
BEBAN				
Entitas sepengendali				
PLN	394	2,08	149	0,85
Indosat	212	1,12	238	1,37
Jasindo	67	0,35	62	0,36
Lain-lain	12	0,06	32	0,19
Sub-jumlah	685	3,60	481	2,77
Entitas berelasi lainnya				
Kisel	518	2,73	180	1,04
Kopegtel	108	0,57	115	0,67
Yakes	39	0,21	41	0,24
Lain-lain	31	0,15	-	0,00
Sub-jumlah	696	3,66	336	1,95
Lain-lain	35	0,18	72	0,42
Jumlah	1.416	7,44	889	5,14

	2017		2016	
	Jumlah	% terhadap jumlah penghasilan pendanaan	Jumlah	% terhadap jumlah penghasilan pendanaan
PENGHASILAN PENDANAAN				
Entitas sepengendali				
Bank milik negara	185	42,82	230	46,09
Lain-lain	1	0,23	1	0,20
Jumlah	186	43,05	231	46,29

	2017		2016	
	Jumlah	% terhadap jumlah biaya pendanaan	Jumlah	% terhadap jumlah biaya pendanaan
BIAYA PENDANAAN				
Pemegang saham utama				
Pemerintah	66	10,71	17	2,21
Entitas sepengendali				
Bank milik negara	782	126,95	312	40,52
Jumlah	848	137,66	329	42,73

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

b. Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Berikut ini adalah transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi (lanjutan):

	2017		2016	
	Jumlah	% terhadap jumlah pembelian	Jumlah	% terhadap jumlah pembelian
PEMBELIAN ASET TETAP (Catatan 9)				
Entitas sepengendali				
INTI	157	2,59	4	0,07
LEN	67	1,10	-	0,00
Sub-jumlah	224	3,69	4	0,07
Lain-lain	41	0,68	83	1,45
Jumlah	265	4,37	87	1,52
	2017		2016	
	Jumlah	% terhadap jumlah pendapatan	Jumlah	% terhadap jumlah pendapatan
Distribusi kartu SIM dan vaucer				
Entitas berelasi lainnya				
Kisel	1.068	3,44	1.094	3,97
Gratika	96	0,31	103	0,37
Tiphone	932	3,00	-	0,00
Jumlah	2.096	6,75	1.197	4,34
	31 Maret 2017		31 Desember 2016	
	Jumlah	% terhadap jumlah aset	Jumlah	% terhadap jumlah aset
a. Kas dan setara kas (Catatan 3)	20.689	11,03	17.477	9,73
b. Aset keuangan lancar lainnya (Catatan 4)	1.190	0,63	1.204	0,67
c. Piutang usaha - bersih (Catatan 5)	1.970	1,05	894	0,50
d. Uang muka dan beban dibayar di muka (Catatan 7)	15	0,01	93	0,05
e. Uang muka dan aset tidak lancar lainnya (Catatan 10)	455	0,24	310	0,17
	31 Maret 2017		31 Desember 2016	
	Jumlah	% terhadap jumlah liabilitas	Jumlah	% terhadap jumlah liabilitas
f. Utang usaha (Catatan 12)				
Entitas sepengendali				
INTI	719	0,96	625	0,84
Indosat	291	0,39	275	0,37
LEN	158	0,96	137	0,18
BUMN	70	0,09	60	0,08
Sub-jumlah	1.238	2,40	1.097	1,47
Entitas berelasi lainnya				
Kopegtel	95	0,13	170	0,23
Yakes	47	0,06	47	0,06
Lain-lain	66	0,09	85	0,11
Sub-jumlah	208	0,28	302	0,40
Lain-lain	45	0,06	148	0,21
Jumlah	1.491	2,74	1.547	2,08

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

b. Perjanjian signifikan dengan pihak berelasi (lanjutan)

Berikut ini adalah transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi (lanjutan):

	31 Maret 2017		31 Desember 2016	
	Jumlah	% terhadap jumlah liabilitas	Jumlah	% terhadap jumlah liabilitas
g. Beban yang masih harus dibayar (Catatan 13)				
Pemegang saham utama				
Pemerintah	19	0,03	12	0,02
Entitas sepengendali				
BUMN	132	0,18	127	0,17
Bank milik negara	36	0,05	52	0,07
Sub jumlah	168	0,23	179	0,24
Entitas berelasi lainnya				
Kisel	215	0,29	118	0,16
Lain-lain	5	0,01	5	0,01
Jumlah	407	0,56	314	0,43

	31 Maret 2017		31 Desember 2016	
	Jumlah	% terhadap jumlah liabilitas	Jumlah	% terhadap jumlah liabilitas
h. Uang muka pelanggan dan pemasok				
Pemegang saham utama				
Pemerintah	19	0,03	19	0,03
Entitas sepengendali				
PLN	-	-	12	0,02
Jumlah	19	0,03	31	0,05

	31 Maret 2017		31 Desember 2016	
	Jumlah	% terhadap jumlah liabilitas	Jumlah	% terhadap jumlah liabilitas
i. Utang bank jangka pendek (Catatan 15)	133	0,18	143	0,19
j. Pinjaman penerusan (Catatan 16a)	1.282	1,71	1.292	1,74
k. Utang bank jangka panjang (Catatan 16c)	6.977	9,29	6.325	8,54
l. Pinjaman lainnya (Catatan 16d)	697	0,93	697	0,94

c. Perjanjian signifikan dengan pihak berelasi

i. Pemerintah

Perusahaan memperoleh pinjaman penerusan dari Pemerintah (Catatan 16a).

ii. Indosat

Perusahaan mengadakan perjanjian dengan Indosat untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi internasional kepada masyarakat.

Perusahaan juga mengadakan perjanjian interkoneksi dengan Indosat antara jaringan telepon tidak bergerak ("Public Switched Telephone Network" atau "PSTN") milik Perusahaan dan jaringan telekomunikasi bergerak selular GSM milik Indosat dalam rangka penyelenggaraan jasa Indosat Multimedia Mobile serta penyelesaian hak dan liabilitas interkoneksi terkait.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

c. Perjanjian signifikan dengan pihak berelasi (lanjutan)

ii. Indosat (lanjutan)

Perusahaan juga mengadakan perjanjian dengan Indosat untuk interkoneksi jaringan telekomunikasi bergerak selular GSM milik Indosat dengan PSTN Perusahaan, yang memungkinkan pelanggan masing-masing perusahaan untuk melakukan panggilan domestik antara jaringan telekomunikasi bergerak selular GSM milik Indosat dan jaringan tidak bergerak Perusahaan, serta memungkinkan pelanggan Indosat untuk mengakses jasa SLI Perusahaan dengan menekan "007".

Perusahaan selama ini menangani pembuatan kuitansi tagihan dan melakukan penagihan kepada pelanggan untuk Indosat. Indosat secara bertahap akan mengambil alih kegiatan tersebut dan melakukan sendiri penerbitan kuitansi tagihan dan melakukan penagihan secara langsung. Perusahaan menerima kompensasi dari Indosat yang dihitung sebesar 1% dari jumlah yang ditagih oleh Perusahaan terhitung sejak tanggal 1 Januari 1995, ditambah dengan beban pemrosesan tagihan yang ditetapkan sebesar jumlah tertentu untuk setiap data (*record*). Pada tanggal 11 Desember 2008, Perusahaan dan Indosat sepakat untuk memberlakukan tarif biaya layanan SLI, besaran tarif tersebut telah memperhitungkan besaran kompensasi penerbitan kuitansi tagihan dan penagihan. Kesepakatan ini berlaku efektif mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2012 dan berlaku selanjutnya sampai ada Berita Acara Kesepakatan baru.

Pada tanggal 28 Desember 2006, Perusahaan dan Indosat menandatangani amandemen atas perjanjian kerja sama interkoneksi untuk jaringan tidak bergerak (lokal, SLJJ, dan internasional) dan jaringan bergerak dalam rangka implementasi liabilitas tarif berbasis biaya berdasarkan Peraturan Menkominfo No. 8 tahun 2006. Amandemen ini berlaku efektif mulai 1 Januari 2007.

Telkomsel juga mengadakan perjanjian dengan Indosat untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi internasional kepada pelanggan jaringan bergerak selular GSM.

Perusahaan menyediakan layanan sirkuit langganan kepada Indosat dan entitas anaknya, yaitu PT Indosat Mega Media dan Lintasarta. Saluran ini dapat digunakan perusahaan-perusahaan tersebut untuk hubungan telepon, telegraf, data, teleks, faksimili, atau jasa telekomunikasi lainnya.

iii. Lain-lain

Perusahaan mengadakan perjanjian dengan CSM dan Gratika untuk penggunaan transponder satelit atau kanal frekuensi satelit telekomunikasi sirkuit langganan Perusahaan.

Kisel adalah koperasi yang didirikan oleh karyawan Telkomsel, bergerak dalam jasa penyewaan kendaraan, pencetakan dan distribusi tagihan pelanggan, penagihan, dan jasa-jasa lainnya yang bermanfaat bagi Telkomsel. Telkomsel juga mengadakan perjanjian penjualan dengan Kisel untuk distribusi kartu SIM dan vauker pulsa isi ulang.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

d. Remunerasi personil manajemen kunci

Personil manajemen kunci adalah Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan.

Perusahaan memberikan remunerasi dalam bentuk honor dan fasilitas untuk keperluan tugas operasional Dewan Komisaris dan imbalan kerja jangka pendek berupa gaji dan fasilitas untuk keperluan tugas operasional Direksi. Jumlah tunjangan tersebut adalah sebagai berikut:

	2017		2016	
	Jumlah	% terhadap jumlah beban	Jumlah	% terhadap jumlah beban
Direksi	45	0,24%	146	0,84%
Dewan komisaris	14	0,07%	44	0,25%

32. SEGMENT OPERASI

Pada tahun 2017, Manajemen melakukan penataan kembali pengelolaan portofolio bisnis Grup dari pengelolaan menggunakan pendekatan berbasis kelompok pelanggan menjadi pendekatan berbasis Customer Facing Unit ("CFU") agar Grup dapat berfokus pada pasar pelanggan yang lebih spesifik. Hal ini diikuti dengan perubahan struktur organisasi Grup untuk mengakomodasi pengambilan keputusan dan melakukan penilaian kinerja berdasarkan pendekatan berbasis CFU. Perubahan manajemen dalam mengelola bisnis Grup dan perubahan struktur organisasi tersebut menyebabkan Manajemen sebagai pengambil keputusan operasional mengubah penyajian informasi segmen dari informasi segmen yang disajikan sebelumnya dalam laporan keuangan konsolidasian untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016. Informasi segmen dalam laporan keuangan konsolidasian untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 telah disajikan kembali agar sesuai dengan penyajian informasi segmen pada laporan keuangan konsolidasian untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017.

Grup memiliki lima segmen operasi utama, yaitu *mobile*, *consumer*, *enterprise*, *wholesale and internasional business* ("WIB"), dan lain-Lain. Segmen *mobile* menyediakan produk *mobile voice*, SMS, *value added service*, dan *mobile broadband*. Segmen *consumer* menyediakan jasa telepon tidak bergerak, TV berbayar, data, internet, dan jasa telekomunikasi lainnya yang diberikan kepada pelanggan perumahan. Segmen *enterprise* menyediakan solusi *end-to-end* ke pelanggan korporat dan institusional. Segmen WIB menyediakan jasa interkoneksi, sewa sirkuit, satelit, VSAT, *broadband access*, teknologi informasi, data dan jasa internet yang diberikan ke Other Licensed Operator dan pelanggan internasional. Segmen lain-lain terdiri dari beberapa segmen yang tidak memenuhi kriteria penyajian segmen dilaporkan, termasuk jasa pengelolaan gedung dan jasa layanan digital.

Manajemen memantau hasil operasi unit bisnis secara terpisah untuk tujuan pengambilan keputusan tentang alokasi sumber daya dan menilai kinerja. Kinerja segmen dinilai berdasarkan laba atau rugi usaha segmen yang diukur sesuai dengan laba atau rugi usaha dalam laporan keuangan konsolidasian.

Namun demikian, kegiatan pendanaan dan pajak penghasilan tidak dievaluasi secara terpisah dan tidak dialokasikan ke segmen operasi.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

32. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

Pendapatan dan beban segmen meliputi juga transaksi antar segmen operasi dan dinilai sebesar nilai pasar.

	2017					Jumlah sebelum eliminasi	Eliminasi	Jumlah konsolidasian
	Mobile	Consumer	Enterprise	WIB	Lain-lain			
Hasil segmen								
Pendapatan								
Pendapatan eksternal	21.554	2.636	5.056	1.660	116	31.022	-	31.022
Pendapatan antar segmen	<u>745</u>	<u>963</u>	<u>4.435</u>	<u>4.411</u>	<u>712</u>	<u>11.266</u>	<u>(11.266)</u>	
Jumlah pendapatan segmen	<u>22.299</u>	<u>3.599</u>	<u>9.491</u>	<u>6.071</u>	<u>828</u>	<u>42.288</u>	<u>(11.266)</u>	<u>31.022</u>
Beban								
Beban eksternal	(8.970)	(2.242)	(4.537)	(2.145)	(637)	(18.531)	-	(18.531)
Beban antar segmen	<u>(3.432)</u>	<u>(1.167)</u>	<u>(4.112)</u>	<u>(2.507)</u>	<u>(185)</u>	<u>(11.403)</u>	<u>11.403</u>	
Jumlah beban segmen	<u>(12.402)</u>	<u>(3.409)</u>	<u>(8.649)</u>	<u>(4.652)</u>	<u>(822)</u>	<u>(29.934)</u>	<u>11.403</u>	<u>(18.531)</u>
Hasil segmen	<u>9.897</u>	<u>190</u>	<u>842</u>	<u>1.419</u>	<u>6</u>	<u>12.354</u>	<u>137</u>	<u>12.491</u>
Informasi lain								
Pembelian barang modal	(3.102)	(1.502)	(751)	(665)	(46)	(6.066)	-	(6.066)
Penyusutan dan amortisasi	<u>(3.161)</u>	<u>(700)</u>	<u>(422)</u>	<u>(461)</u>	<u>(29)</u>	<u>(4.773)</u>	-	<u>(4.773)</u>
Provisi diakui selama periode berjalan	<u>(92)</u>	<u>(97)</u>	<u>(227)</u>	<u>(61)</u>	<u>(2)</u>	<u>(479)</u>	-	<u>(479)</u>
	2016							
	Mobile	Consumer	Enterprise	WIB	Lain-lain	Jumlah sebelum eliminasi	Eliminasi	Jumlah konsolidasian
Hasil segmen								
Pendapatan								
Pendapatan eksternal	19.578	2.399	4.053	1.209	303	27.542	-	27.542
Pendapatan antar segmen	<u>629</u>	<u>187</u>	<u>844</u>	<u>3.473</u>	<u>437</u>	<u>5.570</u>	<u>(5.570)</u>	
Jumlah pendapatan segmen	<u>20.207</u>	<u>2.586</u>	<u>4.897</u>	<u>4.682</u>	<u>740</u>	<u>33.112</u>	<u>(5.570)</u>	<u>27.542</u>
Beban								
Beban eksternal	(7.138)	(2.090)	(5.070)	(1.967)	(1.705)	(17.970)	-	(17.970)
Beban antar segmen	<u>(2.929)</u>	<u>(474)</u>	<u>(457)</u>	<u>(1.689)</u>	-	<u>(5.549)</u>	<u>5.549</u>	
Jumlah beban segmen	<u>(10.067)</u>	<u>(2.564)</u>	<u>(5.527)</u>	<u>(3.656)</u>	<u>(1.705)</u>	<u>(23.519)</u>	<u>5.549</u>	<u>(17.970)</u>
Hasil segmen	<u>10.140</u>	<u>22</u>	<u>(630)</u>	<u>1.026</u>	<u>(965)</u>	<u>9.593</u>	<u>(21)</u>	<u>9.572</u>
Informasi lain								
Pembelian barang modal	(2.823)	(1.720)	(258)	(811)	(105)	(5.717)	-	(5.717)
Penyusutan dan amortisasi	<u>(3.101)</u>	<u>(542)</u>	<u>(130)</u>	<u>(206)</u>	<u>(426)</u>	<u>(4.405)</u>	-	<u>(4.405)</u>
Provisi diakui selama periode berjalan	<u>(23)</u>	<u>35</u>	<u>97</u>	<u>101</u>	<u>(3)</u>	<u>207</u>	-	<u>207</u>

Informasi Geografis:

	2017	2016
Pendapatan eksternal		
Indonesia	30.455	27.043
Luar negeri	<u>567</u>	<u>499</u>
Jumlah	<u>31.022</u>	<u>27.542</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

32. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

Informasi pendapatan diatas berdasarkan lokasi pelanggan.

	<u>31 Maret 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Aset operasional tidak lancar		
Indonesia	116.315	115.216
Luar negeri	2.344	2.371
Jumlah	<u>118.659</u>	<u>117.587</u>

Aset operasional tidak lancar untuk tujuan segmen ini terdiri dari aset tetap dan aset takberwujud.

33. TARIF JASA TELEKOMUNIKASI

Berdasarkan UU No. 36 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2000, tarif penyelenggaraan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara berdasarkan jenis tarif, struktur dan dengan mengacu pada formula batasan tarif jasa telekomunikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

a. Tarif telepon tidak bergerak

Pemerintah telah mengeluarkan formula penyesuaian tarif baru yang diatur dalam Peraturan Menkominfo No. 15/PER/M.KOMINFO/4/2008 tanggal 30 April 2008 tentang "Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Teleponi Dasar yang Disalurkan melalui Jaringan Tetap". Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya No. 09/PER/M.KOMINFO/02/2006.

Berdasarkan peraturan tersebut, struktur tarif jasa teleponi dasar yang disalurkan melalui jaringan tetap terdiri dari:

- Biaya aktivasi
- Biaya berlangganan bulanan
- Biaya penggunaan
- Biaya fasilitas tambahan.

b. Tarif telepon selular

Pada tanggal 7 April 2008, Menkominfo menerbitkan Peraturan Menkominfo No. 09/PER/M.KOMINFO/04/2008 tentang "Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Telekomunikasi yang Disalurkan melalui Jaringan Bergerak Selular" yang memberikan pedoman untuk menentukan tarif selular dengan formula yang terdiri dari unsur biaya elemen jaringan dan biaya aktivitas layanan *retail*. Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya No. 12/PER/M.KOMINFO/02/2006.

Berdasarkan Peraturan Menkominfo No. 09/PER/M.KOMINFO/04/2008 tanggal 7 April 2008, jenis tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang disalurkan melalui jaringan bergerak selular dapat terdiri dari:

- Tarif jasa teleponi dasar
 - Tarif jelajah, dan/atau
 - Tarif jasa multimedia,
- dengan struktur tarif sebagai berikut:
- Biaya aktivasi
 - Biaya berlangganan bulanan
 - Biaya penggunaan
 - Biaya fasilitas tambahan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

33. TARIF JASA TELEKOMUNIKASI (lanjutan)

c. Tarif interkoneksi

Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia ("BRTI"), dalam suratnya No. 262/BRTI/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, memutuskan untuk mengubah tarif interkoneksi SMS menjadi berbasis biaya dengan tarif maksimal sebesar Rp23 per SMS efektif sejak tanggal 1 Juni 2012 dan berlaku untuk seluruh operator penyelenggara telekomunikasi.

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika No. 118/KOMINFO/DJPPI/PI.02.04/01/2014 tanggal 30 Januari 2014, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika memutuskan untuk menerapkan tarif interkoneksi baru yang berlaku efektif sejak 1 Februari 2014 sampai dengan 31 Desember 2016 dan dapat dievaluasi setiap tahun oleh BRTI. Sebagai tindak lanjut, Perusahaan dan Telkomsel diminta untuk menyampaikan usulan Dokumen Penawaran Interkoneksi ("DPI") kepada BRTI untuk dievaluasi.

Selanjutnya, BRTI melalui suratnya No. 60/BRTI/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 dan No. 125/BRTI/IV/2014 tanggal 24 April 2014 menyetujui revisi DPI Telkomsel dan Perusahaan terkait tarif interkoneksi. Melalui surat tersebut, BRTI juga menyetujui perubahan tarif interkoneksi SMS menjadi Rp24 per SMS.

d. Tarif sewa jaringan

Melalui Peraturan Menkominfo No. 03/PER/M.KOMINFO/1/2007 tanggal 26 Januari 2007 tentang "Sewa Jaringan", Pemerintah mengatur bentuk penyediaan, jenis, struktur tarif, dan formula tarif layanan untuk sewa jaringan. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menkominfo tersebut, maka Pemerintah mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi No. 115 Tahun 2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang "Persetujuan terhadap Dokumen Jenis Layanan Sewa Jaringan, Besaran Tarif Sewa Jaringan, Kapasitas Tersedia Layanan Sewa Jaringan, Kualitas Layanan Sewa Jaringan, dan Prosedur Penyediaan Layanan Sewa Jaringan Tahun 2008 Milik Penyelenggara Dominan Layanan Sewa Jaringan", sebagai persetujuan atas usulan Perusahaan.

e. Tarif jasa lainnya

Tarif sewa satelit, jasa teleponi dan multimedia lainnya ditentukan oleh penyedia layanan dengan memperhitungkan berbagai pengeluaran dan harga pasar. Pemerintah hanya menetapkan formula tarif untuk layanan teleponi dasar. Tidak ada aturan untuk tarif atas jasa-jasa lainnya.

34. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN

a. Pembelian barang modal

Pada tanggal 31 Maret 2017, jumlah ikatan pembelian barang modal berdasarkan kontrak, terutama sehubungan dengan pengadaan dan instalasi untuk keperluan data, internet, dan jasa teknologi dan informatika, selular, peralatan transmisi dan jaringan kabel adalah sebagai berikut:

Mata uang	Jumlah dalam mata uang asing (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Rupiah	-	7.035
Dolar A.S	296	3.944
Euro	0,16	2
Jumlah		10.981

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

34. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Pembelian barang modal (lanjutan)

Jumlah di atas termasuk perjanjian-perjanjian signifikan berikut:

(i) Perusahaan

Pihak yang terkait dengan kontrak	Tanggal perjanjian awal	Bagian yang signifikan dari perjanjian
Perusahaan dan PT Cisco Technologies Indonesia	14 November 2013	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan WIFI CISCO
Perusahaan dan Thales Alenia Space France	14 Juli 2014	Perjanjian Telkom-3 <i>Substitution (T3S) Satellite System</i>
Perusahaan dan PT Huawei Tech Investment	23 Oktober 2014	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Access Point Indonesia WIFI <i>Platform Huawei</i>
Perusahaan dan PT ZTE Indonesia	28 Agustus 2015	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Modernisasi MSAN untuk Percepatan Pelolosan Kabel Tembaga <i>Platform ZTE</i>
Perusahaan dan PT Sarana Global Indonesia	31 Desember 2015	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Sibolga-Nias, Batam-Tanjung Balai Karimun, Larantuka-Kabalahi-Atambua
Perusahaan dan Space System/Loral, LLC	29 Februari 2016	Perjanjian Pengadaan Tekom 4 - <i>Satellite</i>
Perusahaan dan NEC Corporation	12 Mei 2016	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) <i>Indonesia Global Gateway</i>
Perusahaan dan NEC Corporation	12 Mei 2016	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Radio IP Backhaul Node-B Telkomsel Platform NEC
Perusahaan dan PT Mastersystem Infotama	24 Oktober 2016	Perjanjian Pengadaan Ekspan <i>IP Backbone 2016</i>
Perusahaan dan Space Exploration Technologies Corp	3 November 2016	Perjanjian Peluncuran Tekom 4 - <i>Satellite</i>
Perusahaan dan PT ZTE Indonesia	15 Desember 2016	Pengadaan STB <i>Platform ZTE</i>
Perusahaan dan PT ZTE Indonesia	15 Desember 2016	Perjanjian Pengadaan <i>ONT Retail Platform ZTE</i>
Perusahaan, PT Sigma Cipta Caraka, PT Graha Sarana Duta dan PT Huawei Tech Investment	29 Desember 2016	Perjanjian pengadaan IOC-N

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

34. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Pembelian barang modal (lanjutan)

(ii) Telkomsel

Pihak yang terkait dengan kontrak	Tanggal perjanjian awal	Bagian yang signifikan dari perjanjian
Telkomsel, PT Ericsson Indonesia, Ericsson AB, PT Nokia Siemens Networks, NSN Oy, dan Nokia Siemens Network GmbH & Co. KG	17 April 2008	Perjanjian Pembangunan Jaringan Kombinasi 2G dan 3G (<i>Combined 2G and 3G CS Core Network Rollout Agreements</i>)
Telkomsel, PT Ericsson Indonesia dan PT Nokia Siemens Networks	17 April 2008	Perjanjian untuk Dukungan Teknik (TSA) untuk Jaringan Kombinasi 2G dan 3G (<i>Combined 2G and 3G CS Core Network</i>)
Telkomsel, PT Ericsson Indonesia Ericsson AB, PT Nokia Siemens Networks, NSN Oy, Huawei International Pte. Ltd., PT Huawei dan PT ZTE Indonesia	Maret dan Juni 2009	Perjanjian Pembangunan Jaringan 2G BSS dan 3G UTRAN Rollout (<i>2G BSS and 3G UTRAN Rollout Agreements</i>) sebagai Penyedia Jaringan 2G GSM BSS dan 3G UMTS Radio Access Network
Telkomsel, PT Dimension Data Indonesia dan PT Huawei	3 Februari 2010	Perjanjian untuk Pemeliharaan dan Pengadaan Peralatan dan Jasa Terkait <i>Next Generation Convergence Core Transport Rollout and Technical Support</i>
Telkomsel, Amdocs Software Solutions Limited Liability Company dan PT Application Solutions	8 Februari 2010	Perjanjian <i>Online Charging System ("OCS") and Service Control Points ("SCP") System Solution Development</i>
Telkomsel dan PT Application Solutions	8 Februari 2010	Perjanjian <i>Technical Support</i> untuk Menyediakan Jasa <i>technical support</i> untuk OCS dan SCP
Telkomsel, Amdocs Software Solutions Limited Liability Company dan PT Application Solutions	5 Juli 2011	Perjanjian untuk Pengembangan dan Perpanjangan <i>Customer Relationship Management dan Contact Center Solutions</i>
Telkomsel dan PT Huawei	25 Maret 2013	Perjanjian untuk Dukungan Teknik (TSA) untuk Pengadaan <i>Gateway GPRS Support Node ("GGSN") Service Complex</i>
Telkomsel dan Wipro Limited, Wipro Singapore Pte. Ltd. dan PT WT Indonesia	23 April 2013	Perjanjian Pengembangan dan Pengadaan <i>OSDSS Solution</i>
Telkomsel dan PT Ericsson Indonesia	22 Oktober 2013	Perjanjian Pengadaan <i>GGSN Service Complex Rollout</i>
Telkomsel dan PT Dimension Data Indonesia	25 Mei 2016	Perjanjian untuk Pemeliharaan dan Pengadaan Peralatan dan Jasa Terkait <i>Next Generation Convergence RAN Transport Rollout</i>

(iii) GSD

Pihak yang terkait dengan kontrak	Tanggal perjanjian awal	Bagian yang signifikan dari perjanjian
TLT dan PT Adhi Karya	6 November 2012	Perjanjian Jasa Struktur dan Arsitektur Kontraktor Utama Proyek Pembangunan Gedung Telkom Landmark Tower

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

34. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Perjanjian pinjaman dan fasilitas kredit lainnya

- (i) Pada tanggal 31 Maret 2017, Perusahaan memiliki fasilitas bank garansi untuk jaminan penawaran (*tender bond*), pelaksanaan (*performance bond*), pemeliharaan (*maintenance bond*), setoran jaminan dan uang muka (*advance payment bond*) berbagai proyek Perusahaan, dengan rincian sebagai berikut:

Kreditur	Jumlah fasilitas	Akhir periode fasilitas	Mata uang asal	Fasilitas digunakan	
				Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah
BRI	350	14 Maret 2018	Rp	-	40
			US\$	0	0
BNI	500	31 Maret 2018	Rp	-	71
			US\$	0	1
Bank Mandiri	300	23 Desember 2017	Rp	-	71
			US\$	0	1
Jumlah	1.150				184

- (ii) Telkomsel memiliki fasilitas jaminan dan bank garansi dan fasilitas *standby letter of credit* sebesar US\$3 juta dari SCB, Jakarta. Fasilitas-fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2017. Atas fasilitas-fasilitas ini, sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, Telkomsel telah menggunakan fasilitas bank garansi sebesar Rp20 miliar (setara dengan US\$1,5 juta) untuk jaminan pelaksanaan (*performance bond*) 3G (Catatan 34c.i). Bank garansi tersebut berlaku sampai dengan 24 Maret 2016. Saat laporan keuangan ini diterbitkan, bank garansi ini tidak diperpanjang.

Telkomsel memiliki fasilitas bank garansi dengan BRI sebesar Rp500 miliar. Fasilitas ini berakhir pada 25 September 2017. Atas fasilitas-fasilitas ini, pada tanggal 31 Desember 2016, Telkomsel telah menggunakan fasilitas bank garansi sebesar Rp443 miliar (setara US\$33 juta) sebagai garansi atas perjanjian pembayaran untuk biaya hak pakai tahunan yang akan berakhir pada 31 Maret 2017 dan sebesar Rp20 miliar (setara US\$1,5 juta) sebagai jaminan pelaksanaan 3G yang berlaku sampai dengan 31 Mei 2017. Saat laporan keuangan ini diterbitkan, perpanjangan fasilitas masih dalam proses.

Telkomsel memiliki fasilitas bank garansi dengan BCA sebesar Rp150 miliar. Fasilitas ini akan berakhir pada 15 April 2017.

Telkomsel juga memiliki fasilitas bank garansi dengan BNI sebesar Rp100 miliar. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 11 Desember 2017. Telkomsel menggunakan fasilitas ini untuk menggantikan deposito berjangka yang dijadikan jaminan yang dipersyaratkan untuk program KPU sebesar Rp52 miliar (Catatan 34c.iv).

- (iii) TII memiliki fasilitas bank garansi sebesar US\$15 juta dari Bank Mandiri. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 18 Desember 2017. Saldo fasilitas bank garansi pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar US\$10 juta.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

34. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Lainnya

(i) Lisensi 3G

Mengacu pada Surat Keputusan Menkominfo No. 07/PER/M.KOMINFO/2/2006, No. 268/KEP/M.KOMINFO/9/2009 dan No. 191 Tahun 2013, (Catatan 2i), Telkomsel diharuskan antara lain untuk:

1. Membayar iuran tahunan BHP yang dihitung berdasarkan formula tertentu selama jangka waktu lisensi (10 tahun) sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan. BHP terutang pada saat diterimanya Surat Pemberitahuan Pembayaran dari DJPPI. Iuran tahunan BHP terutang sampai dengan berakhirnya periode lisensi.
2. Menyediakan akses *roaming* untuk operator 3G lainnya.
3. Berkontribusi pada pengembangan KPU.
4. Membangun jaringan 3G yang meliputi setidaknya sejumlah 14 provinsi pada tahun keenam diperolehnya lisensi 3G.
5. Menerbitkan jaminan pelaksanaan (*performance bond*) setiap tahun dengan jumlah mana yang lebih tinggi antara Rp20 miliar atau 5% dari biaya tahunan untuk dibayarkan pada tahun berikutnya.

(ii) Penggunaan frekuensi radio

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 76 tanggal 15 Desember 2010 yang menggantikan Peraturan Pemerintah No. 7 tanggal 16 Januari 2009, biaya penggunaan frekuensi radio tahunan untuk pita frekuensi 800 Megahertz ("MHz"), 900MHz, dan 1800MHz ditentukan menggunakan formula yang ditetapkan dalam Peraturan. Peraturan tersebut berlaku selama 5 tahun sampai diubah lebih lanjut.

Sebagai penerapan atas Peraturan Pemerintah tersebut di atas, Perusahaan dan Telkomsel telah membayar biaya penggunaan frekuensi radio tahunan tahun pertama sampai dengan tahun kelima pada tahun 2010 hingga 2014.

Berdasarkan Surat Keputusan No. 983 Tahun 2015, Menkominfo menentukan bahwa biaya penggunaan frekuensi tahunan tahun keenam (Y6), yaitu tahun 2015 untuk Telkomsel sebesar Rp2.398 miliar. Biaya ini dibayarkan di bulan Desember 2015.

Pada tanggal 6 Juli 2015, Telkomsel menerima Surat Keputusan Menkominfo No. 644 Tahun 2015 tanggal 30 Juni 2015, yang menggantikan Surat Keputusan No. 42 Tahun 2014 tanggal 29 Januari 2014, Menkominfo memberikan wewenang kepada Telkomsel untuk:

- (i) Layanan telekomunikasi bergerak dengan pita frekuensi radio di 800 MHz, 900 MHz, dan 1800 MHz;
- (ii) Layanan telekomunikasi bergerak IMT-2000 dengan pita frekuensi radio 2,1 GHz di jaringan (3G);
- (ii) Layanan telekomunikasi dasar.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

34. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Lainnya (lanjutan)

(ii) Penggunaan frekuensi radio (lanjutan)

Perjanjian Bersyarat atas Pengalihan Bisnis

Agar memaksimalkan peluang bisnis dalam Grup, Perusahaan merestrukturisasi unit bisnis jaringan telekomunikasi nirkabel tetap dan melakukan pengalihan bisnis dan pelanggan jaringan nirkabel ke pihak Telkomsel. Pada tanggal 27 Juni 2014, Perusahaan menandatangani Perjanjian Bersyarat atas Pengalihan Bisnis dengan Telkomsel untuk mengalihkan bisnis dan pelanggan tersebut ke Telkomsel (Catatan 4, 9b, 31).

Berdasarkan Surat Keputusan No. 934 yang dikeluarkan pada tanggal 26 September 2014, Menkominfo menetapkan untuk menyetujui pengalihan izin penggunaan spektrum frekuensi radio pada pita frekuensi radio 800MHz rentang 880-887,5 MHz berpasangan dengan 925-932,5 MHz Perusahaan kepada Telkomsel. Telkomsel dapat menggunakan pita frekuensi radio tersebut sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

Dalam masa peralihan, Perusahaan masih dapat menggunakan pita frekuensi radio pada rentang 880-887,5 MHz berpasangan dengan 925-932,5 MHz paling lambat sampai dengan tanggal 14 Desember 2014.

Berdasarkan Surat Menkominfo Nomor 807/KOMINFO/OJ-SOPI.4/SP.03.03/10/2016 tanggal 13 Oktober 2016 dinyatakan bahwa proses migrasi frekuensi 800 MHz telah selesai dan Telkomsel sudah dapat menggunakan frekuensi (880-887,5) MHz yang berpasangan dengan (925-932,5) MHz secara nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perusahaan dan Telkomsel menyetujui bahwa semua persyaratan pendahuluan telah terpenuhi pada tanggal 30 September 2016 dan pada tanggal 21 Oktober 2016 Perjanjian Bersyarat atas Pengalihan Bisnis telah selesai.

(iii) Pembayaran sewa minimum masa depan sewa operasi

Grup menandatangani beberapa perjanjian sewa menyewa dengan pihak ketiga maupun pihak berelasi yang tidak dapat dibatalkan. Perjanjian tersebut meliputi sewa jaringan, peralatan telekomunikasi serta tanah dan bangunan dengan jangka waktu bervariasi berkisar 1 sampai dengan 10 tahun yang akan berakhir bervariasi antara tahun 2017 hingga 2026. Periode sewa menyewa dapat diperpanjang berdasarkan perjanjian oleh kedua belah pihak.

Jumlah pembayaran dan penerimaan sewa minimum dimasa yang akan datang untuk perjanjian sewa operasi pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebagai berikut:

	Jumlah	Kurang dari 1 tahun	1-5 tahun	Lebih dari 5 tahun
Sebagai <i>lessee</i>	29.716	3.937	14.528	11.251
Sebagai <i>lessor</i>	2.395	918	1.270	207

Sehubungan dengan restrukturisasi bisnis Flexi (Catatan 34c.ii), Perusahaan melakukan negosiasi untuk terminasi dini perjanjian sewa operasi, dan telah mencatat provisi untuk terminasi dini sebesar Rp202 miliar dan Rp666 miliar yang disajikan sebagai "Beban lain-lain" di tahun 2016 dan 2015. Pada tanggal 31 Maret 2017, kewajiban terminasi dini perjanjian sewa operasi telah seluruhnya dibayar.

Jumlah pembayaran sewa minimum diatas, termasuk didalamnya perjanjian sewa dengan penyedia jasa menara telekomunikasi, yang digunakan untuk bisnis nirkabel Flexi.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

34. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Lainnya (lanjutan)

(iv) KPU

Menkominfo menerbitkan Peraturan Menkominfo No. 17 Tahun 2016 tanggal 26 September 2016 yang menggantikan Surat Keputusan Menkominfo No. 45 Tahun 2012 dan peraturan-peraturan sebelumnya yang terkait kebijakan program KPU. Peraturan tersebut mengharuskan penyelenggara telekomunikasi untuk memberikan kontribusi sebesar 1,25% dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi (dengan mempertimbangkan piutang tidak tertagih dari penyelenggaraan telekomunikasi dan/atau beban interkoneksi dan/atau beban ketersambungan) untuk pengembangan KPU.

Berdasarkan Keputusan Menkominfo No. 32/PER/M.KOMINFO/10/2008 tanggal 10 Oktober 2008 (yang diubah dengan Keputusan No.03/PER/M.KOMINFO/2/2010 tanggal 1 Februari 2010) yang menggantikan Keputusan Menkominfo No. 11/PER/M.KOMINFO/04/2007 tanggal 13 April 2007 dan Keputusan Menkominfo No. 38/PER/M.KOMINFO/9/2007 tanggal 20 September 2007 diantaranya menetapkan penyediaan akses dan layanan telekomunikasi di daerah terpencil (program KPU), penyedia jasa ditentukan melalui suatu proses seleksi yang dilakukan oleh Balai Telekomunikasi dan Informatika Pedesaan ("BTIP") yang didirikan berdasarkan Keputusan Menkominfo No. 35/PER/M.KOMINFO/11/2006 tanggal 30 November 2006. Lebih lanjut, berdasarkan Keputusan Menkominfo No. 18/PER/M.KOMINFO/11/2010 tanggal 19 November 2010, BTIP berubah nama menjadi Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika ("BPPPTI").

a. Perusahaan

Pada tanggal 12 Maret 2010, Perusahaan ditunjuk sebagai pemenang tender oleh Pemerintah melalui BTIP, untuk menyediakan pusat layanan jasa akses internet KPU kecamatan senilai Rp322 miliar, yang meliputi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.

Pada tanggal 23 Desember 2010, Perusahaan ditunjuk sebagai pemenang tender oleh Pemerintah melalui BTIP, untuk menyediakan pusat layanan jasa akses internet KPU kecamatan yang bersifat bergerak senilai Rp528 miliar, yang meliputi Jambi, Riau, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Papua dan Irian Jaya Barat.

Pada tahun 2015, program KPU ini dihentikan. Pada tanggal 8 September 2015, Perusahaan mengajukan klaim arbitrase ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") untuk penyelesaian saldo piutang Perjanjian Paket Proyek USO-PLIK dan USO-MPLIK. Pada tanggal 22 September 2016, BANI memutuskan bahwa BPPPTI harus membayar kekurangan pembayaran kepada Perusahaan untuk Paket Proyek USO-PLIK dan USO-MPLIK masing-masing sebesar Rp127 miliar dan Rp342 miliar.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan telah menerima pembayaran dari BPPPTI sebesar Rp278 miliar.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

34. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Lainnya (lanjutan)

(iv) KPU (lanjutan)

b. Telkomsel

Pada tanggal 16 Januari dan 23 Januari 2009, Telkomsel ditunjuk sebagai pemenang tender oleh Pemerintah melalui BTIP, untuk menyediakan serta mengoperasikan akses dan layanan telekomunikasi di daerah terpencil (Program KPU) senilai Rp1,66 triliun yang meliputi seluruh wilayah Indonesia kecuali Sulawesi, Maluku dan Papua. Oleh karena itu, Telkomsel juga akan mendapatkan lisensi jaringan tetap lokal dan hak untuk menggunakan frekuensi radio pada pita frekuensi 2.390 MHz - 2.400 MHz.

Selanjutnya, pada tahun 2010 dan 2011, perjanjian-perjanjian tersebut telah diubah, meliputi, antara lain, untuk mengubah harga menjadi Rp1,76 triliun dan untuk mengubah periode pembayaran dari kuartalan menjadi bulanan atau kuartalan.

Pada bulan Januari 2010, Telkomsel memperoleh lisensi operasi dari kementerian untuk menyediakan jasa jaringan tetap lokal dalam program KPU.

Pada tanggal 27 Desember 2011, Telkomsel (atas nama Konsorsium Telkomsel, konsorsium yang dibentuk dengan Dayamitra pada 9 Desember 2011) ditunjuk oleh BPPPTI sebagai penyedia Program KPU di daerah perbatasan untuk semua paket (paket 1 - 13) dengan total harga sebesar Rp830 miliar. Pada tanggal tersebut, Telkomsel juga ditunjuk oleh BPPPTI sebagai penyedia Program KPU (*Upgrading*) "Desa Pinter" atau "Desa Puna Internet" untuk paket 1, 2 dan 3 dengan total harga sebesar Rp261 miliar.

Pada tanggal 31 Maret 2014, program KPU untuk paket 1, 2, 3, 6 dan 7 telah dihentikan. Pada tanggal 18 September 2014, Telkomsel mengajukan klaim arbitrase ke BANI untuk penyelesaian saldo piutang dari BPPPTI. Pada tanggal 23 Oktober 2015, BANI memutuskan bahwa Telkomsel harus membayar ke BPPPTI atas kelebihan pembayaran oleh BPPPTI terkait program KPU tersebut sebesar Rp94,2 miliar. Telkomsel menerima putusan tersebut dan melakukan pembayaran pada bulan Desember 2015. Pada tanggal 29 Oktober 2015, BPPPTI menginformasikan bahwa ijin operasional untuk program KPU Desa Pinter tidak dapat diterbitkan. Pada Januari 2016, Telkomsel mengajukan klaim arbitrase ke BANI untuk menghentikan program KPU.

Pada tanggal 20 Februari 2017, BANI memutuskan bahwa BPPPTI harus membayar atas jasa layanan Desa Pinter kepada Telkomsel sebesar Rp74 miliar.

Pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016, nilai tercatat piutang Perusahaan dan Telkomsel terkait program KPU tersebut yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif adalah masing-masing sebesar Rp178 miliar (Catatan 5).

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

35. KONTINJENSI

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Grup telah menjadi tergugat dalam kasus hukum yang terkait dengan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan praktik kartel SMS.

Perusahaan, Telkomsel, beserta tujuh operator telekomunikasi domestik lainnya dilaporkan oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha ("KPPU") dengan tuduhan melakukan praktik kartel SMS. Pada tanggal 17 Juni 2008 dalam Perkara Nomor: 26/KPPU-L/2007, Perusahaan, Telkomsel beserta tujuh operator domestik lainnya diperiksa. Hasil pemeriksaan tersebut KPPU menyatakan bahwa Perusahaan, Telkomsel dan lima operator domestik lainnya terbukti melanggar pasal 5 Undang-Undang No. 5 tahun 1999 dan menjatuhkan denda kepada Perusahaan dan Telkomsel masing-masing sebesar Rp18 miliar dan Rp25 miliar.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada praktik kartel yang dilakukan yang melanggar peraturan Undang-Undang yang berlaku. Oleh karena itu, Perusahaan dan Telkomsel masing-masing mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 14 Juli 2008 dan 11 Juli 2008.

Tujuh operator telekomunikasi domestik lainnya juga mengajukan keberatan di berbagai pengadilan. Terkait dengan hal tersebut, maka KPPU meminta Mahkamah Agung untuk mengkonsolidasi kasus ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung tanggal 12 April 2011, Mahkamah Agung menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyelidiki dan menyelesaikan kasus ini. Pada tanggal 27 Mei 2015, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor: 03/KPPU/208/PN.JKT.PST memutuskan bahwa Perusahaan, Telkomsel, dan tujuh operator telekomunikasi domestik lainnya menang atas kasus ini.

Pada tanggal 23 Juli 2015, KPPU mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung terkait perkara praktik kartel SMS. Pada tanggal 29 Februari 2016, Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor: 9 K/Pdt.Sus-KPPU/2016 memutuskan bahwa KPPU menang atas kasus ini, sehingga Perusahaan dan Telkomsel harus membayar denda masing-masing sebesar Rp18 miliar dan Rp25 miliar. Sampai dengan penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan dan Telkomsel telah membayar kewajiban tersebut pada kas negara.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

36. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM VALUTA ASING

Saldo aset dan liabilitas moneter dalam valuta asing adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2017			
	Dolar A.S. (dalam jutaan)	Yen Jepang (dalam jutaan)	Lain-lain* (dalam jutaan)	Setara Rupiah (dalam miliaran)
Aset				
Kas dan setara kas	194,09	5,99	15,60	2.793
Aset keuangan lancar lainnya	6,74	-	0,55	96
Piutang usaha				
Pihak berelasi	3,03	-		40
Pihak ketiga	91,90	-	2,81	1.262
Piutang lain-lain	0,55	-	0,10	10
Uang muka dan aset tidak lancar lainnya	4,09	-	0,06	57
Jumlah aset	<u>300,4</u>	<u>5,99</u>	<u>19,12</u>	<u>4.258</u>
Liabilitas				
Utang usaha				
Pihak berelasi	(0,14)	-	-	(2)
Pihak ketiga	(100,42)	(5,86)	(3,81)	(1.390)
Utang lain-lain	(6,02)	-	(0,72)	(90)
Biaya yang masih harus dibayar	(42,69)	(65,68)	(0,21)	(579)
Uang muka pelanggan dan pemasok	(0,48)	-	-	(6)
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	(10,73)	(767,90)	-	(234)
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(57,46)	(5.375,28)	-	(1.407)
Jumlah liabilitas	<u>(217,94)</u>	<u>(6.214,72)</u>	<u>(4,74)</u>	<u>(3.708)</u>
Aset (liabilitas) bersih	<u>82,46</u>	<u>(6.208,73)</u>	<u>14,38</u>	<u>550</u>

	31 Desember 2016			
	Dolar A.S. (dalam jutaan)	Yen Jepang (dalam jutaan)	Lain-lain* (dalam jutaan)	Setara Rupiah (dalam miliaran)
Aset				
Kas dan setara kas	204,34	5,99	20,94	3.032
Aset keuangan lancar lainnya	8,81	-	0,35	122
Piutang usaha				
Pihak berelasi	0	-	0	0
Pihak ketiga	106,70	-	3,88	1.488
Piutang lain-lain	0,44	-	0,10	7
Uang muka dan aset tidak lancar lainnya	4,09	-	-	56
Jumlah aset	<u>324,38</u>	<u>5,99</u>	<u>25,27</u>	<u>4.705</u>
Liabilitas				
Utang usaha				
Pihak berelasi	(0,18)	-	(0,01)	(2)
Pihak ketiga	(163,09)	(4,83)	(6,21)	(2.246)
Utang lain-lain	(5,40)	-	(1,18)	(88)
Biaya yang masih harus dibayar	(27,99)	(20,96)	(0,18)	(381)
Uang muka pelanggan dan pemasok	(0,48)	-	-	(7)
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	(10,88)	(767,90)	-	(235)
Promes	(0,10)	-	-	(1)
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(64,14)	(5.375,28)	-	(1.482)
Jumlah liabilitas	<u>(272,26)</u>	<u>(6.168,97)</u>	<u>(7,58)</u>	<u>(4.442)</u>
Aset (liabilitas) bersih	<u>52,12</u>	<u>(6.162,98)</u>	<u>17,69</u>	<u>263</u>

* Aset dan liabilitas dalam mata uang asing disajikan dalam setara Dolar A.S. dengan menggunakan kurs beli dan jual yang diterbitkan oleh Reuters pada akhir periode pelaporan.

Aktivitas Grup memiliki kemungkinan terhadap berbagai risiko keuangan termasuk dampak perubahan harga pasar surat utang dan efek, nilai tukar mata uang asing, dan tingkat bunga.

Jika Grup melaporkan aset dan liabilitas dalam mata uang asing pada tanggal 31 Maret 2017 menggunakan kurs tanggal 19 April 2017, kerugian selisih kurs yang belum terealisasi sebesar Rp20 miliar.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

1. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan

a. Klasifikasi

i. Aset keuangan

	<u>31 Maret 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Aset keuangan dengan nilai wajar berpengaruh pada laba rugi		
Aset derivatif – opsi jual	-	-
Utang dan piutang		
Kas dan setara kas	33.699	29.767
Piutang usaha dan lain-lain, bersih	9.555	7.900
Aset keuangan lancar lainnya	329	313
Aset tidak lancar lainnya	262	210
Aset keuangan tersedia untuk dijual		
Investasi tersedia untuk dijual	1.145	1.158
Jumlah aset keuangan	<u>44.990</u>	<u>39.348</u>

ii. Liabilitas keuangan

	<u>31 Maret 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai amortisasi		
Utang usaha dan utang lain-lain	12.595	13.690
Beban yang masih harus dibayar	12.567	11.283
Pinjaman		
Utang bank jangka pendek	914	911
Pinjaman penerusan (<i>two-step loans</i>)	1.282	1.292
Obligasi dan wesel bayar	9.322	9.323
Utang bank jangka panjang	15.646	15.566
Utang sewa pembiayaan	3.922	4.010
Pinjaman lainnya	697	697
Jumlah liabilitas keuangan	<u>56.945</u>	<u>56.772</u>

b. Nilai wajar

31 Maret 2017	Jumlah nilai tercatat	Nilai wajar	Pengukuran nilai wajar pada tanggal pelaporan menggunakan		
			Harga pasar aset atau liabilitas sejenis pada pasar aktif (level 1)	Input signifikan yang dapat diobservasi (level 2)	Input signifikan yang tidak dapat diobservasi (level 3)
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar					
Investasi tersedia untuk dijual	1.145	1.145	1.074	71	-
Jumlah	<u>1.145</u>	<u>1.145</u>	<u>1.074</u>	<u>71</u>	<u>-</u>
Liabilitas keuangan yang nilai wajarnya disajikan					
Pinjaman					
Pinjaman penerusan (<i>two-step loans</i>)	1.282	1.306	-	-	1.306
Obligasi dan wesel bayar	9.322	10.095	9.754	-	341
Utang bank jangka panjang	15.646	15.458	-	-	15.458
Utang sewa pembiayaan	3.922	3.922	-	-	3.922
Pinjaman lainnya	697	695	-	-	695
Jumlah	<u>30.869</u>	<u>31.476</u>	<u>9.754</u>	<u>-</u>	<u>21.722</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

1. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

b. Nilai wajar (lanjutan)

	Jumlah nilai tercatat	Nilai wajar	Pengukuran nilai wajar pada tanggal pelaporan menggunakan		
			Harga pasar aset atau liabilitas sejenis pada pasar aktif (level 1)	Input signifikan yang dapat diobservasi (level 2)	Input signifikan yang tidak dapat diobservasi (level 3)
31 Desember 2016					
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar					
Investasi tersedia untuk dijual	1.158	1.158	1.058	100	-
Jumlah	1.158	1.158	1.058	100	-
Liabilitas keuangan yang nilai wajarnya disajikan					
Pinjaman					
Pinjaman penerusan (<i>two-step loans</i>)	1.292	1.312	-	-	1.312
Obligasi dan wesel bayar	9.323	9.684	9.342	-	342
Utang bank jangka panjang	15.566	15.404	-	-	15.404
Utang sewa pembiayaan	4.010	4.010	-	-	4.010
Pinjaman lainnya	697	689	-	-	689
Jumlah	30.888	31.099	9.342	-	21.757

Aset tersedia untuk dijual terutama terdiri dari reksadana, dan obligasi korporasi dan Pemerintah. Reksadana yang secara aktif diperdagangkan di pasar dicatat berdasarkan harga wajar menggunakan kuotasi harga pasar dan diklasifikasikan sebagai level 1. Obligasi korporasi dan Pemerintah dinyatakan pada nilai wajar dengan referensi terhadap harga surat berharga sejenis pada tanggal pelaporan. Penilaian dari put option memerlukan *judgement* manajemen yang signifikan dikarenakan tidak adanya kuotasi harga pasar dan kurangnya instrumen pembanding yang ada di pasar. Karena tidak diperdagangkan secara aktif di pasar tersedia, surat berharga ini diklasifikasikan sebagai level 2.

Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi menampilkan nilai *Put Option* sebesar 20% dari sisa kepemilikan atas Indonusa yang disebabkan dari keputusan divestasi. Karena nilai wajar tidak dapat diawasi secara langsung dan teknik penilaiannya digunakan untuk menentukan nilai wajarnya, aset keuangan ini diklasifikasikan dalam level 3.

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir untuk investasi yang nilai wajarnya diukur dengan input signifikan yang tidak dapat diobservasi (level 3) pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016, adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Saldo awal	-	172
Rugi belum direalisasi-diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	-	(172)
Saldo akhir	-	-

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

1. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

c. Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah jumlah suatu aset dapat ditukarkan, atau suatu liabilitas dapat diselesaikan, antara berbagai pihak secara *arm's length transaction*.

Grup menentukan pengukuran nilai wajar untuk tujuan pelaporan dari tiap kelas aset dan liabilitas keuangan berdasarkan metode dan asumsi sebagai berikut:

- (i) Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan jangka pendek dengan jatuh tempo satu tahun atau kurang (kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, aset lancar lainnya, utang usaha, utang lain-lain, beban yang masih harus dibayar, dan utang bank jangka pendek), penyertaan jangka panjang, uang muka dan aset tidak lancar lainnya dipertimbangkan mendekati nilai bukunya sebagai hasil dari pendiskontoan yang tidak signifikan.
- (ii) Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan jangka panjang (aset tidak lancar lainnya (piutang jangka panjang dan kas dibatasi penggunaannya) dan kewajiban tidak lancar lainnya) dipertimbangkan mendekati nilai bukunya karena diukur berdasarkan hasil dari pendiskontoan arus kas dimasa yang akan datang.
- (iii) Aset tersedia untuk dijual terutama terdiri dari saham, reksadana, dan obligasi korporasi dan Pemerintah. Saham dan reksadana yang aktif diperdagangkan di pasar yang tersedia dinyatakan pada nilai wajarnya dengan menggunakan kuotasi harga pasar atau jika tidak dikuotasi, ditentukan menggunakan teknik valuasi. Obligasi korporasi dan Pemerintah dinyatakan pada nilai wajar dengan referensi harga dari surat berharga yang sejenis pada tanggal pelaporan.
- (iv) Nilai wajar liabilitas keuangan jangka panjang diestimasi dengan mendiskontokan arus kas kontraktual masa depan dari tiap liabilitas pada tingkat suku bunga yang ditawarkan kepada Grup untuk liabilitas sejenis yang jatuh temponya bisa diperbandingkan oleh para pelaku bank Grup, kecuali untuk obligasi yang didasarkan pada harga pasar.

Estimasi nilai wajar bersifat *judgmental* dan melibatkan batasan-batasan yang beragam, termasuk:

- a. Nilai wajar disajikan tidak mempertimbangkan dampak fluktuasi mata uang di masa depan.
- b. Estimasi nilai wajar tidak selalu mengindikasikan nilai yang Grup akan catat pada saat pelepasan/penghentian aset dan liabilitas keuangan.

2. Manajemen risiko keuangan

Aktivitas Grup mengandung berbagai macam risiko keuangan, seperti risiko pasar (termasuk risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit, dan risiko likuiditas. Secara keseluruhan, program manajemen risiko keuangan Grup bertujuan untuk meminimalkan kerugian atas nilai aset dan liabilitas yang dapat timbul dari pergerakan nilai tukar mata uang asing dan pergerakan tingkat suku bunga. Manajemen mempunyai kebijakan tertulis untuk manajemen risiko valuta asing yang sebagian besar melalui penempatan deposito berjangka dan lindung nilai untuk mengantisipasi risiko fluktuasi valuta asing untuk jangka waktu 3 sampai dengan 12 bulan.

Fungsi manajemen risiko keuangan dijalankan oleh unit *Corporate Finance* di bawah kebijakan-kebijakan yang disetujui oleh Direksi. Unit *Corporate Finance* mengidentifikasi, mengevaluasi, dan melakukan aktivitas lindung nilai risiko-risiko keuangan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

2. Manajemen risiko keuangan (lanjutan)

a. Risiko nilai tukar mata uang asing

Grup rentan terhadap risiko nilai tukar mata uang asing atas transaksi penjualan, pembelian, dan pinjaman yang didenominasi dalam mata uang asing. Transaksi yang didenominasi dalam mata uang asing terutama dalam Dolar A.S. dan Yen Jepang. Eksposur risiko nilai tukar mata uang asing Grup tidak material.

Risiko kenaikan nilai tukar mata uang asing terhadap liabilitas Grup diharapkan dapat saling hapus dengan dampak dari nilai tukar atas deposito berjangka dan piutang dalam mata uang asing yang ditetapkan minimal 25% dari liabilitas jangka pendek dalam mata uang asing yang terutang.

Tabel di bawah ini menggambarkan eksposur aset dan liabilitas keuangan Grup terhadap risiko nilai tukar mata uang:

	31 Maret 2017		31 Desember 2016	
	Dolar A.S. (dalam miliar)	Yen Jepang (dalam miliar)	Dolar A.S. (dalam miliar)	Yen Jepang (dalam miliar)
Aset keuangan	0,29	0,01	0,32	0,01
Liabilitas keuangan	(0,22)	(6,23)	(0,27)	(6,17)
Eksposur bersih	0,07	(6,22)	0,05	(6,16)

Analisis Sensitivitas

Penguatan Dolar A.S. dan Yen Jepang, sebagaimana diindikasikan dibawah, terhadap Rupiah pada 31 Maret 2017 akan menurunkan ekuitas dan laba atau rugi sebesar jumlah yang ditunjukkan dibawah. Analisis ini didasarkan pada varian nilai tukar mata uang asing yang Grup pertimbangkan sebagai sangat mungkin terjadi pada tanggal pelaporan. Analisis mengasumsikan bahwa seluruh variabel lain, pada khususnya tingkat bunga, tidak berubah.

	<u>Ekuitas/ laba (rugi)</u>
31 Maret 2017	
Dolar A.S. (penguatan 1%)	9
Yen Jepang (penguatan 5%)	(36)

Pelemahan Dolar A.S. dan Yen Jepang terhadap Rupiah pada 31 Maret 2017 akan mempunyai dampak yang setara tetapi berlawanan terhadap jumlah yang ditunjukkan diatas, pada dasar seluruh variabel lain tidak berubah.

b. Risiko harga pasar

Grup rentan terhadap perubahan dalam harga pasar atas utang dan ekuitas terkait penyertaan tersedia untuk dijual yang dicatat pada nilai wajar. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar penyertaan tersedia untuk dijual diakui pada ekuitas.

Kinerja penyertaan tersedia untuk dijual Grup dimonitor secara berkala, bersama dengan penilaian secara teratur mengenai keterkaitannya dengan rencana strategis jangka panjang Grup.

Pada tanggal 31 Maret 2017, manajemen mempertimbangkan risiko harga untuk penyertaan tersedia untuk dijual adalah tidak material dalam hal dampak yang mungkin terjadi pada laba rugi dan total ekuitas dari perubahan dalam nilai wajar yang sangat mungkin terjadi.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

2. Manajemen risiko keuangan (lanjutan)

c. Risiko tingkat suku bunga

Pergerakan tingkat suku bunga diawasi untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap posisi keuangan. Pinjaman dalam berbagai tingkat suku bunga menyebabkan Grup terpapar risiko tingkat suku bunga (Catatan 15 dan 16). Untuk mengukur risiko pasar atas pergerakan suku bunga, Grup melakukan analisis pada pergerakan marjin suku bunga dan pada profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan berdasarkan jadwal perubahan suku bunga.

Pada tanggal pelaporan, profil risiko tingkat bunga pinjaman yang dikenakan bunga milik Grup adalah sebagai berikut:

	<u>31 Maret 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Pinjaman bunga tetap	(16.181)	(16.383)
Pinjaman bunga mengambang	(15.591)	(15.416)

Analisis sensitivitas untuk pinjaman bunga mengambang

Pada 31 Maret 2017, penurunan (kenaikan) 25 poin dasar pada tingkat bunga pinjaman bunga mengambang akan menaikkan (menurunkan) ekuitas dan laba atau rugi masing-masing sebesar Rp38,5 miliar. Analisis mengasumsikan bahwa seluruh variabel lain, pada khususnya nilai tukar mata uang asing, tidak berubah.

d. Risiko kredit

Tabel di bawah ini menggambarkan eksposur maksimum risiko kredit atas aset keuangan Grup:

	<u>31 Maret 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Kas dan setara kas	33.699	29.767
Aset keuangan lancar lainnya	1.474	1.471
Piutang usaha dan lain-lain, bersih	9.555	7.900
Uang muka dan aset tidak lancar lainnya	262	210
Jumlah	<u>44.990</u>	<u>39.348</u>

Grup rentan terhadap risiko kredit terutama dari piutang usaha dan piutang lain-lain. Risiko kredit dikendalikan dengan pengawasan terus menerus atas saldo dan penagihan.

Risiko kredit yang berasal dari saldo bank dan institusi keuangan dikelola oleh Grup melalui departemen *Corporate Finance* sesuai dengan kebijakan tertulis dari Grup. Grup menempatkan sebagian besar kas dan setara kasnya di bank milik pemerintah karena bank milik pemerintah memiliki jaringan cabang terluas di Indonesia dan dipertimbangkan sebagai bank terpercaya dikarenakan dimiliki oleh pemerintah. Oleh karena itu, penempatan ini bertujuan untuk meminimalisasi kerugian secara finansial yang berasal dari potensi kegagalan dalam pembayaran dari bank dan institusi keuangan.

Piutang usaha dan piutang lain-lain tidak memiliki suatu konsentrasi utama risiko kredit dimana tidak ada saldo piutang pelanggan yang melebihi 6% dari piutang usaha dan piutang lain-lain pada tanggal 31 Maret 2017.

Manajemen yakin akan kemampuannya untuk mengawasi dan mempertahankan eksposur risiko kredit yang minimal, dimana Grup telah menyediakan provisi yang memadai untuk menutupi kerugian yang timbul dari piutang yang tidak tertagih berdasarkan data kerugian historis.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

2. Manajemen risiko keuangan (lanjutan)

e. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas timbul apabila Grup mengalami kesulitan untuk memenuhi liabilitas keuangan ketika liabilitas keuangan tersebut jatuh tempo.

Manajemen risiko likuiditas berarti menjaga kecukupan saldo kas dalam upaya pemenuhan liabilitas keuangan Grup. Grup secara terus menerus melakukan analisis untuk mengawasi rasio-rasio likuiditas laporan posisi keuangan, seperti antara lain: rasio likuiditas dan rasio *debt equity* terhadap persyaratan-persyaratan yang diharuskan perjanjian utang.

Berikut adalah analisis jatuh tempo liabilitas keuangan Grup:

	Nilai buku	Arus kas wajib	2017	2018	2019	2020	2021 dan selanjutnya
31 Maret 2017							
Utang usaha dan lain-lain	12.595	(12.595)	(12.595)	-	-	-	-
Beban yang masih harus dibayar	12.567	(12.567)	(12.567)	-	-	-	-
Pinjaman							
Utang bank	16.560	(20.279)	(5.836)	(4.651)	(2.949)	(2.774)	(4.069)
Obligasi dan wesel bayar	9.322	(19.436)	(967)	(789)	(1.133)	(3.000)	(13.547)
Utang sewa pembiayaan	3.922	(5.002)	(992)	(693)	(818)	(787)	(1.712)
Pinjaman penerusan (<i>two-step loans</i>)	1.282	(1.472)	(281)	(210)	(219)	(211)	(551)
Pinjaman lainnya	697	(997)	(66)	(102)	(164)	(153)	(512)
Jumlah	56.945	(72.348)	(33.304)	(6.445)	(5.283)	(6.925)	(20.391)

	Nilai buku	Arus kas wajib	2017	2018	2019	2020	2021 dan selanjutnya
31 Desember 2016							
Utang usaha dan lain-lain	13.690	(13.690)	(13.690)	-	-	-	-
Beban yang masih harus dibayar	11.283	(11.283)	(11.283)	-	-	-	-
Pinjaman							
Utang bank	16.477	(20.421)	(5.875)	(5.635)	(2.883)	(2.565)	(3.463)
Obligasi dan wesel bayar	9.323	(19.670)	(969)	(967)	(1.187)	(3.000)	(13.547)
Utang sewa pembiayaan	4.010	(5.160)	(987)	(892)	(816)	(771)	(1.694)
Pinjaman penerusan (<i>two-step loans</i>)	1.292	(1.487)	(279)	(244)	(216)	(209)	(539)
Pinjaman lainnya	697	(1.007)	(60)	(118)	(164)	(153)	(512)
Jumlah	56.772	(72.218)	(33.143)	(7.856)	(5.266)	(6.698)	(19.755)

Perbedaan antara nilai buku dengan arus kas wajib merupakan nilai bunga. Nilai bunga dari pinjaman mengambang ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga efektif pada tanggal pelaporan.

38. MANAJEMEN MODAL

Struktur modal Grup adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2017		31 Desember 2016	
	Jumlah	Bagian	Jumlah	Bagian
Utang jangka pendek	914	0,74%	911	0,78%
Utang jangka panjang	30.886	25,14%	30.888	26,59%
Total utang	31.800	25,88%	31.799	27,37%
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik	91.077	74,12%	84.384	72,63%
Jumlah	122.877	100%	116.183	100%

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. MANAJEMEN MODAL (lanjutan)

Tujuan Grup dalam pengelolaan permodalan adalah untuk mempertahankan kelangsungan usaha Grup guna memberikan imbal hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada pemegang kepentingan lainnya serta menjaga struktur modal yang optimal untuk mengurangi biaya modal.

Secara berkala, Grup melakukan penilaian utang untuk menilai kemungkinan pembiayaan kembali kewajiban yang ada dengan yang baru yang memiliki biaya yang lebih efisien yang akan mengarahkan pada biaya utang yang lebih optimal. Dalam kasus kas menganggur dengan kesempatan investasi terbatas, Grup akan mempertimbangkan membeli kembali saham-sahamnya atau membayar dividen kepada para pemegang sahamnya.

Sebagai tambahan untuk patuh kepada pembatasan-pembatasan utang, Grup juga menjaga struktur modalnya pada tingkat yang diyakini tidak akan membahayakan peringkat kredit dan yang hampir setara dengan pesaingnya.

Rasio utang terhadap ekuitas (perbandingan utang dengan bunga bersih terhadap total ekuitas) adalah rasio yang dimonitor oleh manajemen untuk mengevaluasi struktur modal Grup dan mengkaji efektifitas utang Grup. Grup memonitor tingkat utangnya untuk meyakinkan bahwa rasio utang terhadap ekuitas sesuai atau dibawah rasio yang ditetapkan dalam pinjaman kontraktual dan bahwa rasio tersebut sebanding atau lebih baik daripada entitas industri telekomunikasi lain dalam area regional.

Rasio utang terhadap ekuitas Grup pada 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Maret 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Jumlah utang dengan bunga	31.800	31.799
Dikurangi: kas dan setara kas	(33.699)	(29.767)
Utang bersih	(1.899)	2.032
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik	<u>91.077</u>	<u>84.384</u>
Rasio utang bersih terhadap ekuitas	(2,09%)	2,41%

Sebagaimana disajikan dalam Catatan 16, Grup dipersyaratkan untuk memelihara rasio utang terhadap ekuitas dan rasio *debt service coverage* tertentu oleh kreditur. Selama periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, Perusahaan telah mematuhi persyaratan permodalan yang diberikan oleh pihak eksternal.

39. INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS

Aktivitas non-kas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Penambahan aset tetap melalui:		
Utang usaha	5.268	4.885
Sewa pembiayaan	169	164
Kapitalisasi bunga	99	-
Penambahan aset takberwujud melalui:		
Utang usaha	22	-